

**STRATEGI PENGEMBANGAN POTENSI PARIWISATA BERBASIS
KOMUNITAS DI DESA WISATA EMBUNG TANJUNG ANOM
KABUPATEN LAMPUNG TENGAH**

(Disertasi)

Oleh

Sudarman Mersa
NPM 2036011006



**PROGRAM DOKTOR STUDI PEMBANGUNAN
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS LAMPUNG
BANDAR LAMPUNG
2025**

**STRATEGI PENGEMBANGAN POTENSI PARIWISATA BERBASIS
KOMUNITAS DI DESA WISATA EMBUNG TANJUNG ANOM
KABUPATEN LAMPUNG TENGAH**

Oleh

Sudarman Mersa

Disertasi

**Sebagai Salah Satu Syarat untuk Mencapai Gelar
DOKTOR STUDI PEMBANGUNAN**

Pada

**Program Doktor Studi Pembangunan
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Lampung**



**PROGRAM DOKTOR STUDI PEMBANGUNAN
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS LAMPUNG
BANDAR LAMPUNG
2025**

ABSTRAK

STRATEGI PENGEMBANGAN POTENSI PARIWISATA BERBASIS KOMUNITAS DI DESA WISATA EMBUNG TANJUNG ANOM KABUPATEN LAMPUNG TENGAH

Oleh:

Sudarman Mersa

ABSTRAK

Pengembangan pariwisata berbasis komunitas menjadi pendekatan strategis dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat, khususnya di daerah pedesaan yang memiliki potensi sumber daya alam dan budaya lokal. Embung Tanjung Anom di Kabupaten Lampung Tengah merupakan salah satu destinasi lokal yang telah dikembangkan dengan melibatkan partisipasi masyarakat melalui konsep *Community-Based Tourism (CBT)*. Namun, implementasi konsep ini masih menghadapi berbagai kendala, seperti minimnya infrastruktur pendukung, rendahnya kapasitas sumber daya manusia, serta terbatasnya promosi dan manajemen kelembagaan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis penerapan prinsip-prinsip CBT, mengidentifikasi faktor pendukung dan penghambat, serta merumuskan strategi pengembangan potensi pariwisata berbasis komunitas di Embung Tanjung Anom. Penelitian menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan teknik pengumpulan data melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi, serta analisis menggunakan metode SWOT. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Pokdarwis, yang didominasi pemuda, berperan sentral dalam pelaksanaan atraksi dan promosi wisata. Namun, pengembangan pariwisata masih belum optimal karena ketimpangan distribusi manfaat ekonomi, kurangnya pelatihan kepariwisataan, dan akses jalan yang buruk. Strategi pengembangan diarahkan pada edukasi pariwisata bagi masyarakat, penguatan promosi digital melalui kolaborasi dengan influencer, serta menjadikan Embung Tanjung Anom sebagai destinasi unggulan daerah. Penelitian ini menghasilkan model strategi pengembangan pariwisata berbasis komunitas yang menekankan sinergi antara masyarakat, pemerintah, dan swasta untuk menciptakan pariwisata berkelanjutan.

Kata kunci: *Community-Based Tourism*, Embung Tanjung Anom, Pokdarwis, strategi pengembangan, pariwisata berkelanjutan.

ABSTRACT

COMMUNITY-BASED TOURISM DEVELOPMENT STRATEGY IN THE TOURISM VILLAGE OF EMBUNG TANJUNG ANOM, CENTRAL LAMPUNG REGENCY

By:

Sudarman Mersa

ABSTRACT

Community-based tourism (CBT) development is a strategic approach to improving community welfare, particularly in rural areas rich in natural and cultural resources. Embung Tanjung Anom, located in Central Lampung Regency, is one such local destination that has been developed through active community participation under the CBT concept. However, the implementation of CBT still faces various challenges, such as inadequate infrastructure, limited human resource capacity, and weak promotional and institutional management. This study aims to analyze the application of CBT principles, identify supporting and inhibiting factors, and formulate strategic models for developing community-based tourism potential in Embung Tanjung Anom. A qualitative descriptive approach was employed, using data collection techniques including interviews, observations, and documentation, with SWOT analysis as the analytical tool. The findings indicate that the Tourism Awareness Group (Pokdarwis), largely comprised of local youth, plays a central role in organizing attractions and promoting the site. However, tourism development remains suboptimal due to unequal distribution of economic benefits, lack of tourism education and training, and poor road access. Development strategies are directed towards strengthening tourism education, enhancing digital promotion through collaboration with tourism influencers, and positioning Embung Tanjung Anom as a leading tourism destination in the region. This study proposes a strategic model for community-based tourism development that emphasizes synergy among communities, government, and the private sector to achieve sustainable tourism outcomes.

Keywords: Community-Based Tourism, Embung Tanjung Anom, Pokdarwis, development strategy, sustainable tourism.

Judul Disertasi : **Strategi Pengembangan Potensi Pariwisata Berbasis Komunitas di Desa Wisata Embung Tanjung Anom Kabupaten Lampung Tengah**

Nama Mahasiswa : **Sudarman Mersa**

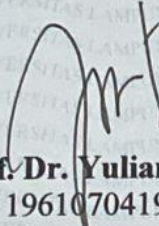
Nomor Pokok Mahasiswa : **2036011006**

Program Studi : **Doktor Studi Pembangunan**

Fakultas : **Ilmu Sosial dan Ilmu Politik**

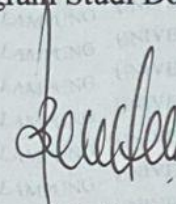
MENYETUJUI

1. Komisi Promotor


Prof. Dr. Yulianto, M.S.
NIP 196107041988031005


Prof. Dr. Bambang Utoyo S, M.Si.
NIP 196302061988031002

2. Ketua Program Studi Doktor Studi Pembangunan


Dr. Bartoven Vivit Nurdin, S.Sos., M.Si.
NIP 197704012005012003

MENGESAHKAN

1. Tim penguji

Ketua : Prof. Dr. Sunyono, M.Si.
(Wakil Rektor III bidang Kemahasiswaan dan Alumni
Universitas Lampung)

Sekretaris : Dr. Arif Sugiono, S.Sos., M.Si.
(Wakil Dekan II Bidang Umum dan Keuangan
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas
Lampung)

2. Penguji Eksternal

Prof. Dr. Abdul Hakim, M.Si.
(Universitas Brawijaya)

3. Promotor

Prof. Dr. Yulianto, M.S.

4. Co- Promotor

Prof. Dr. Bambang Utoyo S, M.Si.

5. Penguji Internal

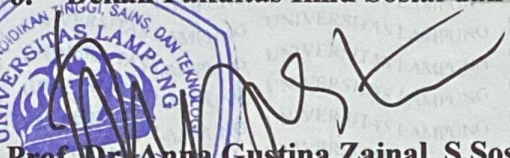
Dr. Bartoven Vivit Nurdin, S.Sos., M.Si.

Prof. Dr. Andy Corry Wardhani, M.Si.

Prof. Dr. Noverman Duadji, M.Si.

Dr. Maulana Mukhlis, S.Sos., M.IP.

6. Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik


Prof. Dr. Anna Gustina Zainal, S.Sos., M.Si.
NIP. 197608212000032001

7. Direktur Program Pasca Sarjana Universitas Lampung


Prof. Dr. Ir. Murhadi, M.Si.
NIP. 196403261989021001

Tanggal Lulus Ujian Disertasi: 1 Agustus 2025

Pernyataan Keaslian Tulisan dan Publikasi Isi Desertasi

Saya menyatakan dengan sebenarnya bahwa:

1. Disertasi yang berjudul **"Strategi Pengembangan Potensi Pariwisata Berbasis Komunitas di Desa Wisata Embung Tanjung Anom Kabupaten Lampung Tengah "** ini adalah karya penelitian saya sendiri dan bebas plagiat, serta tidak terdapat karya ilmiah yang pernah diajukan oleh orang lain untuk memperoleh gelar akademik serta tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain kecuali secara tertulis digunakan sebagai acuan dalam naskah ini dan disebutkan dalam sumber acuan serta daftar pustaka. Apabila dikemudian hari terbukti terdapat plagiat dalam karya ini, maka saya bersedia menerima sanksi sesuai ketentuan peraturan perundang undangan Permendiknas, No. 17 Tahun 2010.
2. Publikasi sebagian atau keseluruhan isi Desertasi pada jurnal atau forum ilmiah lain harus seizin serta menyertakan tim promotor atau author dan FISIP Unila sebagai institusinya. Apabila dalam waktu sekurang-kurangnya satu semester atau enam bulan sejak keseluruhan Desertasi ini, maka Program Doktor Studi Pembangunan, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Unila berhak mempublikasikan pada jurnal ilmiah yang dituju/dikelola oleh Program Doktor Studi Pembangunan FISIP Universitas Lampung. Apabila saya melakukan pelanggaran dan ketentuan publikasi ini, maka saya bersedia mendapat sanksi akademik yang berlaku

Bandar Lampung, 1 Agustus 2025
Yang membuat pernyataan,



Sudarman Mersa
NPM 2036011006

KATA PENGANTAR

Dengan mengucapkan syukur Alhamdulillah, atas Rahmat dan Ridho Hidayah dan Inayah dari Allah SWT sehingga penulis dapat menyelesaikan Disertasi ini sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Doktor dalam Program Doktor Studi Pembangunan pada Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Lampung. Disertasi ini berjudul **“STRATEGI PENGEMBANGAN POTENSI PARIWISATA BERBASIS KOMUNITAS DI DESA WISATA EMBUNG TANJUNG ANOM KABUPATEN LAMPUNG TENGAH”**

Penulis menyadari dengan sepenuh hati bahwa Disertasi ini tidak akan terselesaikan dengan baik tanpa adanya dukungan, bimbingan dan arahan dari berbagai pihak, untuk itu dalam kesempatan ini Saya ingin mengucapkan terima kasih yang tak terhingga kepada semua pihak antara lain :

1. Prof. Dr. Anna Gustina Zainal, S.Sos, M.Si. selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Lampung.
2. Prof. Dr. Abdul Hakim, M.Si. selaku penguji eksternal dari Universitas Brawijaya.
3. Dr. Bartoven Vivit Nurdin, S.Sos, M.Si. selaku ketua Program Doktor Studi Pembangunan Universitas Lampung.
4. Prof. Dr. Yulianto, MS. selaku Promotor dalam penulisan disertasi ini.

5. Prof. Dr. Bambang Utoyo, S, M.Si selaku Co Promotor dalam penulisan Disertasi ini.
6. Bapak Ketua Yayasan dan Ibu Pembina Yayasan Pendidikan dan Kebudayaan Dharma Wacana.
7. Rekan-rekan Dosen dan tenaga Kependidikan FISIP Universitas Dharma Wacana yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu.
8. Seluruh Dosen dan tenaga Kependidikan FISIP Universitas Lampung dan seluruh rekan seperjuangan Angkatan 2020

Disertasi ini diharapkan dapat memberikan kontribusi pada pengembangan ilmu pengetahuan dan praktik pembangunan, serta menjadi referensi bagi peneliti dan praktisi di bidang Studi pembangunan.

Penulis menyadari bahwa Disertasi ini masih banyak kekurangan disana sini. Untuk itu penulis bertekad untuk tetap belajar dan belajar lagi.

Penulis

Sudarman Mersa

RIWAYAT HIDUP

Penulis dilahirkan di Astra Ksetra, Kecamatan Menggala, Kabupaten Tulang Bawang pada tanggal 13 April 1974 merupakan anak ke dua dari Buah hati pasangan Hi. Merawi Saleh Alm dan Hj. Sabirah. Penulis saat ini bekerja sebagai Dosen PTS Pada Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (FISIP) Universitas Dharma Wacana

Penulis pernah menempuh Pendidikan formal antara lain

1. Sekolah Dasar Negeri 1 Gunung Batin Ilir tamat tahun 1986.
2. Sekolah Menengah Pertama (SMP) Angkasa Astra Ksetra tamat tahun 1989.
3. Sekolah Menengah Pekerjaan Sosial (SMPS) Negeri Poncowati tamat tahun 1993.
4. Sekolah Tinggi Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (STISIPOL) Dharma Wacana Metro lulus tahun 1997.
5. Magister Ilmu Pemerintahan (M.IP) Universitas Lampung lulus tahun 2010.
6. Pada tahun 2020 Penulis melanjutkan Studi Pada Program Doktor Studi Pembangunan FISIP Universitas Lampung.

MOTTO

**“ Harmoni Alam, Budaya dan Komunitas: Membangun Pariwisata
Berkelanjutan di Lampung Tengah”**

(Penulis)

PERSEMBAHAN

Dengan penuh Rasa Syukur atas Kehadirat Allah SWT, Disertasi ini Ku persembahkan Kepada

1. Kedua orang tua tercinta Abi H. Merawi Salah (Alm) dan Ummi Hj. Sabirah yang dengan penuh keringat dan perjuangan untuk mebesarkan dan mendidik anak-anaknya.
2. Istri tersayang Heri Haryatun, S.Sos yang senantiasa berdoa, dan mendampingi hidupku dengan segala rasa kasih sayangnya.
3. Kakak dan Adikku, Uhti Dastati Mersa, Widyawati Mersa, Ismuyadi Mersa.
4. Anak-anak ku tersayang Daffa Mu'aafii Herda, S.Psi, Najwa Kirania Salsabiil, Luthfy Rasyid Ridha, Muhammad Ammar Husain, Armand Saleh Rafasya Alfarezi.
5. Kampus tercinta Universitas Dharma Wacana Metro, dan
6. Almamater Universitas Lampung.

DAFTAR ISI

ABSTRAK	ii
KATA PENGANTAR.....	iv
RIWAYAT HIDUP	v
MOTTO	vii
PERSEMBAHAN	viii
DAFTAR ISI.....	ix
I. PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Rumusan Masalah Penelitian	30
1.3 Tujuan Penelitian	30
1.4 Manfaat Penelitian	31
II. KERANGKA TEORI.....	33
2.1 Penelitian Terdahulu	33
2.2 Kajian Teori	38
2.2.1 <i>Grand Theory</i> - Teori Perubahan Sosial.....	38
2.2.2 <i>Midlle Theory</i> – Teori Pemberdayaan.....	62
2.2.3 <i>Applied Theory</i> – <i>Teori Community Best Tourism (CBT)</i>	80
2.2.4 Teori Strategi Pengembangan Pariwisata.....	110
2.3 Tinjauan Normatif.....	127
2.4 Kerangka Pikir Penelitian	138
III.METODE PENELITIAN	143
3.1 Jenis dan Pendekatan Penelitian.....	143

3.2	Fokus Penelitian.....	148
3.3	Lokasi penelitian	149
3.4	Informan Penelitian.....	149
3.5	Jenis dan Sumber Data.....	151
3.6	Tahapan Penelitian.....	154
3.7	Teknik Pengumpulan Data.....	155
3.8	Teknik Analisis Data.....	158
3.9	Keabsahan Data.....	161
IV.	HASIL DAN PEMBAHASAN PENELITIAN.....	166
4.1	Gambaran Umum Lokasi Penelitian	166
4.2	Penerapan prinsip-prinsip CBT dalam pengembangan Embung Tanjung Anom	185
4.2.1	Mengikutsertakan Masyarakat Dalam Pengambilan Keputusan	185
4.2.2	Adanya Kepastian Masyarakat Lokal Menerima Manfaat Dari Kegiatan Pariwisata	201
4.2.3	Pendidikan Kepariwisataaan Bagi Masyarakat Lokal.....	214
4.3	Faktor-Faktor yang mempengaruhi pengembangan Embung Tanjung Anom	225
4.4	Analisis SWOT	231
4.5	Pembahasan Strategi Pengembangan Embung Tanjung Anom	236
4.5.1	Mengikutsertakan Masyarakat dalam pengambilan Keputusan	246
4.5.2	Adanya kepastian masyarakat lokal menerima manfaat.....	252
4.5.3	Pendidikan kepariwisataan bagi masyarakat lokal	256
4.6	Kebaruan Penelitian	262
V.	KESIMPULAN DAN SARAN	272
5.1	Kesimpulan	272
5.2	Saran.....	273

DAFTAR PUSTAKA

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1. Aspek Utama Pengembangan CBT.....	91
Gambar 2.Kerangka Muatan RIPPAPROV dan RIPPARKAB/Kota	119
Gambar 3. Bagan Kerangka Pikir	142
Gambar 4. Logika Induktif Dalam Penelitian Kualitatif.....	147
Gambar 5. Diagram Alir Tahapan Pelaksanaan Penelitian.....	154
Gambar 6. Langkah-langkah Analisis Data Penelitian	158
Gambar 7. Model Analisis Interaktif	161
Gambar 8. Aktor-aktor Pengelola Pariwisata.....	239
Gambar 9.Permasalahan Pengembangan Embung Tanjung Anom	242
Gambar 10.Model Pengembangan Embung Tanjung Anom Saat Ini.....	264
Gambar 11.Model Arah Pengembangan Pariwisata Embung Tanjung Anom	266
Gambar 12.Model Stategi Pengembangan Embung Tanjung Anom Dengan Kebaruan....	270

DAFTAR TABEL

Tabel 1. Penelitian Terdahulu	34
Tabel 2. indikator capaian CBT	91
Tabel 3. Informan Penelitian.....	150
Tabel 4. Jenis-jenis Data Sekunder	152
Tabel 5. Wilayah Administrasi Kabupaten Lampung Tengah.....	169
Tabel 6. Luas, Jumlah Penduduk, Dan Kepadatan Penduduk Per Kecamatan Di Kabupaten Lampung Tengah Tahun 2018.....	170
Tabel 7 Jumlah penduduk menurut agama.....	174
Tabel 8. Jumlah Penduduk Menurut Usia	175
Tabel 9.Jumlah Penduduk Menurut Tingkat Pendidikan.....	176
Tabel 10.Mata Pencaharian Masyarakat Kampung Tanjung Anom	177
Tabel 11.Sarana dan Prasarana	178
Tabel 12 Kunjungan Wisata Tanjung Anom Pertahun	210
Tabel 13 Jumlah Pendapatan Embung Tanjung Anom Pertahun.....	212
Tabel 13. Matriks SWOT Pengembangan Embung Tanjung Anom.....	234

I. PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pariwisata yang berkembang dengan baik adalah pariwisata yang mampu menarik kunjungan wisatawan, baik dari dalam maupun luar negeri. Kehadiran wisatawan ini bisa memberikan dampak positif, terutama dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat di sekitar destinasi. Masyarakat pun berkesempatan ikut terlibat, misalnya dengan membuka usaha kuliner, menyewakan jasa terkait wisata, atau menciptakan inovasi seperti oleh-oleh khas daerah yang bisa dibawa pulang wisatawan. Kegiatan ini tidak hanya membuka lapangan kerja baru, tapi juga membantu menambah penghasilan masyarakat, terutama bagi mereka yang sebelumnya memiliki keterbatasan ekonomi (Syarifah dan Rochani, 2022). Penelitian yang dilakukan oleh Wibowo (2019) di Desa Sukajaya Lempasing, Kabupaten Pesawaran yang berfokus pada pengembangan wisata pantai Mutun menjelaskan bahwa Pantai Mutun memiliki potensi besar untuk dikembangkan karena menawarkan karakteristik yang unik dibandingkan pantai lainnya. Salah satu keunggulannya adalah letaknya yang cukup dekat dari Kota Bandar Lampung hanya sekitar 30 menit perjalanan sehingga mudah diakses oleh wisatawan.

Kondisi perairan yang jernih serta ombak yang relatif tenang merupakan karakteristik alami Pantai Mutun yang memberikan nilai estetika tersendiri dan menjadi daya tarik implisit bagi wisatawan. Potensi ini semakin meningkat apabila didukung dengan pengelolaan sarana dan prasarana pariwisata yang memadai di sekitar kawasan pantai. Penguatan terhadap aspek-aspek pendukung tersebut berkontribusi dalam peningkatan daya tarik destinasi, sehingga dapat mendorong tingkat kunjungan ulang wisatawan. Keindahan alam pantai yang khas menjadikan pengalaman wisata yang berkesan dan sulit tergantikan, sehingga mampu menciptakan ketertarikan yang berkelanjutan.

Hasil temuan di lapangan menunjukkan bahwa masyarakat Desa Sukajaya menilai keberadaan objek wisata Pantai Mutun memberikan manfaat yang signifikan terhadap aspek fisik, sosial, budaya, dan ekonomi masyarakat setempat, dengan persentase manfaat sebesar 66%. Namun demikian, masyarakat yang melakukan aktivitas ekonomi di sekitar kawasan wisata, seperti pedagang makanan dan minuman, penyedia jasa sewa ban, serta pengemudi ojek perahu, dihadapkan pada beban biaya berupa potongan penghasilan yang dikenal sebagai retribusi atau yang disebut masyarakat sebagai "uang salar." Besaran potongan tersebut bersifat fluktuatif, menyesuaikan dengan jumlah pengunjung, sehingga menyebabkan ketidakpastian dalam pendapatan bulanan para pelaku usaha lokal.

Secara ekonomi, pengembangan wisata Pantai Mutun memberikan kontribusi terhadap penciptaan lapangan kerja bagi masyarakat sekitar, dengan jenis pekerjaan yang umum meliputi pedagang makanan dan minuman, penjual suvenir, serta pengemudi ojek perahu. Rata-rata pendapatan yang diperoleh dari aktivitas tersebut tercatat sebesar Rp815.000 per orang setiap bulannya (T. A. Wibowo *et al.*, 2019). Keberhasilan pengembangan pariwisata juga sangat bergantung pada peran *stakeholder* yang terlibat di dalamnya.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataan, pengembangan sektor pariwisata di Indonesia dapat dilaksanakan oleh pemerintah, pemerintah daerah, pelaku usaha pariwisata, serta masyarakat. Dalam konteks ini, pemerintah memiliki peran strategis tidak hanya sebagai regulator yang menetapkan norma, standar, prosedur, dan kriteria dalam pengembangan kepariwisataan, tetapi juga terlibat secara langsung dalam aspek manajerial pengelolaan sektor tersebut. Di samping itu, pemerintah juga berperan sebagai fasilitator dalam kegiatan promosi dan pemasaran pariwisata nasional, serta dalam pengembangan berbagai tingkatan destinasi, seperti Destinasi Pariwisata Nasional (DPN), Kawasan Strategis Pariwisata Nasional (KSPN), dan Kawasan Pengembangan Pariwisata Nasional (KPPN).

Pemerintah daerah pada tingkat provinsi memiliki fungsi dalam melaksanakan tugas pembantuan yang berkaitan dengan kegiatan promosi dan pemasaran kepariwisataan di wilayah provinsi. Sementara itu, pemerintah daerah kabupaten/kota memegang peran sentral dalam menjalin kerja sama dengan

berbagai pemangku kepentingan, termasuk pelaku industri dan masyarakat, untuk menyusun serta mengimplementasikan peraturan daerah kabupaten/kota yang selaras dengan ketentuan yang tercantum dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataan (Lailatul Fitria, 2023). Peran organisasi swasta atau pelaku industri dalam sektor pariwisata juga diatur dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009, khususnya pada Pasal 1 angka 7 dan 8. Dalam ketentuan tersebut dijelaskan bahwa yang dimaksud adalah perseorangan atau sekelompok orang (pengusaha) yang menjadi penyedia barang dan/atau jasa bagi pemerintah pusat, pemerintah daerah, serta masyarakat dalam upaya pengembangan dan pengelolaan kepariwisataan di Indonesia. Terdapat dua bentuk utama lembaga swasta yang berperan dalam pengembangan pariwisata, yaitu: (1) Badan Promosi Pariwisata Indonesia (BPPI) dan Badan Promosi Pariwisata Daerah (BPPD); serta (2) Gabungan Industri Pariwisata Indonesia, yang terdiri dari unsur-unsur pelaku usaha pariwisata, asosiasi usaha, asosiasi profesi, dan asosiasi lain yang memiliki keterkaitan langsung dengan sektor pariwisata.

Sebagaimana halnya dengan peran pemerintah, kehadiran sektor swasta memegang peranan penting dalam peningkatan kualitas destinasi pariwisata. Melalui dukungan energi, inovasi, dan pendanaan yang berasal dari luar pemerintah, pihak swasta mampu memberikan kontribusi signifikan terhadap pengembangan atraksi wisata maupun penyediaan fasilitas penunjang yang dibutuhkan untuk memenuhi kebutuhan wisatawan serta mendukung

penyelenggaraan kegiatan kepariwisataan. Undang-Undang Kepariwisata juga menegaskan bahwa kedua lembaga swasta tersebut ditetapkan sebagai mitra kerja resmi pemerintah dalam pembangunan pariwisata secara nasional maupun daerah (Suardana, 2016).

Berdasarkan penjelasan Pasal 5 huruf e Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisata, organisasi masyarakat diartikan sebagai kelompok masyarakat yang berdomisili di dalam kawasan destinasi pariwisata dan memiliki peran aktif dalam mengorganisasi kegiatan kepariwisataan. Kelompok masyarakat ini juga diprioritaskan untuk memperoleh manfaat langsung dari pelaksanaan kegiatan pariwisata di wilayahnya. Dalam konteks ini, keberadaan masyarakat lokal yang tinggal di sekitar destinasi wisata memiliki posisi strategis, baik sebagai pelaku usaha, tenaga kerja, maupun sebagai tuan rumah (host) yang berinteraksi langsung dengan wisatawan. Peran aktif masyarakat setempat menjadi elemen kunci dalam keberhasilan pengelolaan dan pengembangan destinasi pariwisata secara berkelanjutan (Rusyidi dan Fedryansah, 2018).

Pengembangan pariwisata menurut UU Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisata dapat dilakukan salah satunya oleh masyarakat. Menurut penelitian yang telah dilakukan di Jawa Barat pengembangan pariwisata berbasis masyarakat memberikan keuntungan dapat mengurangi kemiskinan di suatu daerah sebab dengan pengembangan tersebut membuka banyak peluang tambahan kerja bagi masyarakat tanpa harus meninggalkan kebiasaan atau

rutinitas yang ada yang menjadi dampak secara langsung bagi masyarakat (Asy'ari *et al.*, 2021). Penelitian lain yang dilakukan di Desa Siraman keuntungan yang didapatkan ketika pengembangan pariwisata dilakukan berbasis masyarakat adalah semangat masyarakat yang tinggi sehingga berdampak pada tingginya partisipasi masyarakat dalam semua kegiatan, masyarakat dapat saling menjaga, berbagi, dan akhirnya proses itu dapat dirasakan secara adil (Prasta, 2021).

Keterlibatan masyarakat lokal dalam pengembangan pariwisata dapat menimbulkan kesadaran dan tanggung jawab untuk ikut serta dalam mengembangkan daya tarik wisata di daerahnya (Putu mahyuni dan Agung tistha DY, 2021) (Lestari, 2016). Penelitian lain yang dilakukan di Pasar Buah Berastagi juga memberikan hasil bahwa keuntungan ketika pengembangan pariwisata melibatkan masyarakat lokal adalah kondisi sosial yang kondusif serta keterbukaan masyarakat dalam menerima kehadiran wisatawan dapat memberikan rasa aman dan nyaman bagi mereka sehingga meningkatkan kepuasannya dan keinginannya untuk kembali berkunjung ke Pasar Buah Berastagi (Ginting dan Veronica, 2016). Selanjutnya, penelitian di Desa Sekapuk pengembangan pariwisata yang berbasis masyarakat dapat memberikan keuntungan bagi masyarakat karena dana dikelola dengan baik oleh BumDes. Bumdes dapat memberikan beasiswa pendidikan bagi anak-anak yang berasal dari keluarga kurang mampu, anak yatim/piatu serta hafidz al-qur'an. Beasiswa diberikan dari jenjang pendidikan SD hingga dibangku kuliah.

Pendanaan program beasiswa di Desa Sekapuk bersumber dari gabungan Dana Pendapatan Asli Desa (PADes) dan kas Badan Usaha Milik Desa (BUMDes). Selain program beasiswa, upaya peningkatan kesejahteraan sosial juga tercermin melalui pemberian akses kepada 120 perwakilan masyarakat untuk menjual produk kuliner di area Pasar Kuliner Wisata Setigi. Masyarakat Desa Sekapuk memperoleh hak istimewa berupa akses masuk gratis ke kawasan wisata dengan menunjukkan Kartu Tanda Penduduk (KTP) sebagai bukti domisili. Khusus bagi pelajar yang berdomisili di desa tersebut, disediakan fasilitas koneksi internet (WiFi) secara gratis untuk mendukung kegiatan belajar mandiri dari rumah. Di samping itu, BUMDes Sekapuk juga melaksanakan program pemberdayaan ekonomi lainnya berupa pemberian pinjaman usaha dengan bunga rendah (9% per tahun) kepada para janda yang merupakan warga desa, sebagai bagian dari skema pinjaman lunak yang bertujuan meningkatkan kemandirian ekonomi dan kesejahteraan kelompok rentan (Asmoro *et al.*, 2021).

Pengembangan pariwisata yang dilakukan oleh masyarakat (komunitas) juga menimbulkan kerugian. Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh Resnawaty (2016) menyatakan bahwa salah satu kerugian atau kelemahan pengembangan pariwisata yang dilakukan oleh masyarakat adalah mudahnya minuman keras dan prostitusi terselubung. Masyarakat cenderung tidak memiliki ketegasan dalam memberikan batasan-batasan kepada wisatawan karena jika dilakukan pembatasan aturan/larangan peredaran minuman keras

dan prostitusi maka berdampak pada turunnya jumlah pengunjung. Menurunnya jumlah pengunjung juga akan berdampak pada menurunnya jumlah pendapatan masyarakat sekitar (Resnawaty, 2016). Kelemahan lain yang terjadi adalah munculnya konflik kepentingan diantara lapisan masyarakat (Huda *et al.*, 2023) (Doni dan Prasetyo, 2021). Kurangnya keselarasan dan koordinasi antara pemerintah dan masyarakat menjadi salah satu faktor yang menyebabkan rendahnya tingkat partisipasi masyarakat dalam proses pembangunan. Dalam praktiknya, pelaksanaan pembangunan cenderung didominasi oleh kelompok-kelompok tertentu, terutama individu yang tergabung dalam organisasi kemasyarakatan atau mereka yang memiliki posisi sebagai tokoh masyarakat. Kondisi ini menciptakan keterbatasan ruang partisipasi bagi masyarakat secara luas, sehingga potensi kontribusi publik dalam pembangunan belum dapat dimaksimalkan secara merata (Azizah dan Ilyas, 2023). Pada akhirnya pengembangan pariwisata membutuhkan komitmen yang besar dari seluruh pihak yang terlibat untuk mewujudkan keberhasilan implementasinya.

Pengembangan pariwisata yang telah dilakukan di beberapa daerah tidak terkecuali di Kabupaten Lampung Tengah. Kabupaten Lampung Tengah merupakan wilayah terluas kedua di Provinsi Lampung setelah Kabupaten Lampung Timur, dengan total luas wilayah mencapai 4.645,47 km². Wilayah ini mencakup beragam bentuk topografi, mulai dari dataran rendah, kawasan perbukitan, hingga wilayah pegunungan yang tersebar di sejumlah kecamatan dengan ketinggian rata-rata mencapai 1.600 meter di atas permukaan laut.

Keberadaan kondisi alam berupa pegunungan dan perbukitan menawarkan panorama yang indah, sehingga memiliki potensi besar untuk dikembangkan sebagai destinasi wisata berbasis alam oleh masyarakat setempat. Selain potensi wisata alam, Kabupaten Lampung Tengah juga memiliki kekayaan destinasi wisata lainnya, seperti wisata religi, budaya, sejarah, serta wisata buatan. Seluruh potensi tersebut memberikan peluang strategis untuk dikembangkan sebagai basis peningkatan perekonomian daerah sekaligus mendukung upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat secara berkelanjutan (Yulianto, 2020). Kabupaten Lampung Tengah memiliki beragam objek daya tarik wisata yang tersebar di wilayah bagian barat, tengah, hingga timur. Keragaman jenis wisata yang dimiliki meliputi wisata alam, budaya, serta potensi agrowisata. Dalam kategori wisata alam, salah satu destinasi unggulan adalah Air Terjun Curup Tujuh yang terletak di Kecamatan Selagai Lingga. Selain itu, terdapat pula potensi wisata lainnya seperti air terjun tambahan, danau, sungai, bendungan, embung, serta kawasan perkebunan nanas dan tebu. Pemanfaatan lahan pekarangan oleh masyarakat juga menunjukkan potensi yang signifikan untuk diarahkan dalam pengembangan agrowisata berbasis masyarakat. Di samping kekayaan alam, Kabupaten Lampung Tengah juga memiliki warisan budaya yang masih terjaga dan berpotensi dikembangkan sebagai destinasi wisata budaya. Beberapa di antaranya adalah Kampung Wisata Bali, Cagar Budaya Kampung Tua, benda-benda peninggalan sejarah seperti Minak Ngediko Pulun bin Minak Nato, Batu Tumpang, serta berbagai elemen budaya lokal lainnya yang merepresentasikan kekayaan sejarah dan identitas daerah. Potensi tersebut

menjadikan Kabupaten Lampung Tengah sebagai salah satu wilayah strategis dalam pengembangan pariwisata daerah yang berkelanjutan dan inklusif (*Peraturan Daerah No. 13 Tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Daerah Tahun 2021-2025*, n.d.). Terbentuknya Perda No 13 tentang rencana induk pengembangan kepariwisataan daerah tahun 2021-2025 tidak serta merta membuat pariwisata Kabupaten Lampung Tengah berkembang pesat. Pembangunan pemerintah Kabupaten Lampung Tengah masih difokuskan pada pembangunan infrastruktur (Karami dan Iswan, 2023). Pengembangan pariwisata tanpa pembangunan infrastruktur jalan dan akses yang mudah tidak akan mampu memberikan dampak yang signifikan bagi masyarakat sekitar lokasi wisata (Chaerunissa dan Yuniningsih, 2020). Sehingga sangat menyeimbangkan antara pembangunan infrastruktur dan pengembangan pariwisata sangat penting untuk dilakukan oleh pemerintah.

Pengembangan pariwisata di Kabupaten Lampung Tengah diarahkan pada pengembangan Pariwisata lokal (*local tourism*) yaitu jenis kepariwisataan yang ruang lingkupnya lebih sempit dan terbatas dalam tempat-tempat tertentu saja (Tangalele *et al.*, 2019). Salah satu pariwisata lokal yang dikembangkan di Kabupaten Lampung Tengah adalah Embung Kampung Tanjung Anom yang terletak di Kampung Tanjung Anom. Kampung Tanjung Anom memiliki luas wilayah sekitar 1.249 hektare, dengan potensi alam yang didominasi oleh lahan-lahan perkebunan, khususnya untuk komoditas tebu dan singkong. Dari sisi sumber daya manusia, kampung ini dihuni oleh sekitar 6.000 jiwa yang

terbagi dalam 1.459 kepala keluarga. Komposisi mata pencaharian penduduk menunjukkan bahwa sekitar 80% bekerja sebagai karyawan di perusahaan-perusahaan yang beroperasi di sekitar wilayah kampung. Sementara itu, sekitar 17% penduduk berprofesi sebagai petani perkebunan tebu dan singkong, dan sisanya, sekitar 3%, bekerja sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS). Struktur ini menunjukkan dominasi sektor non-pertanian dalam struktur ekonomi masyarakat, meskipun potensi perkebunan tetap menjadi salah satu penopang ekonomi lokal (Wirawan dan Raharjo, 2018). Potensi alam dan sumber daya manusia yang dimiliki Kampung Tanjung Anom memperoleh dukungan signifikan dari keberadaan dua perusahaan besar yang mengapit wilayah kampung, yaitu PT Great Giant Pineapple dan PT Gunung Madu Plantations. PT Great Giant Pineapple merupakan perusahaan swasta yang bergerak di bidang produksi buah-buahan untuk keperluan ekspor maupun pemenuhan kebutuhan pasar domestik. Sementara itu, PT Gunung Madu Plantations merupakan perusahaan industri gula yang menjalin kemitraan dengan masyarakat Kampung Tanjung Anom, khususnya dalam pengelolaan lahan perkebunan. Keberadaan kedua perusahaan ini memberikan keuntungan strategis bagi pengembangan potensi kampung, baik dalam hal penyediaan lapangan kerja bagi masyarakat lokal di sektor produksi, maupun dalam penyerapan hasil perkebunan masyarakat seperti tebu dan buah-buahan sebagai bahan baku industri. Selain itu, kontribusi kedua perusahaan tersebut juga tercermin dalam partisipasi mereka terhadap pembangunan dan pengembangan

kawasan wisata Embung Tanjung Anom, yang menjadi salah satu aset strategis kampung dalam upaya diversifikasi ekonomi berbasis pariwisata.

Pembangunan Embung Tanjung Anom telah dilakukan sejak tahun 2013 dengan menggunakan dana yang bersumber dari swadaya masyarakat sekitar. Pembangunan pertama Embung Tanjung Anom sepanjang 4KM, pembangunan terus dilakukan hingga saat ini Embung Tanjung Anom memiliki panjang sekitar 8 KM. Embung ini dibangun dengan tujuan untuk menampung jumlah air dari sungai ataupun air hujan agar masyarakat kampung tanjung anom tidak mengalami kekeringan saat musim kemarau. Sebagai landasan historis, sejak tahun 1970an Kampung Tanjung Anom selalu mengalami kekeringan ketika musim kemarau tiba, sehingga masyarakat mengandalkan bantuan air dari perusahaan-perusahaan sekitar Kampung Tanjung Anom. Hal tersebut mendasari kepala kampung saat itu, Bapak WTH untuk memprakarsai pembuatan Embung Tanjung Anom. Namun ide besar tersebut diiringi dengan rasa tidak percaya dan pesimistis dari beberapa lapisan masyarakat karena kampung Tanjung Anom sejak dahulu kala sudah mengalami krisis air dan kekeringan saat memasuki musim kemarau dan belum mendapatkan Solusi atas permasalahan kekeringan tersebut.

Seiring berjalannya waktu, melihat dampak yang ditimbulkan dari pembangunan Embung Tanjung Anom sudah mulai dirasakan oleh masyarakat sekitar embung dengan tidak lagi merasakan kekeringan ketika musim kemarau

membuat rasa kepercayaan publik muncul dan membuat semakin banyak masyarakat yang terlibat dalam pembangunan Embung Tanjung Anom. Pada tahun 2015 kepala kampung menggunakan dana desa sebesar Rp 250.000.000,- untuk pembangunan lanjutan Embung Tanjung Anom. Inovasi masih terus dilakukan kawasan embung yang sebelumnya berupa semak belukar diubah dan dikembangkan menjadi kawasan yang nyaman dan menarik dan munculah ide gagasan untuk dijadikan sebagai tempat wisata bagi warga Kampung Tanjung Anom dengan cara mendirikan fasilitas-fasilitas umum dan dilengkapi dengan berbagai wahana.

Semangat masyarakat dalam membangun embung ditunjukkan dengan partisipasi aktif mereka dalam penggalan embung baik secara konvensional maupun dengan menggunakan mesin. Pembangunan gazebo, jembatan, menara pandang, kebun agrowisata dan hampir seluruh fasilitas di Embung Tanjung Anom juga melibatkan masyarakat. Maka pada tahun 2018 dibentuklah kelompok sadar wisata (Pokdarwis) yang diprakarsai oleh Dinas Pemuda, olahraga dan pariwisata Kabupaten Lampung Tengah. Sebagai upaya pengembangan dan pelibatan aktif masyarakat Tanjung Anom, pengelolaan Embung Tanjung Anom telah diserahkan kepada Badan Usaha Milik Kampung (BUMK) dibawah kepemimpinan ASW, tokoh pemuda kampung Tanjung Anom. BUMK Tanjung Anom telah dibentuk setahun sebelumnya, yakni pada Januari 2017 berdasarkan hasil musyawarah mufakat antara pemerintah kampung bersama dengan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dan

perwakilan tokoh masyarakat desa. Pada tahun 2020, Pemerintah Kabupaten Lampung Tengah melalui Dinas Pariwisata memberikan dukungan terhadap pengembangan Kampung Tanjung Anom dengan membangun fasilitas publik yang lebih representatif sebagai bagian dari upaya mewujudkan program Kampung Agrowisata. Pada tahun yang sama, Kampung Tanjung Anom, yang terletak di Kecamatan Terusan Nunyai, secara resmi ditetapkan sebagai Kawasan Pengembangan Pariwisata Unggulan Terpadu (KKPUT) oleh pemerintah daerah. Penetapan ini menunjukkan komitmen pemerintah dalam mengembangkan potensi lokal berbasis agrowisata yang berkelanjutan, serta mendorong pertumbuhan ekonomi masyarakat melalui sektor pariwisata. Puncaknya, pada tahun 2022 pemerintah kampung tanjung anom menerima penghargaan berupa desa wisata binaan Kemenparekraf RI dan menerima dana bantuan pengembangan embung sebesar 2 Milyar rupiah.

Potensi pariwisata Embung Tanjung Anom sangat beragam, antara lain:

1. Atraksi Wisata: Terdapat jembatan gantung, menara pandang, sepeda air, dan pertunjukan kesenian tradisional seperti kuda lumping.
2. Fasilitas Pendukung: Disediakan area parkir, balai pertemuan, kafetaria, jalur jungle tracking, kamar mandi umum, kios souvenir, kuliner lokal, musholla, area *outbound*, dan spot foto.
3. Paket Wisata Edukasi: Tersedia paket wisata edukasi tanaman dan kerajinan tangan seperti rajut talikur.

4. Pengelolaan oleh BUMK: Embung ini dikelola oleh Badan Usaha Milik Kampung (BUMK) Tanjung Anom, yang bertujuan untuk meningkatkan pendapatan asli desa dan kesejahteraan masyarakat.

Sementara itu, potensi sumber daya alam yang terdapat di Embung Tanjung Anom berupa keanekaragaman flora seperti Pohon-pohon lokal yang terdiri dari seperti akasia, trembesi, atau jati yang tumbuh secara alami serta tanaman air seperti eceng gondok, teratai, dan ganggang air. Keanekaragaman fauna seperti Burung-burung lokal seperti kuntul, belibis, dan pipit sawah. Ikan air tawar mungkin secara alami berkembang, seperti mujair atau nila liar. Serangga dan amfibi seperti capung, katak, dan kupu-kupu yang mendukung ekosistem alami.

Potensi sumber daya buatan dibuat guna mendukung potensi yang sudah ada. pemerintah Kampung Tanjung Anom membangun Tanaman hias dan peneduh yang sengaja ditanam seperti bougenville, pohon ketapang kencana. Tanaman pertanian di sekitar embung seperti padi, jagung, atau sayuran jika embung digunakan untuk irigasi. Fauna Buatan juga dikembangkan di Embung Tanjung Anom yakni Ikan yang ditebar untuk budidaya seperti nila, lele, atau gurami. Hewan ternak milik warga sekitar yang memanfaatkan air embung. Burung peliharaan atau unggas yang mungkin sengaja dilepas atau dibudidayakan dekat embung.

Keterlibatan masyarakat dalam pengembangan Embung Tanjung Anom sudah menggunakan konsep *Community best tourism* (CBT). Konsep yang berfokus untuk mengajak masyarakat berpartisipasi, menyetarakan ide, dan memberdayakan masyarakat (Anggriani *et al.*, 2023). Dalam proses pengembangan desa wisata, partisipasi aktif masyarakat lokal merupakan elemen kunci yang menentukan keberhasilan dan keberlanjutan program tersebut. Konsep *Community-Based Tourism* (CBT) muncul sebagai pendekatan yang merepresentasikan model pengembangan pariwisata yang berorientasi pada pemberdayaan komunitas lokal. Pendekatan ini menekankan pentingnya keterlibatan langsung masyarakat dalam penyediaan layanan pariwisata, serta berfokus pada upaya interpretasi dan penyampaian nilai-nilai budaya dan kearifan lokal, sekaligus menjaga kelestarian lingkungan di sekitar destinasi wisata (Normayasai, 2024) (Salihin, 2023). Konsep CBT pada dasarnya tidak dapat dilepaskan dari aspek ekonomi, sosial, budaya, lingkungan dan politik (Tirtoni, 2022) (Nurwanto, 2020) (Herbasuki, 2019).

Pentingnya CBT yang melibatkan berbagai aspek dalam kehidupan masyarakat, pengembangan CBT di Embung Tanjung Anom di prakarsai oleh Kepala Kampung Tanjung Anom Bapak WTH. Penelitian terdahulu mengungkapkan bahwa pengembangan CBT harus di prakarsai oleh sosok tertentu (Permatasari *et al.*, 2021). Semangat tinggi dari bapak kepala kampung kemudian memotivasi warga kampung untuk bergabung dalam pengembangan Embung Tanjung Anom. Pada akhirnya pengelolaan Embung Tanjung Anom diserahkan

ke BUMK. Campur tangan dan pelibatan masyarakat dalam pengembangan Embung Tanjung Anom sangat besar, karena masyarakat melalui Pokdarwis selalu dilibatkan dalam tahapan perencanaan hingga pengambilan keputusan pengembangan Embung Tanjung Anom. Misalnya pada saat pembuatan kebun agro wisata, pokdarwis dan BUMK serta pemerintah desa terlebih dahulu membuat perencanaan yang matang secara bersama-sama. Pokdarwis dan BUMK Kampung Tanjung Anom didominasi oleh keterlibatan pemuda. Sehingga fokus CBT di Kampung Tanjung Anom adalah pemuda kampung. Menurut penelitian terdahulu peran pemuda dalam pengembangan pariwisata sangat besar, dapat ditunjukkan dengan keterlibatan langsung dalam atraksi pariwisata dan melakukan upaya publikasi dan promosi pariwisata di media sosial. mengingat kaum muda cenderung adaptif dengan perkembangan teknologi informasi (Ramadhani, 2022). Peran pemuda di dalam pengembangan Embung Tanjung Anom itu sendiri adalah melakukan atraksi seperti terlibat langsung dalam pembangunan fasilitas sarana prasana yang ada di embung dan melakukan pengelolaan embung serta mempromosikan Embung Tanjung Anom di media sosial instagram dan facebook.

Pengembangan Embung Tanjung Anom yang telah menerapkan konsep CBT dengan melibatkan partisipasi masyarakat. Tingginya partisipasi masyarakat berdampak pada pengelolaan Embung Tanjung Anom yang semakin membaik. Embung Tanjung Anom resmi dibuka untuk umum pada bulan Februari 2018. Sejak awal operasionalnya, objek wisata ini menunjukkan respons positif dari

masyarakat, yang tercermin dari tingginya jumlah kunjungan. Pada bulan pertama pembukaan, embung tersebut berhasil memperoleh pendapatan sebesar tiga juta rupiah. Sumber pendapatan tersebut berasal dari aktivitas penyewaan sepeda air dan kontribusi parkir, mengingat belum diberlakukannya tiket masuk bagi pengunjung. Dalam beberapa kesempatan, Bupati Lampung Tengah juga turut melakukan kunjungan langsung ke lokasi, sebagai bentuk dukungan terhadap pengembangan destinasi wisata berbasis komunitas di wilayah tersebut (Wirawan dan Raharjo, 2018). Masyarakat menerima dampak baik dari berkembangnya wisata Embung Tanjung Anom dengan mendapatkan penghasilan tambahan dari aktivitas perdagangan yang dilakukan di embung. Namun, manfaat ini tidak lama dinikmati oleh masyarakat karena ditahun 2019 terjadi pandemic covid-19. Puncaknya pada tahun 2020 pemerintah menerapkan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) yang mana masyarakat dilarang untuk banyak melakukan aktivitas diluar rumah termasuk mengunjungi temat wisata (Thorik, 2020).

Permasalahan pengembangan Embung Tanjung Anom mulai muncul saat terjadi pandemic covid-19. Jumlah kunjungan menurun drastis dan sulit untuk dipulihkan kembali. Berbagai upaya telah dilakukan oleh pemerintah desa dan masyarakat dengan melakukan banyak atraksi berupa kegiatan mancing bersama dengan memanfaatkan daya tarik embung yang didalamnya yang telah di isi berbagai jenis ikan. Menurunnya jumlah kunjungan wisatawan berdampak pada rendahnya partisipasi dan semangat Masyarakat untuk mengembangkan

kembali Embung Tanjung Anom. Masyarakat Kampung tanjung anom kurang mendapatkan edukasi dan sosialisasi tentang pengelolaan pariwisata dengan konsep pemberdayaan Masyarakat. Sehingga penerapan konsep CBT yang menempatkan partisipasi Masyarakat menjadi tolok ukur utama keberhasilan pemberdayaan Masyarakat di Embung Tanjung Anom belum maksimal dalam implementasinya. Masyarakat Kampung Tanjung Anom juga masih memiliki ketergantungan dengan mata pencaharian utamanya seperti pertanian dan buruh pada pabrik lokal. Kecenderungan masyarakat yang masih bergantung pada mata pencaharian utamanya karena manfaat ekonomis pengelolaan Embung Tanjung Anom belum dirasakan secara maksimal oleh Masyarakat. Wisata Embung Tanjung Anom hanya ramai disaat-saat tertentu, misalnya disaat ada kegiatan lomba memancing, PKK dan lain sebagainya. Di sisi lain, keberhasilan suatu destinasi wisata berbasis *Community-Based Tourism* (CBT) sangat bergantung pada aspek keberlanjutan dan rasa kepemilikan yang kuat dari masyarakat setempat. Keberlanjutan destinasi menjadi prasyarat penting agar kegiatan pariwisata tidak hanya bersifat sementara, tetapi mampu memberikan manfaat jangka panjang. Dalam praktiknya, model CBT umumnya diwujudkan melalui pengembangan usaha-usaha kecil di wilayah pedesaan yang dikelola langsung oleh masyarakat lokal. Dalam proses tersebut, masyarakat memperoleh dukungan dari pelaku industri pariwisata, baik dalam bentuk pendampingan manajerial, promosi usaha, maupun penguatan kapasitas. Kolaborasi ini tidak hanya membantu menjaga kesinambungan usaha, tetapi juga memperkuat kohesi sosial dan keberlangsungan komunitas secara

keseluruhan (Prasetyo *et al.*, 2024). Di Kampung Tanjung Anom pengembangan pariwisatanya belum sampai pada tahapan Pembangunan UMKM karena sejauh ini pembangunan masih berfokus pada Pembangunan fisik atau infrastruktur.

Pelibatan masyarakat lokal merupakan aspek krusial dalam pengembangan pariwisata berbasis komunitas. Masyarakat memiliki posisi strategis yang memungkinkan mereka berperan sebagai pelaku usaha, pengelola, maupun penyedia jasa pariwisata. Partisipasi aktif dari masyarakat setempat tidak hanya mendukung operasional destinasi, tetapi juga menciptakan suasana yang ramah dan kondusif bagi wisatawan, sehingga memberikan pengalaman berkunjung yang berkesan. Tingkat partisipasi masyarakat sangat dipengaruhi oleh tingkat kesadaran mereka terhadap pentingnya sektor pariwisata dalam menunjang aspek sosial, budaya, dan ekonomi kehidupan mereka. Oleh karena itu, pembangunan pariwisata yang berkelanjutan menuntut adanya upaya peningkatan kapasitas dan pemahaman masyarakat terhadap manfaat langsung maupun tidak langsung dari kegiatan pariwisata (Mahanani dan Hananik, 2021). Upaya dalam menumbuhkan kesadaran masyarakat harus diimbangi dengan upaya pemerintah desa dalam melakukan pemerataan ekonomi melalui distribusi kegiatan-kegiatan pariwisata pada seluruh lapisan masyarakat. Selama ini pemanfaatan secara ekonomis dari pengelolaan pariwisata Embung Tanjung Anom hanya terbatas pada beberapa lapisan masyarakat dan kelompok-kelompok kecil yang terlibat dalam BUMK. Secara keseluruhan

manfaat ekonomi belum dirasakan oleh masyarakat kampung tanjung anom sehingga hubungan antar masyarakat timbul rasa saling ketidakpercayaan dan iri hati dan hal tersebut berdampak pada rendahnya partisipasi masyarakat kampung tanjung anom.

Selain masyarakat pelibatan pemerintah juga menjadi hal yang sangat penting untuk menunjang pelaksanaan pengembangan pariwisata Embung Tanjung Anom. Pemerintah daerah memegang peran strategis dalam mendukung pengembangan pariwisata berbasis masyarakat, khususnya melalui penyediaan infrastruktur pendukung. Infrastruktur tersebut mencakup aksesibilitas jalan, sarana transportasi, serta fasilitas umum lainnya yang diperlukan guna menunjang kelancaran aktivitas wisata. Ketersediaan infrastruktur yang memadai menjadi prasyarat penting dalam menciptakan destinasi yang layak kunjung dan nyaman, serta memperkuat daya saing pariwisata lokal. Dengan demikian, keterlibatan aktif pemerintah daerah dalam aspek pembangunan fisik turut memperkuat fondasi pengembangan pariwisata yang partisipatif dan berkelanjutan (Ransta L. Lekatompessy; Edoardus E. Maturbongs; Hubertus Oja, 2023). Pengelolaan Embung Tanjung Anom sendiri dalam hal infrastruktur jalan belum memadai, hal ini ditunjukkan dengan akses jalan menuju Embung Tanjung Anom yang masih berupa jalan tanah dan bebatuan *onderlagh* dan berlubang sehingga pada saat musim hujan lubang di jalanan tergenang air dan menyulitkan pengendara. Secara khusus dalam hal Pembangunan infrastruktur Pemerintah Kabupaten Lampung Tengah belum menunjukkan keseriusan dalam

keterlibatannya untuk menunjang promosi Embung Tanjung Anom. Akses menuju Lokasi wisata yang masih sulit membuat wisatawan enggan mendatangi Lokasi wisata. Sementara itu, menurut penelitian yang telah dilakukan oleh Fatmasari (2023) Ketersediaan infrastruktur yang memadai merupakan salah satu faktor kunci dalam membentuk kualitas pengalaman wisatawan saat mengunjungi suatu destinasi. Infrastruktur yang baik tidak hanya meningkatkan kenyamanan dan aksesibilitas, tetapi juga berperan langsung dalam menciptakan kesan positif terhadap kawasan wisata. Oleh karena itu, pengembangan infrastruktur dan sistem pendukungnya memiliki peran yang sangat vital dalam mendorong pertumbuhan sektor pariwisata. Infrastruktur yang terencana dan terintegrasi dengan baik dapat meningkatkan daya tarik destinasi, memperluas jangkauan wisatawan, serta memperkuat konektivitas antarwilayah, yang pada akhirnya berkontribusi terhadap peningkatan perekonomian daerah melalui aktivitas pariwisata (Fatmasari *et al.*, 2023).

Lambatnya pengembangan Embung Tanjung Anom juga disebabkan oleh masih terbatasnya promosi yang dilakukan oleh kepala kampung dan BUMK selaku pengelola embung. Promosi hanya dilakukan dari mulut ke mulut dan terbatas di media sosial facebook, Instagram dan youtube. Pengelola tidak bekerjasama dengan *influencer* ataupun penggiat pariwisata di kalangan masyarakat khususnya pemuda di Lampung. Penelitian terdahulu mengungkapkan bahwa pada masa ini, wisatawan sudah memanfaatkan teknologi online. Dengan demikian, pengembangan pariwisata tidak lagi dapat

sepenuhnya bergantung pada metode konvensional, melainkan memerlukan transformasi menuju pendekatan digital. Perubahan ini menjadi suatu keniscayaan dalam menjawab dinamika perilaku wisatawan dan perkembangan teknologi informasi. Pemanfaatan berbagai platform digital seperti situs web, blog, serta media sosial antara lain Facebook, Instagram, Twitter, dan aplikasi serupa menjadi sarana efektif untuk menyebarluaskan informasi destinasi wisata. Akun-akun digital tersebut dapat diakses secara mudah melalui berbagai perangkat seperti komputer, smartphone, maupun tablet, yang kini telah menjadi bagian integral dari kehidupan masyarakat modern. Digitalisasi informasi pariwisata diharapkan dapat meningkatkan jangkauan promosi, mempercepat arus informasi, serta membangun citra positif destinasi di mata publik (Putu Henny Puspawati dan Ristanto, 2018). Dalam konteks kegiatan pariwisata, terdapat dua jenis motivasi utama yang memengaruhi keputusan seseorang untuk melakukan perjalanan, yaitu faktor pendorong (*push factors*) dan faktor penarik (*pull factors*). Konsep ini dijelaskan oleh Richardson dan Fluker, yang mengemukakan bahwa faktor pendorong berasal dari dorongan internal individu, seperti keinginan untuk beristirahat, mencari pengalaman baru, atau melepaskan diri dari rutinitas. Sementara itu, faktor penarik berkaitan dengan karakteristik eksternal dari destinasi wisata yang mampu menarik minat wisatawan, seperti keindahan alam, budaya lokal, atau fasilitas yang tersedia. Kedua faktor ini saling berinteraksi dan memainkan peran penting dalam membentuk preferensi dan keputusan wisatawan untuk memilih suatu destinasi (Pitana dan Gayatri, 2005) (Gum dan Putu, 2021). Kemajuan teknologi

informasi, khususnya dalam hal akses internet yang semakin mudah, telah mendorong penyebaran informasi secara cepat dan luas kepada jutaan pengguna. Aksesibilitas ini didukung oleh kemampuan internet dalam menyampaikan informasi yang beragam dan bersifat personal kepada masing-masing pengguna. Potensi ini semakin optimal ketika dipadukan dengan pemanfaatan media sosial yang bersifat interaktif, karena melalui interaksi yang terjadi di media sosial, efektivitas promosi dapat meningkat secara signifikan, terutama dalam membangun keterlibatan audiens dan memperluas jangkauan pesan secara dinamis.

Di samping itu, aspek sumber daya manusia menjadi tantangan paling fundamental dalam operasional unit usaha pariwisata yang dikelola oleh Badan Usaha Milik Kampung (BUMK). Permasalahan ini berkaitan dengan masih rendahnya tingkat pendidikan, kurangnya keterampilan teknis, lemahnya kapasitas manajerial, serta belum optimalnya komitmen dalam mendorong kemajuan lembaga ekonomi desa. Selain itu, keterbatasan infrastruktur pendukung pariwisata juga turut menjadi hambatan signifikan dalam proses pengembangan usaha pariwisata di wilayah tersebut (Saifuddin, 2019). Pendekatan dalam pengembangan potensi pariwisata sering kali hanya berfokus pada satu aspek, yaitu keberadaan daya tarik wisata semata. Padahal, kenyataannya, wisatawan yang melakukan perjalanan ke suatu destinasi memiliki berbagai kebutuhan dan ekspektasi terhadap layanan yang bersifat komprehensif dan saling berkaitan, mulai dari proses keberangkatan, aktivitas

selama di lokasi wisata, hingga kepulangan ke tempat asal. Kebutuhan tersebut mencakup akses informasi mengenai destinasi, sarana transportasi ke dan dari lokasi wisata, konsumsi makanan dan minuman, serta akomodasi selama berada di destinasi. Oleh karena itu, dalam merancang pengembangan daya tarik wisata, perlu diperhatikan keterpaduan empat komponen utama destinasi wisata, yaitu: daya tarik wisata (*attraction*), fasilitas penunjang (*amenities*), kemudahan akses (*accessibilities*), dan dukungan kelembagaan (*ancillary services*). Pendekatan holistik ini akan menjamin terciptanya pengalaman wisata yang berkualitas dan berkelanjutan (Putu *et al.*, 2022). Kelemahan daya tarik Embung Tanjung Anom adalah aksesnya yang jauh dari kota dan tidak ada transportasi umum yang dapat mengakses lokasi wisata embung. *Home stay* bagi wisatawan yang ingin menginap juga tidak serta merta siap setiap saat. Akses informasi tentang Embung Tanjung Anom juga masih sangat terbatas. Media sosial Embung Tanjung Anom belum menginformasikan secara lengkap bagaimana akses ke lokasi embung, cara *booking homesyay*, informasi terkait fasilitas dan sarana prasarana serta kebutuhan makan dan minum yang masih sulit di dapatkan. Kegiatan jual beli hanya aktif ketika ada kegiatan-kegiatan tertentu di Embung Tanjung Anom. Sehingga diperlukan pengelolaan kelembagaan yang professional untuk pengembangan Embung Tanjung Anom dengan melibatkan masyarakat berbasis CBT.

Kunjungan wisatawan ke Embung Tanjung Anom semakin menurun sejak terjadinya pandemi covid-19 yang berlangsung pada tahun 2019 hingga tahun

2021 yang kemudian diberlakukannya PSBB (Pembatasan Sosial Berskala Besar) dimana masyarakat diminta untuk mengurangi seluruh kegiatan di luar rumah selama pemberlakuan PSBB tersebut. Secara langsung hal tersebut berdampak pada menurunnya jumlah wisatawan di Embung Tanjung Anom, meskipun pada tahun-tahun sebelumnya tingkat kunjungan di Embung Tanjung Anom sedang tinggi-tingginya. Selain itu, dampak yang dirasakan bagi obyek wisata pasca terjadinya covid-19 Salah satu dampak utama yang dirasakan dalam sektor pariwisata adalah penurunan pendapatan yang signifikan akibat menurunnya jumlah kunjungan wisatawan. Wisatawan yang tetap datang pun harus mematuhi protokol kesehatan yang ketat sebagai upaya pencegahan penyebaran COVID-19. Penurunan jumlah wisatawan ini secara langsung berimplikasi terhadap penurunan kontribusi sektor pariwisata terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD), mengingat besaran kontribusi sangat bergantung pada tingkat kunjungan dan aktivitas ekonomi yang terjadi di destinasi wisata tersebut (Mahendra, 2021). Secara umum, pandemi COVID-19 telah memberikan dampak signifikan terhadap hampir seluruh sektor industri di Indonesia, dengan pengecualian pada sektor-sektor seperti kesehatan, farmasi, layanan sosial, informasi dan komunikasi, penyediaan air bersih, serta pengelolaan sampah dan limbah daur ulang yang justru mengalami peningkatan aktivitas. Sektor yang mengalami dampak paling besar mencakup transportasi, perjalanan (travel), perdagangan, serta penyediaan akomodasi dan makanan. Sektor pariwisata termasuk dalam kelompok industri yang sangat terdampak. Berdasarkan data Survei Angkatan Kerja Nasional (Sakernas) tahun 2019,

sekitar 11,83% tenaga kerja Indonesia bekerja di sektor industri pariwisata. Adapun kontribusi sektor pariwisata terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) nasional berada pada kisaran 4% setiap tahunnya (Khoirin *et al.*, 2020). Menurut penelitian yang telah dilakukan sebelumnya, mengacu pada data yang dipublikasikan oleh Badan Pusat Statistik (BPS), beberapa provinsi yang memiliki destinasi pariwisata prioritas menunjukkan dinamika yang berbeda dalam hal Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) dan tingkat kemiskinan selama periode sebelum dan saat pandemi COVID-19. Secara umum, sebagian besar provinsi mengalami penurunan pada TPT, namun justru menunjukkan peningkatan pada tingkat kemiskinan. Fenomena ini mengindikasikan bahwa pandemi tidak secara langsung menyebabkan peningkatan jumlah pengangguran, namun berdampak signifikan terhadap penurunan pendapatan masyarakat. Akibatnya, kelompok masyarakat di wilayah tersebut menjadi semakin rentan terhadap kondisi kemiskinan (Pambudi *et al.*, 2020).

Pariwisata merupakan salah satu sektor yang sangat penting untuk menggerakkan ekonomi daerah. Di Kabupaten Lampung Tengah, potensi pariwisata masih banyak yang belum tergali secara maksimal. Masyarakat lokal memiliki beragam budaya, keindahan alam, dan kearifan lokal yang berpotensi menjadi daya tarik wisata. Namun, belum ada strategi yang jelas untuk mengembangkan potensi tersebut secara terencana. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk menemukan strategi yang dapat digunakan untuk mengembangkan pariwisata berbasis komunitas di wilayah ini. Dengan

melibatkan masyarakat lokal, diharapkan pariwisata dapat berkembang secara berkelanjutan dan memberikan manfaat ekonomi bagi masyarakat.

Salah satu latar belakang penting dalam penelitian ini adalah perlunya memberdayakan masyarakat lokal dalam pengembangan pariwisata. Masyarakat memiliki pengetahuan dan pengalaman yang berharga terkait potensi wisata di daerah mereka. Namun, seringkali mereka tidak dilibatkan dalam perencanaan dan pengelolaan pariwisata. Dengan melibatkan komunitas, akan tercipta rasa memiliki dan tanggung jawab terhadap keberlanjutan pariwisata. Penelitian ini akan menganalisis faktor-faktor yang mendukung dan menghambat keterlibatan masyarakat dalam pengembangan pariwisata dan bagaimana hal ini dapat diatasi untuk mencapai tujuan yang diinginkan. Industri pariwisata tidak hanya berfokus pada pembangunan infrastruktur fisik, tetapi juga pada pengembangan sumber daya manusia. Dalam konteks Kabupaten Lampung Tengah, penting untuk memberikan pelatihan dan edukasi kepada masyarakat lokal mengenai potensi pariwisata yang ada. Dengan pengetahuan dan keterampilan yang tepat, masyarakat dapat mengelola usaha pariwisata mereka sendiri, seperti homestay, pemanduan wisata, dan penjualan produk lokal. Ada berbagai tantangan yang dihadapi dalam pengembangan pariwisata berbasis komunitas di Kabupaten Lampung Tengah. Salah satu tantangan utama adalah kurangnya akses informasi dan pemasaran terhadap produk wisata lokal. Masyarakat sering kali tidak memiliki pengetahuan tentang cara memasarkan potensi wisata mereka secara efektif. Oleh karena itu, penelitian ini akan

mengkaji berbagai strategi pemasaran yang dapat diterapkan untuk meningkatkan visibilitas pariwisata daerah. Dengan memanfaatkan teknologi dan media sosial, diharapkan masyarakat mampu menjangkau lebih banyak wisatawan dan menarik minat mereka untuk mengunjungi daerah tersebut.

Berdasarkan latar belakang yang telah dipaparkan diatas maka penelitian ini akan berfokus pada bagaimana strategi pengembangan pariwisata di Lampung Tengah khususnya di Embung Tanjung Anom karena permasalahan pengembangan Embung Tanjung Anom yang sangat kompleks meliputi aspek sumber daya manusia, aspek ekonomi, aspek sarana prasarana hingga implikasi pandemi covid-19. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan rekomendasi yang konkret untuk pengembangan strategi pariwisata berbasis komunitas di Kabupaten Lampung Tengah. Rekomendasi ini akan meliputi berbagai aspek, mulai dari pelatihan untuk masyarakat, pengembangan produk wisata, hingga strategi pemasaran yang efektif. Diharapkan hasil dari penelitian ini tidak hanya bermanfaat bagi pengembangan pariwisata, tetapi juga dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat lokal dan melestarikan budaya serta lingkungan di Kabupaten Lampung Tengah. Dengan demikian, pariwisata dapat memberikan kontribusi yang positif dan berkelanjutan bagi masyarakat dan daerah.

1.2 Rumusan Masalah Penelitian

Berdasarkan latar belakang diatas maka rumusan masalah pada penelitian ini adalah :

1. Bagaimana penerapan prinsip-prinsip *Community Best Tourism* di Embung Tanjung Anom ?
2. Apa saja faktor yang mempengaruhi pengembangan potensi pariwisata berbasis komunitas di Embung Tanjung Anom Kabupaten Lampung Tengah?
3. Bagaimana rekomendasi model strategi pengembangan pariwisata Embung Tanjung Anom?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas maka penelitian ini bertujuan untuk:mengetahui, mendeskripsikan, menganalisis strategi pengembangan potensi pariwisata berbasis komunitas di Kabupaten Lampung Tengah

1. Mengetahui, mendeskripsikan, dan menganalisis penerapan prinsip-prinsip *Community Best Tourism* di Embung Tanjung Anom.
2. Mengetahui, mendeskripsikan, dan menganalisis pengembangan potensi pariwisata berbasis komunitas di Embung Tanjung Anom Kabupaten Lampung Tengah.

3. Menciptakan strategi pengembangan potensi pariwisata berbasis komunitas di Embung Tanjung Anom Kabupaten Lampung Tengah.

1.4 Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

Secara teoritis penelitian ini memberikan kontribusi terhadap pengembangan ilmu pengetahuan dalam bidang Studi Pembangunan, khususnya dalam kajian pembangunan pariwisata berbasis komunitas (*community-based tourism/CBT*). Secara teoritis, penelitian ini memperkaya literatur mengenai strategi pengembangan pariwisata yang menekankan pada peran aktif komunitas lokal sebagai subjek pembangunan, bukan semata-mata sebagai objek. Penelitian ini juga memperluas penerapan teori pembangunan partisipatif dan pemberdayaan masyarakat dalam konteks pengelolaan sumber daya lokal, dengan menunjukkan bagaimana elemen-elemen sosial, ekonomi, kelembagaan, dan kultural saling berinteraksi dalam membentuk strategi pengembangan destinasi wisata berbasis potensi lokal. Hasil penelitian ini dapat digunakan untuk menguji, mengembangkan, atau menyempurnakan teori-teori pembangunan berkelanjutan, khususnya pada ranah pengembangan ekonomi lokal, tata kelola pariwisata desa, serta keberdayaan sosial masyarakat.

2. Manfaat Praktis

Secara praktis .hasil penelitian ini memberikan kontribusi langsung bagi berbagai pihak yaitu:

- 1) Bagi pemerintah daerah, penelitian ini menjadi referensi dalam merumuskan kebijakan pembangunan pariwisata yang lebih responsif terhadap potensi lokal dan berbasis pada pemberdayaan masyarakat, termasuk dalam perencanaan, pembinaan, dan pengalokasian anggaran yang lebih tepat sasaran.
- 2) Bagi komunitas lokal dan pelaku wisata, hasil penelitian ini memberikan panduan strategis dalam mengelola potensi wisata secara mandiri dan berkelanjutan, sekaligus meningkatkan kapasitas masyarakat dalam hal pengelolaan, promosi, dan pelayanan wisata. Strategi yang dihasilkan juga dapat menjadi dasar dalam membangun kolaborasi antar pelaku lokal, baik itu BUMDes, Pokdarwis maupun tokoh masyarakat.
- 3) Bagi lembaga pendidikan dan penelitian, penelitian ini dapat digunakan sebagai bahan ajar, kajian lanjutan, atau model praktik pembangunan partisipatif yang dapat direplikasi di desa wisata lain yang memiliki karakteristik serupa.
- 4) Bagi pihak swasta dan investor, penelitian ini dapat memberikan gambaran tentang potensi dan arah pengembangan pariwisata lokal yang prospektif, sehingga mendorong investasi yang sejalan dengan prinsip pembangunan berkelanjutan dan inklusif.

II. KERANGKA TEORI

2.1 Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu merupakan studi yang telah dilakukan oleh peneliti sebelumnya dan memiliki relevansi dengan topik yang sedang dikaji dalam penelitian ini. Keberadaan penelitian sebelumnya berperan penting sebagai sumber referensi dan landasan dalam penyusunan maupun analisis penelitian yang akan dilakukan. Temuan-temuan dari penelitian terdahulu dimanfaatkan untuk membangun kerangka pemikiran secara sistematis, serta membantu mengidentifikasi kesamaan maupun perbedaan dengan studi-studi sebelumnya. Dengan demikian, penelitian ini diharapkan dapat menghadirkan kontribusi baru (*novelty*), khususnya dalam bidang kajian strategi pengembangan pariwisata. Adapun beberapa penelitian yang menjadi rujukan utama dalam penyusunan penelitian ini adalah sebagai berikut:

Tabel 1. Penelitian Terdahulu

No	Penulis	Judul	Tahun	Metode	Hasil	Perbedaan Penelitian
1.	Rini Anggriani , Widia Febriana, Rahman Prasetyo , Rina Komala (Anggriani <i>et al.</i> , 2023)	Strategi Pengembangan Ekowisata Melalui Konsep <i>Community Based Tourism</i> dan Manfaat Sosial Ekonomi Bagi Masyarakat Di Desa Wisata Sembalun Nusa Tenggara Timur	2023	Kuantitatif	CBT sangat memberikan manfaat sosial ekonomi bagi masyarakat desa wisata sembalun dengan interval 94,5 %.	Penelitian ini bersifat strategis dan aplikatif, tidak hanya melihat manfaat tetapi juga menyusun langkah-langkah pengembangan berbasis komunitas secara kontekstual.
2.	Martarida Bagaihing, Christina Mariana Mantola, Yudha Eka Nugraha (Martarida Bagaihing, Christina Mariana Mantolas, 2022)	Strategi Pengembangan Pantai Nimtuka Sebagai Potensi Wisata Berbasis Masyarakat Di Desa Bone, Kabupaten Kupang	2022	Kualitatif	menambah fasilitas pendukung, mendorong pemerintah daerah untuk meningkatkan akses jalan, menjalin kerja sama dengan pemerintah daerah, menambah sumber daya manusia, meningkatkan media promosi melalui media sosial, dan menjaga nilai-nilai budaya.	Penelitian ini memiliki lingkup yang lebih luas dan pendekatan strategis, tidak hanya sebatas satu destinasi, tetapi melihat potensi secara kawasan di satu kabupaten.
3.	Made Prasta Yostitia Pradipta (Prasta, 2021)	Pariwisata Berbasis Masyarakat Sebagai Pelestari Tradisi Di Desa Samiran	2021	Kualitatif	keuntungan yang didapatkan dengan pengembangan pariwisata berbasis masyarakat adalah semangat masyarakat yang tinggi sehingga berdampak pada tingginya partisipasi masyarakat dalam semua kegiatan, masyarakat dapat saling menjaga, berbagi, dan proses itu dapat dirasakan secara adil	menekankan pada perumusan strategi dan pembangunan kapasitas komunitas dalam memanfaatkan potensi lokal untuk pengembangan pariwisata secara berkelanjutan.

Keterangan: Diolah oleh peneliti, 2023

No	Penulis	Judul	Tahun	Metode	Hasil	Perbedaan Penelitian
4.	Evi Novianti, Hafsah Nugraha, Risa Ramadaniati Zahra (Novianti <i>et al.</i> , 2021)	Potensi Wisata Komunitas Pijar Sebagai Kelompok Unik Dalam Lingkungan Masyarakat Multikultural	2021	kualitatif	Komunitas Pijar memiliki potensi menjadi pariwisata kreatif karena sifatnya yang informal, fleksibel, praktis, dan juga interaktif. Sebagai kelompok unik dalam masayarakat multikultural,	Fokus pada komunitas kreatif dalam konteks multikultural, bukan pada strategi pengembangan wilayah atau potensi wisata secara luas
5.	Endah Tisnawati , Dita Ayu Rani Natalia, Desrina Ratriningsih , dkk. (Tisnawati <i>et al.</i> , 2019)	Strategi Pengembangan Eko-Wisata Berbasis Masyarakat Di Kampung Wisata Rejowinangun	2019	kualitatif	Partisipasi warga dapat menumbuhkan lingkungan yang konduif bagi peningkatan potensi lingkungan dan pertumbuhan masyarakat.	Fokus pada satu kampung wisata berbasis lingkungan; belum menyentuh aspek kebijakan dan pemberdayaan secara menyeluruh
6.	Sri Rahayu Budiani, Windarti Wahdaningrum, Dellamanda Yosky, dkk. (Budiani, 2018)	Analisis Potensi Dan Strategi Pengembangan Pariwisata Berkelanjutan Berbasis Komunitas Di Desa Sembungan, Wonosobo, Jawa Tengah	2018	Kualitatif deskriptif	Desa sembungan belum memenuhi prinsip pembangunan pariwisata berkelanjutan, sehingga masih perlu adanya pembenahan dari segi atraksi dan keunikan wisata serta sumber daya manusia.	Fokus pada pemenuhan prinsip pariwisata berkelanjutan; pendekatan deskriptif, belum memformulasikan strategi konkrit berbasis lokalitas komunitas

Keterangan: Diolah oleh peneliti, 2023

No	Penulis	Judul	Tahun	Metode	Hasil	Perbedaan Penelitian
7.	Rindo Bagus Sanjaya (Bagus Sanjaya, 2018)	Strategi Pengembangan Pariwisata Berbasis Masyarakat Di Desa Kemetul, Kabupaten Semarang	2018	Kualitatif	analisis SWOT dengan melakukan strategi pengembangan kelembagaan dan SDM, strategi promosi, strategi penguatan produk unggulan, dan strategi pengembangan daya tarik wisata berkelanjutan.	Fokus pada SWOT di satu desa wisata yang telah berkembang; pendekatan tak kontekstual untuk wilayah yang belum berkembang seperti Lampung Tengah
8.	Choridotul Bahiyah , Wahyu Hidayat R, Sudarti (Bahiyah dan Hidayat, 2018)	Strategi Pengembangan Desa Wisata Berbasis Masyarakat (<i>Community Based Rural Tourism</i>) Di Desa Papringan	2017	Kualitatif	memetakan potensi wisata, mengantisipasi kendala serta mengembangkan strategi dalam rangka mewujudkan desa wisata di Papringan.	Fokus pada pengembangan berbasis masyarakat dan keunggulan potensi kampung.
9.	Risna Resnawaty (Resnawaty, 2016)	Strategi Community Practice Dalam Pengembangan Pariwisata Berbasis Masyarakat	2016	Kualitatif	bahwa salah satu kerugian atau kelemahan pengembangan pariwisata yang dilakukan oleh masyarakat adalah mudahnya minuman keras dan prostitusi terselubung	Perbedaan penelitiannya terletak pada pengembangan embung tanjung anom yang tidak menyentuh ranah unmoral.

Keterangan: Diolah oleh peneliti, 2023

Kesimpulan dari penelitian terdahulu diatas adalah strategi pengembangan potensi pariwisata berbasis komunitas melalui *community based tourism* menjadikan sumber daya manusia sebagai asset utama berhasil atau tidaknya pengembangan pariwisata. Selain itu faktor seperti daya dukung sarana dan prasana di lokasi wisata juga menjadi faktor yang dapat mempengaruhi tingkat perkembangan pariwisata suatu daerah. Akses jalan menuju lokasi wisata dan kemampuan pengelola wisata untuk mempromosikan pariwisata yang ada di daerahnya juga menjadi faktor pendukung dan penghambat lainnya.

Berdasarkan kesimpulan diatas, maka perbedaan penelitian ini dengan penelitian-penelitian yang telah dilakukan sebelumnya adalah pada penelitian ini penulis mengedepankan pengembangan pariwisata yang berbasis komunitas yang didalamnya juga melibatkan Pokdarwis dan BUMK yang merupakan bagian dari kelompok pemuda. Keterlibatan banyak aktor *stakeholders* dalam pengembangan pariwisata berdampak pada kompleksitas perencanaan dan pengembangan pariwisata Embung Tanjung Anom. Keunggulan penelitian ini terletak pada kebaruannya karena sebelumnya belum ada penelitian yang bertemakan strategi pengembangan Embung Tanjung Anom yang berbasis CBT. Secara umum, gagasan baru yang akan dihasilkan dalam penelitian ini didasarkan pada kondisi actual yang terjadi pada lokus penelitian. *Fresh idea* mengenai strategi pemberdayaan komunitas wisata yang kerap dipandang sebelah mata oleh berbagai unsur yang berkepentingan dalam kegiatan pariwisata sangat diperlukan dalam rangka menumbuhkan gairah kegiatan pariwisata di Embung Tanjung

Anom. *Output* dari penelitian ini adalah model strategi pengembangan pariwisata yang berbasis CBT dengan mempertimbangkan unsur-unsur pengembangan pariwisata, yakni: daya tarik wisata (*attraction*), fasilitas (*amenities*), aksesibilitas (*accessibilities*), dan kelembagaan (*ancillary*).

2.2 Kajian Teori

2.2.1 *Grand Theory* - Teori Perubahan Sosial

2.2.1.1 Pengertian Perubahan Sosial

Menurut Herbert Blumer, perubahan sosial dipahami sebagai upaya kolektif yang dilakukan oleh manusia dalam rangka membentuk tatanan kehidupan baru yang lebih sesuai dengan kondisi dan kebutuhan zaman. Sementara itu, Ralph Turner dan Lewis M. Killian mendefinisikan perubahan sosial sebagai proses tindakan kolektif yang berlangsung secara berkelanjutan dalam masyarakat, yang bertujuan untuk menghasilkan transformasi dalam struktur sosial maupun hubungan antar kelompok. Dengan demikian, perubahan sosial mencerminkan dinamika dalam kehidupan sosial yang dapat terjadi pada berbagai tingkatan, mulai dari individu hingga pada skala global (Narwoko dan Bagong: 2007). Agus Salim mendefinisikan perubahan sosial sebagai bentuk perkembangan peradaban manusia yang dipengaruhi oleh perubahan alam, biologis, dan fisik yang berlangsung sepanjang

kehidupan manusia. Cakupan perubahan sosial sangat luas, mulai dari perubahan sederhana dalam lingkup keluarga hingga transformasi besar dalam sistem kelembagaan masyarakat. Ia mengelompokkan teori perubahan sosial ke dalam tiga kategori melingkar (*cyclic theory*): (a) teori yang berfokus pada perkembangan material sebagai dasar realitas, (b) teori yang mengutamakan aspek non-material, dan (c) teori yang menggabungkan keduanya—material dan non-material—dalam menjelaskan realitas sosial (Salim, 2002). Senada dengan itu, Lauer (1993) menyatakan bahwa perubahan sosial merupakan proses modifikasi pada seluruh aspek kehidupan sosial, mulai dari tingkat individu hingga global, yang mencakup perubahan dalam struktur dan fungsi masyarakat. Wilbert Moore menekankan bahwa perubahan sosial melibatkan transformasi dalam struktur sosial, pola perilaku, dan interaksi antarindividu. Sementara itu, Mac Iver mengartikan perubahan sosial sebagai pergeseran dalam hubungan sosial yang menyebabkan ketidakseimbangan dalam tatanan masyarakat (Lauer, 1993).

Menurut Lumintang Perubahan sosial ialah suatu proses perubahan yang terjadi pada lembaga kemasyarakatan di dalam suatu masyarakat yang mempengaruhi sistem sosialnya, termasuk di dalamnya nilai-nilai, sikap-sikap dan pola-pola perikelakuan

diantara kelompok-kelompok dalam masyarakat (Lumintang, 2015). Perubahan merupakan bagian yang tidak terelakkan dalam kehidupan setiap individu. Sepanjang kehidupannya, manusia senantiasa mengalami berbagai bentuk perubahan, baik yang bersifat terbatas maupun luas, serta terjadi secara bertahap maupun cepat. Perubahan sosial ini dapat mencakup berbagai aspek kehidupan, seperti nilai dan norma sosial, pola perilaku organisasi, struktur lembaga kemasyarakatan, stratifikasi sosial, relasi kekuasaan dan wewenang, serta dinamika interaksi sosial. Fenomena perubahan dalam masyarakat merupakan hal yang wajar dan menjadi bagian dari proses evolusi sosial. Kemajuan teknologi komunikasi modern turut mempercepat penyebaran dampak perubahan ini ke berbagai belahan dunia, menjadikannya sebagai fenomena global yang saling terhubung (Soekanto, 2009).

Perubahan sosial kerap kali dikaitkan secara erat dengan perubahan sosial budaya, yang mencakup pergeseran dalam struktur, proses, dan fungsi sosial, termasuk penyesuaian terhadap nilai-nilai sosial yang berlaku. Menentukan batas tegas antara perubahan sosial dan perubahan kebudayaan merupakan hal yang kompleks, mengingat keduanya saling berkelindan. Perbedaan utama antara keduanya terletak pada pengertian mengenai masyarakat dan kebudayaan. Namun demikian, dapat dipahami

bahwa setiap masyarakat pasti memiliki kebudayaan, dan kebudayaan tidak dapat terlepas dari eksistensi suatu masyarakat. Menurut Kingsley Davis, perubahan sosial pada hakikatnya merupakan bentuk dari perubahan kebudayaan, yang mencakup perkembangan dalam bidang ilmu pengetahuan, seni, teknologi, filsafat, norma serta struktur organisasi sosial, dan unsur-unsur kebudayaan lainnya. Oleh karena itu, perubahan kebudayaan memiliki cakupan yang lebih luas (Setiadi dan Kolip, 2010). Dalam praktiknya, perubahan sosial terjadi sebagai bagian dari dinamika sosial yang dialami masyarakat, yang disertai dengan transformasi komponen-komponen budaya dan sistem sosial. Ketika masyarakat terpapar oleh pengaruh eksternal, pola kehidupan lama cenderung ditinggalkan dan digantikan dengan pola kehidupan, budaya, serta sistem sosial yang lebih sesuai dengan kondisi dan tantangan baru (Burhan, 2009). Perubahan yang berlangsung dalam kehidupan masyarakat mencakup berbagai dimensi kehidupan, antara lain dimensi sosial, budaya, ekonomi, ilmu pengetahuan, hingga teknologi. Dalam konteks kajian ilmiah, aspek sosial dan ekonomi menjadi dua fokus utama yang sering menjadi perhatian para peneliti. Perubahan dalam aspek ekonomi berhubungan erat dengan transformasi yang terjadi pada aktivitas ekonomi masyarakat, khususnya dalam kaitannya dengan sistem mata pencaharian dan strategi pemenuhan

kebutuhan hidup sehari-hari. Perubahan ini dapat mencerminkan dinamika adaptasi masyarakat terhadap kondisi internal maupun eksternal yang memengaruhi struktur dan pola ekonomi lokal.

2.2.1.2 Mahzab-Mahzab Pemikiran dalam Teori Perubahan Sosial

Teori perubahan sosial pada dasarnya dibagi menjadi dua kelompok, yaitu teori klasik dan teori modern.

1. Teori Klasik Perubahan Sosial

Pemikiran para tokoh klasik tentang perubahan sosial dapat digolongkan ke dalam beberapa pola, perubahan sosial yakni: pola linear, perubahan sosial siklus dan perubahan sosial gabungan.

1) Pola Linear

Menurut pandangan Comte, perubahan sosial berlangsung secara linear, artinya mengikuti pola yang teratur dan bertahap dari kondisi yang sederhana menuju struktur masyarakat yang lebih kompleks. Ia mengemukakan konsep hukum tiga tahap perkembangan intelektual, yaitu:

- a. Tahap Teologis, di mana pemahaman manusia tentang dunia sangat dipengaruhi oleh keyakinan terhadap kekuatan supranatural. Pada fase ini, struktur sosial masih bersifat sederhana dan dominasi kepercayaan agama sangat kuat.
- b. Tahap Metafisik, merupakan fase transisi ketika penjelasan mengenai fenomena sosial dan alam mulai beralih dari

pendekatan religius ke pendekatan yang lebih rasional namun masih spekulatif, dengan menggunakan konsep-konsep abstrak seperti hak kodrati atau kekuatan alamiah.

c. Tahap Positif (Ilmiah), yaitu ketika masyarakat mulai mengandalkan observasi empiris, metode ilmiah, dan logika dalam memahami dan mengatur kehidupan sosial.

2) Pola Siklus

Dalam pola siklus perubahan sosial, perkembangan masyarakat dianalogikan seperti perputaran roda—ada kalanya berada di puncak kejayaan, namun pada waktu tertentu juga dapat mengalami kemunduran, bahkan kehancuran. Pandangan ini menyatakan bahwa kemajuan peradaban manusia tidak bersifat linear dan berkelanjutan, melainkan mengikuti pola naik turun secara berulang. Seperti halnya gelombang yang datang, membesar, lalu menghilang, perjalanan suatu peradaban pun dapat mengalami fase kemunculan, pertumbuhan, dan akhirnya kemusnahan. Analogi lain yang sering digunakan adalah siklus kehidupan manusia, mulai dari masa muda, berlanjut ke kedewasaan, menuju masa tua, dan akhirnya berakhir. Dengan demikian, perubahan sosial dalam perspektif siklus menekankan bahwa kemajuan tidak selalu bersifat permanen, melainkan dapat berbalik menjadi kemunduran sesuai dengan dinamika internal dan eksternal masyarakat.

3) Gabungan beberapa pola

Teori perubahan sosial gabungan mengintegrasikan unsur-unsur dari pola linear dan pola siklus. Artinya, dinamika sosial dalam masyarakat tidak hanya mengikuti arah perkembangan yang terus maju, tetapi juga menunjukkan kecenderungan pengulangan atau siklus tertentu. Dalam pandangan Karl Marx, perubahan sosial bersifat linear ketika ia menjelaskan transisi masyarakat dari bentuk komunis tradisional menuju komunis modern. Marx berpendapat bahwa perkembangan kapitalisme yang semakin pesat akan menimbulkan konflik struktural antara kelas pekerja (proletariat) dan kelas pemilik modal (borjuis). Konflik ini, menurutnya, pada akhirnya akan dimenangkan oleh kaum proletar, yang kemudian membentuk masyarakat tanpa kelas, yaitu masyarakat komunis. Namun, aspek siklikal dari pemikiran Marx tampak dalam pandangannya mengenai sejarah sebagai rangkaian perjuangan kelas yang terus berulang. Ia meyakini bahwa sejarah umat manusia ditandai oleh konflik-konflik antara kelas yang berkuasa dan kelas tertindas. Ketika satu kelas berhasil mendominasi kelas lainnya, maka akan muncul siklus baru dari perjuangan dan perubahan sosial. Dengan demikian, teori Marx mencerminkan pandangan bahwa perubahan sosial tidak hanya bergerak maju secara progresif, tetapi juga mengalami pola berulang yang ditandai oleh konflik

kelas yang terus-menerus.

2. Teori modern Perubahan Sosial

Secara umum, para pendukung teori modern mengenai perubahan sosial memandang bahwa proses perubahan di negara-negara berkembang berlangsung secara linear, yaitu bergerak dari kondisi tradisional menuju modernitas, serta bersifat evolusioner atau berlangsung secara bertahap dan lambat. Sebaliknya, perspektif teori konflik menyatakan bahwa perubahan sosial tidak selalu membawa kemajuan bagi negara-negara berkembang. Justru, proses tersebut kerap menyebabkan keterbelakangan dan ketergantungan negara-negara berkembang terhadap negara-negara industri maju di Barat. Di bawah ini dipaparkan beberapa pendekatan teori modern terkait perubahan sosial.

1) Teori Modernisasi

Teori ini berasumsi bahwa negara-negara yang masih terbelakang dapat mencapai kemajuan dengan mengikuti jejak negara-negara industri maju. Melalui proses modernisasi yang meniru langkah-langkah pembangunan negara-negara maju, negara-negara tersebut diyakini dapat bertransformasi menjadi negara berkembang. Perubahan yang diperlukan mencakup transisi dari struktur sosial yang tradisional menuju tatanan yang lebih modern, dengan cara mengatasi berbagai

kelemahan yang ada. Perbaikan tersebut meliputi penurunan angka kelahiran dan kematian, menyusutnya peran dan pengaruh keluarga dalam kehidupan sosial, terbukanya sistem stratifikasi sosial, pergeseran dari sistem feodal menuju sistem birokrasi, menurunnya dominasi agama dalam kehidupan publik, pengalihan fungsi pendidikan dari keluarga atau komunitas ke lembaga formal, kemunculan budaya massa, serta berkembangnya sistem ekonomi pasar dan proses industrialisasi.

2) Teori Ketergantungan (Dependencia)

Teori ini menekankan bahwa perkembangan global berlangsung secara tidak merata, sebagaimana tercermin dari pengalaman negara-negara di Amerika Latin. Sementara negara-negara maju mengalami kemajuan pesat, negara-negara di dunia ketiga justru menghadapi situasi kolonialisme dan neo-kolonialisme yang menghambat proses pembangunannya. Ketimpangan ini mengakibatkan negara-negara dunia ketiga tetap berada dalam kondisi keterbelakangan ekonomi dan gagal mencapai tahap “lepas landas” pembangunan. Akibatnya, perekonomian negara-negara tersebut cenderung bergantung pada eksploitasi sumber daya alam dan tetap berada dalam posisi subordinat

terhadap negara-negara industri maju.

3) Teori Sistem Dunia

Teori sistem dunia yang dikembangkan oleh Immanuel Wallerstein mengemukakan bahwa sistem ekonomi kapitalis global terbagi ke dalam tiga kategori utama, yakni negara inti, semi-periferi, dan periferi. Negara-negara inti merupakan wilayah industri maju, terutama di Eropa Barat, yang telah mengalami proses industrialisasi sejak abad ke-16 dan kini mendominasi perekonomian global. Negara-negara semi-periferi, seperti beberapa negara di Eropa Selatan, memiliki keterkaitan ekonomi dengan negara-negara inti namun tidak mengalami perkembangan signifikan. Sementara itu, negara-negara periferi, yang mayoritas berada di kawasan Asia dan Afrika, tetap berada dalam posisi terpinggirkan. Dalam tatanan sistem dunia saat ini, negara-negara inti, termasuk Amerika Serikat dan Jepang, memiliki dominasi atas sumber daya global dan mengeksploitasi sumber daya alam negara-negara lain demi kepentingan sendiri. Akibat ketimpangan struktural ini, negara-negara semi-periferi dan periferi menghadapi kesulitan besar untuk mengejar ketertinggalan mereka terhadap negara-negara inti.

2.2.1.3 Karakteristik Perubahan Sosial

Perubahan Sosial memiliki beberapa karakteristik yaitu:

- a. Unsur-unsur budaya material memberikan pengaruh signifikan terhadap aspek-aspek nonmaterial dalam kehidupan masyarakat, seperti nilai, norma, kepercayaan, dan ideologi.
- b. Transformasi yang terjadi dalam struktur sosial serta perubahan fungsi-fungsi yang dijalankan oleh elemen-elemen masyarakat.
- c. Perubahan yang mencerminkan pergeseran dalam pola hubungan sosial antarindividu maupun antar kelompok, atau sebagai bentuk ketidakseimbangan dalam sistem relasi sosial yang sebelumnya stabil.
- d. Beragam perubahan dalam cara hidup masyarakat yang sebelumnya telah mapan, baik sebagai akibat dari faktor geografis, perkembangan teknologi, perubahan komposisi demografis, pergeseran ideologi, maupun melalui proses difusi budaya dan penemuan baru.
- e. Perubahan bentuk yang terjadi pada pola-pola dasar kehidupan manusia, sebagai bentuk adaptasi terhadap dinamika sosial dan kultural.
- f. Setiap bentuk perubahan yang terjadi pada institusi sosial dalam suatu masyarakat, yang berdampak terhadap keseluruhan sistem sosial, termasuk nilai-nilai, sikap, dan pola interaksi antar kelompok sosial.

2.2.1.4 Faktor Penyebab Perubahan Sosial

Menurut Soekanto (2009), secara umum faktor-faktor penyebab terjadinya perubahan sosial dan budaya dapat diklasifikasikan ke dalam dua kategori utama, yaitu faktor internal dan faktor eksternal. Faktor internal merujuk pada perubahan yang bersumber dari dalam lingkungan masyarakat itu sendiri, sementara faktor eksternal merupakan perubahan yang dipicu oleh pengaruh dari luar masyarakat.

a. Perubahan yang Berasal dari Masyarakat (internal)

1. Perubahan dalam jumlah penduduk, baik peningkatan maupun penurunan, menjadi salah satu faktor penting yang mendorong terjadinya perubahan sosial. Pertumbuhan penduduk di suatu wilayah dapat memicu pergeseran dalam struktur sosial masyarakat, termasuk dalam fungsi dan peran lembaga-lembaga sosial. Sebaliknya, penurunan jumlah penduduk, misalnya akibat migrasi, dapat menyebabkan kekosongan sosial dan ekonomi di wilayah asal.
2. Kemajuan ilmu pengetahuan menghasilkan berbagai penemuan, baik dalam bentuk teknologi maupun gagasan, yang pada akhirnya menyebar dan dikenal luas di tengah masyarakat. Apabila penemuan tersebut diterima dan diadopsi secara sosial, maka akan mendorong terjadinya perubahan dalam struktur, nilai, maupun pola kehidupan masyarakat secara keseluruhan.

b. Perubahan yang berasal dari luar masyarakat (eksternal)

1. Faktor Lingkungan Alam Fisik

Perubahan sosial juga dapat dipicu oleh kondisi lingkungan alam sekitar manusia. Soekanto menekankan bahwa faktor ini kerap kali berkaitan dengan tindakan masyarakat itu sendiri. Contohnya adalah praktik penebangan hutan secara ilegal yang dapat menimbulkan bencana ekologis seperti tanah longsor dan banjir, sehingga memicu perubahan dalam kehidupan sosial masyarakat yang terdampak.

2. Konflik Bersenjata atau Peperangan

Perang yang terjadi antara kelompok masyarakat atau antarnegara dapat menyebabkan transformasi sosial yang signifikan. Dengan semakin canggihnya teknologi persenjataan, dampak destruktif peperangan terhadap struktur sosial, ekonomi, dan budaya menjadi semakin besar, meninggalkan kerusakan fisik maupun psikologis.

3. Pengaruh Kebudayaan Asing

Interaksi antara satu masyarakat dengan masyarakat lain, baik secara langsung melalui pertemuan fisik maupun secara tidak langsung melalui media massa, dapat memicu adopsi unsur-unsur budaya baru. Proses ini kerap mengubah sistem nilai, norma, dan pola perilaku dalam masyarakat penerima, menciptakan dinamika perubahan sosial-budaya yang kompleks.

Menurut Bruce J. Cohen, perubahan sosial dalam masyarakat dapat dipengaruhi oleh sejumlah faktor utama:

1. Faktor geografis, yaitu kondisi lingkungan fisik yang secara langsung membentuk pola kehidupan masyarakat. Ketersediaan sumber daya alam yang melimpah atau terbatas, misalnya, akan sangat menentukan aktivitas ekonomi, sistem sosial, serta tingkat kesejahteraan masyarakat di suatu wilayah.
2. Faktor teknologi berperan penting dalam mendorong perubahan sosial yang signifikan. Inovasi dan penemuan baru di bidang teknologi, baik dalam produksi, komunikasi, maupun transportasi, telah menciptakan transformasi dalam cara hidup masyarakat, mempercepat arus informasi, serta mengubah struktur hubungan sosial.
3. Kepemimpinan juga merupakan katalisator perubahan sosial. Pemimpin yang memiliki kharisma dan visi transformatif dapat menggugah kesadaran kolektif masyarakat dan memobilisasi dukungan untuk menciptakan perubahan. Tokoh-tokoh semacam ini sering membawa gagasan-gagasan baru yang mampu menantang tatanan sosial yang lama.
4. Perubahan jumlah penduduk, baik melalui pertumbuhan yang pesat maupun penurunan drastis, turut memberikan dampak pada dinamika sosial. Peningkatan populasi dapat memicu inovasi dalam

metode produksi dan distribusi barang, sementara penurunan populasi bisa memaksa masyarakat untuk menyesuaikan struktur organisasinya guna menjaga keberlangsungan hidup dan ketahanan sosial.

2.2.1.5 Bentuk-bentuk perubahan

a. Perubahan lambat dan perubahan cepat

Perubahan sosial yang berlangsung secara perlahan dalam jangka waktu panjang, melalui serangkaian transformasi kecil yang saling berkaitan dan bertahap, dikenal dengan istilah evolusi. Menurut Soekanto (2009), evolusi terjadi secara alamiah tanpa adanya perencanaan atau niat tertentu dari masyarakat. Perubahan ini muncul sebagai respons terhadap kebutuhan dan tuntutan baru yang berkembang seiring dengan dinamika kehidupan sosial serta pertumbuhan masyarakat itu sendiri. Sebaliknya, terdapat pula perubahan sosial yang berlangsung secara cepat dan menyentuh aspek-aspek mendasar dalam kehidupan bermasyarakat. Perubahan jenis ini disebut sebagai **revolusi**. Dalam perspektif sosiologi, suatu revolusi tidak dapat terjadi begitu saja; terdapat sejumlah prasyarat yang harus terpenuhi agar perubahan besar tersebut dapat mewujudkan, terutama berkaitan dengan kesiapan struktur sosial dan ketegangan yang ada dalam masyarakat.

1. Harus ada keinginan umum untuk mengadakan suatu perubahan.
2. Adanya seorang pemimpin atau sekelompok orang yang dianggap mampu memimpin masyarakat tersebut.
3. Pemimpin diharapkan dapat menampung keinginan-keinginan masyarakat untuk kemudian merumuskan serta menegaskan rasa tidak puas tadi menjadi program dan arah gerakan.
4. Pemimpin tersebut harus dapat menunjukkan suatu tujuan pada masyarakat.
5. Harus ada momentum yaitu saat dimana segala keadaan dan faktor sudah tepat dan baik untuk memulai suatu gerakan.

b. Perubahan Kecil dan Perubahan Besar

Perubahan kecil merujuk pada transformasi yang terjadi pada elemen-elemen tertentu dalam struktur sosial namun tidak memberikan dampak signifikan terhadap tatanan kehidupan masyarakat secara keseluruhan. Misalnya, perubahan dalam gaya berpakaian hanya mencerminkan dinamika budaya populer dan tidak memengaruhi eksistensi maupun fungsi lembaga-lembaga sosial. Sebaliknya, perubahan besar mencakup pergeseran yang terjadi pada unsur-unsur penting dalam struktur sosial yang membawa dampak luas dan mendalam bagi masyarakat. Perubahan ini biasanya berdampak pada sistem nilai, norma, hingga fungsi lembaga-lembaga sosial yang ada (Soekanto, 2009).

- c. Perubahan yang dikehendaki (*intended-change*) atau perubahan yang direncanakan (*planned-chage*) dan perubahan yang tidak dikehendaki (*unitended-change*) atau perubahan yang tidak direncanakan (*unplanned-change*).

Perubahan yang diinginkan atau direncanakan merupakan bentuk transformasi sosial yang telah diperhitungkan sebelumnya dan dirancang secara sistematis oleh individu atau kelompok tertentu yang memiliki niat untuk membawa perubahan dalam masyarakat. Mereka yang berperan dalam mendorong perubahan ini dikenal sebagai *agent of change*, yaitu individu atau kelompok yang mendapat legitimasi sosial untuk memimpin atau mengarahkan perubahan, khususnya dalam satu atau lebih lembaga kemasyarakatan. Sebaliknya, perubahan yang tidak diinginkan atau tidak direncanakan adalah perubahan sosial yang berlangsung secara spontan, tanpa adanya perencanaan atau kendali dari masyarakat. Jenis perubahan ini seringkali terjadi di luar kendali dan dapat menimbulkan konsekuensi sosial yang tidak diharapkan, bahkan berpotensi menimbulkan disorientasi sosial di tengah masyarakat (Soekanto, 2009).

2.2.1.6 Perspektif dalam Perubahan Sosial

Tiga perspektif penting yang harus diperhatikan ketika menjelaskan mekanisme perubahan sosial antara lain adalah:

a. Perspektif materialis

Dalam perspektif materialis, budaya material khususnya teknologi dipandang sebagai faktor utama penggerak perubahan sosial. Teknologi dianggap sangat menentukan arah perubahan dalam masyarakat. Tokoh utama dalam pandangan ini adalah Thorstein Veblen, yang menyatakan bahwa perilaku manusia sangat dipengaruhi oleh perkembangan teknologi dan kondisi ekonomi. Pandangan ini menyiratkan bahwa teknologi memiliki peran signifikan dalam membentuk perilaku sosial. Pengaruh teknologi terhadap perubahan sosial dapat dilihat dalam tiga hal: pertama, teknologi memperluas pilihan atau alternatif bagi manusia; kedua, teknologi mengubah pola interaksi sosial; dan ketiga, kemunculan teknologi baru sering kali menimbulkan konflik serta permasalahan sosial yang baru.

b. Perspektif Idealis

Berbeda dengan materialisme, perspektif idealis menempatkan ide sebagai faktor utama dalam perubahan sosial. Menurut pandangan ini, perubahan sosial berakar dari gagasan atau pemikiran. Whitehead, misalnya, berpendapat bahwa ide-ide besar seperti agama sering kali

mengkritisi tatanan sosial yang ada. Sebagai contoh, etika Protestan dipandang sebagai faktor pendorong munculnya kapitalisme modern.

c. **Perspektif Mekanisme Interaksional**

Perspektif ini memandang bahwa perubahan sosial merupakan hasil dari dinamika proses sosial itu sendiri. Perubahan terjadi melalui interaksi antarindividu dalam masyarakat. Menurut Georg Simmel, interaksi sosial terdiri atas proses-proses yang bersifat asosiatif dan disosiatif. Proses asosiatif mencerminkan kerja sama dan solidaritas, sementara proses disosiatif ditandai oleh kompetisi dan konflik, yang semuanya turut membentuk jalannya perubahan sosial.

2.2.1.7 Aspek Perubahan Sosial

Menurut Paul B. Horton dan Chester L. Hunt, proses perubahan sosial meliputi tiga aspek, yaitu:

a. **Penemuan**

Penemuan diartikan sebagai penambahan terhadap khazanah pengetahuan yang telah teruji dan diakui secara ilmiah. Sebuah penemuan membawa unsur baru ke dalam sistem kebudayaan. Walaupun suatu fakta atau objek telah lama ada, ia baru diakui sebagai bagian dari kebudayaan ketika berhasil ditemukan dan diidentifikasi secara sah. Penemuan akan menjadi pemicu perubahan sosial apabila diaplikasikan dalam konteks kegunaan baru. Terlebih lagi, apabila penemuan tersebut

dimanfaatkan dalam pengembangan teknologi, maka dampaknya sering kali signifikan, memicu transformasi besar dalam berbagai aspek kehidupan masyarakat. Penemuan adalah suatu tambahan pengetahuan terhadap perbendaharaan pengetahuan dunia yang telah diverifikasi.

b. Invensi

Invensi merujuk pada proses penciptaan kombinasi baru atau penerapan baru dari pengetahuan yang telah tersedia sebelumnya. Meskipun elemen-elemennya telah dikenal, gagasan untuk menggabungkan unsur-unsur tersebut menjadi sesuatu yang berbeda merupakan hal yang inovatif. Hasil dari inovasi ini adalah pemunculan fungsi baru dari elemen-elemen yang telah ada. Invensi diklasifikasikan ke dalam dua kategori utama, yaitu invensi material dan invensi sosial. Invensi material mencakup penciptaan benda-benda fisik seperti mobil, telepon, atau pesawat terbang, sedangkan invensi sosial meliputi sistem atau struktur sosial baru seperti bentuk pemerintahan konstitusional atau korporasi modern. Kedua bentuk invensi tersebut melibatkan pemanfaatan, penggabungan, dan pengembangan elemen-elemen lama untuk menghasilkan kegunaan baru. Oleh karena itu, invensi merupakan suatu proses berkelanjutan yang tidak terjadi secara terpisah, melainkan sebagai kelanjutan dari rangkaian

penemuan dan invensi sebelumnya. Gillin (1948) menegaskan bahwa invensi dapat membawa kebaruan dalam empat dimensi utama: bentuk (*form*), fungsi (*function*), makna (*meaning*), dan prinsip (*principle*). Proses ini merupakan siklus dinamis yang melibatkan modifikasi, pengembangan, serta rekombinasi yang terus berlangsung.

c. Difusi

Secara umum, perubahan sosial dalam masyarakat banyak dipengaruhi oleh proses difusi, yakni penyebaran unsur-unsur kebudayaan dari satu kelompok sosial ke kelompok lainnya. Proses ini berlangsung ketika terdapat interaksi antara dua atau lebih komunitas. Namun, tidak semua masyarakat bersedia menerima unsur budaya luar; beberapa bahkan menetapkan larangan agar tidak terjadi interaksi budaya dengan pihak lain sebagai bentuk resistensi terhadap difusi. Difusi bersifat dua arah, artinya penyebaran budaya tidak hanya mengalir ke satu pihak saja, melainkan terjadi pertukaran di antara kelompok yang terlibat. Kontak sosial menjadi syarat utama dalam proses ini, dan dari interaksi tersebut akan muncul adopsi budaya pada kedua belah pihak. Umumnya, masyarakat dengan tingkat teknologi yang lebih rendah cenderung lebih banyak menyerap unsur budaya dari masyarakat yang lebih maju. Selain itu, unsur budaya yang diserap tidak serta-merta diterapkan begitu

saja, tetapi seringkali mengalami modifikasi agar sesuai dengan kondisi lokal. Dalam setiap unsur budaya terkandung prinsip, bentuk, fungsi, dan makna tertentu; dan aspek-aspek tersebut dapat mengalami transformasi ketika unsur tersebut diadaptasi dalam konteks budaya yang baru.

2.2.1.8 Kategori Perubahan Sosial

Perubahan sosial tidak hanya mencerminkan transformasi dalam perilaku individu secara mikro, tetapi juga mencakup perubahan yang terjadi dalam sistem sosial yang lebih luas. Hal ini menunjukkan bahwa masyarakat bersifat dinamis dan tidak statis, sehingga adaptasi terhadap perubahan menjadi suatu keniscayaan. Beberapa bentuk perubahan sosial:

1. perubahan yang melekat (*immanent change*), yakni perubahan yang muncul secara alami dari dalam struktur sosial itu sendiri, tanpa adanya pengaruh signifikan dari faktor eksternal. Perubahan ini biasanya bersumber dari dinamika internal atau faktor-faktor psikologis yang terdapat dalam diri individu atau kelompok.
2. perubahan akibat kontak selektif (*selective contact change*), yaitu perubahan sosial yang dipicu oleh interaksi dengan unsur atau pengaruh dari luar masyarakat. Proses ini dapat terjadi secara tidak disadari dan berlangsung cepat, sering kali membawa gagasan-gagasan baru yang dapat mengubah pola pikir serta perilaku individu di dalam komunitas tertentu.

3. perubahan akibat kontak yang diarahkan (*directed contact change*), yaitu perubahan sosial yang berlangsung sebagai hasil dari intervensi eksternal yang bersifat terencana dan sistematis. Dalam konteks ini, ide atau pemikiran dari luar secara sengaja diperkenalkan ke dalam masyarakat, yang kemudian mendorong terjadinya perubahan dalam kehidupan sosial individu maupun kelompok secara lebih terstruktur.

2.2.1.9 Dimensi Perubahan Sosial

Dari sudut pandang kehidupan individu, perubahan sosial dapat dikategorikan ke dalam tiga aspek utama:

a. Aspek Perubahan Sosial dalam Struktur

Perubahan ini menyangkut transformasi perilaku individu yang didorong oleh faktor internal maupun eksternal. Dalam konteks ini, masyarakat mengalami bentuk perubahan yang bersifat adaptif baik secara parsial maupun menyeluruh, sehingga mendorong individu untuk mengubah cara hidupnya. Misalnya, di wilayah agraris, penerapan inovasi dalam sistem pertanian dapat mengakibatkan perubahan mendasar dalam struktur sosial masyarakat, termasuk dalam sistem pembagian peran, sumber daya, dan tata kelola komunitas.

b. Aspek Perubahan Sosial Budaya

Perubahan sosial budaya merujuk pada proses penyesuaian terhadap nilai-nilai dan sistem keyakinan yang mendasari kehidupan masyarakat. Perubahan ini dapat dipengaruhi oleh dinamika internal maupun pengaruh eksternal, seperti arus modernisasi atau pengenalan gagasan-gagasan baru. Perubahan dalam aspek ini sering kali berkaitan dengan fenomena *cultural lag*, resistensi budaya, konflik budaya, hingga kejutan budaya (*culture shock*) yang terjadi ketika nilai-nilai baru bertentangan dengan struktur budaya yang telah mapan.

c. Aspek Perubahan Sosial dalam Interaksi

Kemajuan teknologi dan inovasi yang terus berkembang turut memengaruhi pola interaksi sosial antarindividu. Keterhubungan sosial yang sebelumnya bersifat langsung kini semakin bergeser ke arah interaksi yang lebih terdistansi akibat pengaruh media dan perangkat digital. Transformasi ini tidak hanya mengubah cara individu menjalani aktivitas sehari-hari, tetapi juga memunculkan tantangan dalam bentuk pengurangan kualitas relasi sosial. Ketergantungan terhadap teknologi dalam kehidupan sehari-hari sering kali menyebabkan berkurangnya interaksi tatap muka dan menimbulkan potensi konflik atau ketegangan di ruang publik akibat disrupsi terhadap pola komunikasi tradisional.

2.2.2 *Middle Theory* – Teori Pemberdayaan

2.2.2.1 Pengertian Pemberdayaan

Pemberdayaan (*empowerment*) merepresentasikan suatu proses distribusi kekuasaan secara adil dan setara (*equitable sharing of power*) yang bertujuan untuk meningkatkan kapasitas politik, kesadaran kritis, serta posisi tawar kelompok masyarakat yang selama ini berada dalam kondisi marginal. Tujuan utamanya adalah memperkuat peran dan pengaruh kelompok tersebut dalam proses serta hasil-hasil pembangunan. Dalam praktiknya, pemberdayaan mencakup berbagai prinsip penting seperti konsultasi publik, pelimpahan sebagian kewenangan kepada masyarakat, adanya mekanisme kontrol sosial, pertukaran informasi secara terbuka, serta terbangunnya hubungan kemitraan antara masyarakat dan pihak-pihak yang berkepentingan (Hendra *et al.*, 2023). Pada dasarnya, **pemberdayaan** merupakan suatu proses pelembagaan dari *depowerment*, yaitu pengurangan dominasi kekuasaan absolut oleh otoritas negara menuju bentuk tata kelola yang lebih humanis dan berorientasi pada penghormatan terhadap hak-hak asasi manusia. Pemberdayaan masyarakat mencakup keterlibatan aktif warga dalam seluruh tahapan proses pembangunan, termasuk peningkatan kapasitas analitis dan perencanaan yang dimulai dari lingkungan lokal tempat mereka hidup

dan berkarya. Partisipasi ini menjadi fondasi penting dalam mendorong pembangunan nasional yang inklusif dan berkeadilan (Moeliono *et al.*, 1994). Upaya pelibatan masyarakat dalam proses pemberdayaan perlu diawali oleh individu atau kelompok yang memiliki kepedulian dan kesadaran akan pentingnya pengembangan potensi lokal. Dengan adanya inisiatif tersebut, masyarakat yang terlibat akan mengalami peningkatan dalam hal kompetensi, kapasitas, serta keterampilan yang dimilikinya (Citra, 2017). Menurut Kartasasmita (dalam Totok dan Soebianto, 2015), pemberdayaan dimaknai sebagai suatu proses membangun kapasitas internal masyarakat melalui upaya mendorong, memotivasi, serta menumbuhkan kesadaran akan potensi yang mereka miliki, yang selanjutnya diarahkan untuk dikembangkan. Proses ini dilanjutkan dengan penguatan kapasitas atau kekuatan yang telah ada dalam diri masyarakat. Sementara itu, Sumodiningrat (dalam Mardikanto dan Soebianto, 2015) menyatakan bahwa pemberdayaan adalah usaha memberikan peluang dan dukungan kepada kelompok masyarakat miskin agar mereka dapat memperoleh akses terhadap berbagai sumber daya, seperti modal, teknologi, informasi, serta jaminan pemasaran. Tujuannya adalah untuk meningkatkan kemampuan mereka dalam mengembangkan usaha, memperbaiki pendapatan, memperluas kesempatan kerja, dan pada akhirnya meningkatkan kualitas hidup serta kesejahteraan (Pathony, 2020) .

Secara konsep, pemberdayaan dipahami sebagai suatu proses penguatan kekuasaan yang memiliki kaitan erat dengan dinamika kekuasaan itu sendiri. Suharto (1997) menegaskan bahwa pemberdayaan hanya dapat terlaksana apabila terdapat kemungkinan terjadinya perubahan dalam struktur kekuasaan. Tanpa adanya peluang untuk perubahan tersebut, maka pemberdayaan menjadi sulit terwujud. Selain itu, kekuasaan juga perlu dipandang sebagai sesuatu yang bersifat dinamis dan dapat diperluas, bukan sebagai entitas yang statis, sehingga proses pemberdayaan dapat berjalan secara berkelanjutan dan inklusif.

Sehingga pemberdayaan diperuntukan untuk:

1. Memastikan terpenuhinya kebutuhan pokok individu atau kelompok rentan agar mereka memiliki kebebasan yang menyeluruh, tidak hanya dalam hal menyatakan pendapat, tetapi juga terbebas dari masalah seperti kelaparan, penyakit, dan kurangnya pendidikan.
2. Memberikan akses terhadap sumber-sumber produktif yang dapat membantu individu atau kelompok tersebut dalam meningkatkan penghasilan serta memperoleh barang dan jasa yang dibutuhkan untuk kehidupan yang layak.

Lebih lanjut Ife dan Tesoriero (2008) menegaskan pemberdayaan masyarakat memuat dua pengertian utama yaitu kekuasaan dan kelompok lemah. Kekuasaan disini bukan hanya diartikan dalam arti sempit namun kekuasaan atas hal-hal berikut:

1. Pilihan-pilihan personal dan kesempatan-kesempatan hidup: kemampuan dalam rangka membuat keputusan tentang gaya hidup, tempat tinggal dan pekerjaan;
2. Pendefinisian kebutuhan: kemampuan dalam rangka menentukan kebutuhan selaras dengan aspirasi dan keinginannya;
3. Ide atau gagasan: kemampuan dalam rangka mengekspresikan dan menyumbang gagasan dalam forum diskusi secara bebas dan tanpa tekanan;
4. Lembaga-lembaga: kemampuan dalam rangka menjangkau, menggunakan dan mempengaruhi pranata-pranata masyarakat;
5. Sumber-sumber: kemampuan memonilisasi sumber-sumber formal, informal, kemasyarakatan;
6. Aktivitas ekonomi: kemampuan dalam rangka pemanfaatan dan pengelolaan mekanisme produksi, distribusi dan pertukaran barang dan jasa;
7. Reproduksi: kemampuan yang berkaitan dengan proses kelahiran, merawat anak, dan pendidikan untuk anak. (Aisah dan Herdiansyah, 2020)

Dengan demikian pemberdayaan dapat dimaknai sebagai sebuah proses sekaligus tujuan. Sebagai sebuah proses, pemberdayaan merujuk pada rangkaian upaya yang bertujuan untuk meningkatkan kekuatan atau kapasitas kelompok masyarakat yang lemah, termasuk individu yang hidup dalam kondisi kemiskinan. Sementara itu, sebagai tujuan, pemberdayaan mencerminkan hasil yang diharapkan dari suatu perubahan sosial, yaitu terwujudnya masyarakat yang memiliki daya, kekuasaan, pengetahuan, serta kemampuan untuk memenuhi kebutuhan hidupnya, baik secara fisik, ekonomi, maupun sosial seperti rasa percaya diri, kemampuan menyampaikan pendapat, memiliki penghasilan, aktif dalam kegiatan sosial, serta mandiri dalam menjalani kehidupan sehari-hari.

2.2.2.2 Tujuan Pemberdayaan

Menurut Mardikanto, pemberdayaan masyarakat memiliki enam tujuan utama yang saling berkaitan.

1. Peningkatan kualitas kelembagaan (*better institution*), yang mencakup perbaikan struktur dan fungsi lembaga serta penguatan jaringan kemitraan usaha.
2. Peningkatan kualitas usaha (*better business*), di mana perbaikan dalam pendidikan, aksesibilitas, dan kelembagaan diharapkan mampu mendorong kemajuan dalam aktivitas usaha masyarakat.

3. Peningkatan pendapatan (*better income*), sebagai konsekuensi logis dari meningkatnya kualitas usaha, diharapkan pendapatan individu dan keluarga juga akan membaik.
4. Peningkatan kualitas lingkungan (*better environment*), di mana pendapatan yang meningkat diharapkan dapat mendorong perbaikan kondisi lingkungan fisik maupun sosial, mengingat kerusakan lingkungan seringkali berkaitan dengan keterbatasan ekonomi.
5. Peningkatan taraf hidup (*better living*), yaitu perbaikan pendapatan dan lingkungan yang mendukung terwujudnya kualitas hidup yang lebih baik bagi individu dan keluarga.
6. Penguatan kehidupan bermasyarakat (*better community*), yang mencerminkan kondisi sosial masyarakat yang lebih sejahtera sebagai hasil dari peningkatan kondisi hidup dan lingkungan yang lebih baik.

Menurut Sumaryadi (2005) tujuan dan sasaran pemberdayaan masyarakat adalah sebagai berikut:

1. Tujuan utama pemberdayaan masyarakat adalah untuk mendorong terwujudnya pengembangan manusia yang autentik dan menyeluruh, khususnya bagi kelompok masyarakat yang tergolong lemah, rentan, miskin, dan terpinggirkan seperti buruh tani, komunitas miskin, dan

masyarakat terbelakang. Pemberdayaan ini diarahkan untuk memperkuat kapasitas sosial dan ekonomi mereka agar mampu hidup mandiri, memenuhi kebutuhan dasar, serta berpartisipasi aktif dalam proses pembangunan masyarakat.

2. Sasaran dari program pemberdayaan masyarakat adalah tumbuhnya kesadaran dan keterlibatan aktif masyarakat dalam mendorong kemajuan dan kemandirian kolektif. Program ini bertujuan untuk meningkatkan kualitas hidup kelompok rentan melalui berbagai aktivitas seperti peningkatan pengetahuan, pendapatan, serta pengembangan usaha kecil di sektor ekonomi kerakyatan. Selain itu, program ini juga difokuskan pada peningkatan kapasitas kelompok dalam aspek keterampilan teknis dan manajerial guna mendorong produktivitas dan pendapatan yang berkelanjutan.

2.2.2.3 Prinsip-prinsip Pemberdayaan Masyarakat

Anwas (2014), mengemukakan prinsip-prinsip pemberdayaan masyarakat antara lain :

1. Pemberdayaan dilakukan dengan cara yang demokratis dan menghindari unsur paksaan yang dimana setiap individu mempunyai hak yang sama untuk berdaya.

2. Kegiatan pemberdayaan didasarkan pada kebutuhan, masalah, dan potensi klien atau sasaran yang mana setiap manusia mempunyai kebutuhan dan potensi dalam dirinya.
3. Sasaran pemberdayaan adalah subjek atau pelaku yang dalam kegiatan pemberdayaan yang mana sasaran harus menjadi pertimbangan dalam menentukan tujuan, pendekatan, dan bentuk aktivitas pemberdayaan.
4. Pemberdayaan mempunyai makna menumbuhkan kembali nilai-nilai, budaya, dan kearifan-kearifan lokal yang memiliki nilai luhur dalam masyarakat. Seperti menghormati orang yang lebih tua, gotong royong dan yang lainnya.
5. Pemberdayaan merupakan sebuah proses yang memerlukan waktu yang relatif, sehingga dilakukan secara bertahap dan berkesinambungan.
6. Kegiatan pendampingan atau pembinaan perlu dilakukan secara bijaksana, bertahap, dan berkesinambungan.
7. Pemberdayaan tidak bisa dilakukan hanya dari satu aspek saja melainkan perlu dilakukan secara holistik terhadap semua aspek kehidupan yang ada di dalam masyarakat.
8. Pemberdayaan perlu dilakukan kepada kaum perempuan karena menjadi potensi yang besar dalam menopang kualitas kehidupan berkeluarga dan pengentasan kemiskinan.

9. Pemberdayaan dilakukan agar masyarakat memiliki kebiasaan untuk terus belajar yang mana individu ataupun masyarakat perlu dibiasakan belajar menggunakan sumber daya yang tersedia.
10. Pemberdayaan perlu memperhatikan adanya keragaman budaya yang mana diperlukan berbagai metode dan pendekatan pemberdayaan sesuai dengan kondisi masyarakat setempat.
11. Pemberdayaan diarahkan untuk mengerakkan partisipasi aktif individu dan masyarakat seluas-luasnya yang mana partisipasi ini dimulai dengan tahap perencanaan, pengembangan, pelaksanaan, evaluasi, termasuk partisipasi dalam menikmati hasil dan aktivitas pemberdayaan.
12. Sasaran pemberdayaan perlu ditumbuhkan jiwa kewirausahaan sebagai bekal menuju kemandirian masyarakat.
13. Petugas pemberdayaan yang melaksanakan pemberdayaan harus memiliki kompetensi yang memadai dan dapat mengikuti perkembangan zaman dan tuntutan masyarakat.
14. Pemberdayaan perlu melibatkan berbagai pihak yang ada terkait dalam masyarakat yang mana meliputi: unsur pemerintah, tokoh-tokoh setempat, pengusaha, relawan, masyarakat setempat dan yang lainnya.

Terdapat empat prinsip pemberdayaan masyarakat menurut Wahyuni (2019) yaitu :

1. Prinsip Kesenjangan

Prinsip utama yang harus dipegang dalam proses pemberdayaan masyarakat adalah adanya kesetaraan atau kesejajaran kedudukan anatar masyarakat dengan lembaga yang melakukan program – program pemberdayaan masyarakat, baik laki – laki maupun perempuan. Dinamika yang dibangun adalah hubungan kesetaraan dengan mengembangkan mekanisme berbagai pengetahuan, serta keahlian satu sama lain. Masing – masing saling mengakui kelebihan dan kekurangan sehingga terjadi proses saling belajar.

2. Prinsip Partisipasi Program pemberdayaan yang dapat menstimulasi kemandirian masyarakat adalah program yang sifatnya partisipatif, direncanakan, dilaksanakan, diawasi dan dievaluasi oleh masyarakat. Namun, untuk sampai pada tingkat tersebut perlu waktu dan proses pendampingan yang melibatkan pendamping yang berkomitmen tinggi terhadap pemberdayaan masyarakat.

3. Prinsip Keswadayaan atau Kemandirian Prinsip keswadayaan adalah menghargai dan mengedepankan kemampuan masyarakat daripada bantuan pihak lain. Konsep ini tidak

memandang orang miskin sebagai objek yang tidak berkemampuan (*the have not*), melainkan sebagai subjek yang memiliki kemampuan sedikit (*the have little*). Mereka memiliki kemampuan untuk menabung, pengetahuan yang mendalam tentang kendala-kendala usahanya, mengetahui kondisi lingkungannya, memiliki tenaga kerja dan kemauan, mengetahui kondisi lingkungannya, memiliki tenaga kerja dan kemampuan, serta memiliki norma-norma bermasyarakat yang sudah lama dipatuhi. Semua itu harus digali dan dijadikan modal dasar bagi proses pemberdayaan. Bantuan dari orang lain, sehingga pemberian bantuan tidak justru melemahkan tingkat keswadayaan.

4. Prinsip Berkelanjutan Program pemberdayaan perlu dirancang untuk berkelanjutan, sekalipun pada awalnya peran pendamping lebih dominan dibanding masyarakat sendiri. Tapi secara perlahan dan pasti, peran pendampingan akan makin berkurang, bahkan akhirnya dihapus, karena masyarakat sudah mampu mengelola kegiatannya sendiri.

2.2.2.4 Strategi Pemberdayaan Masyarakat

Strategi adalah cara untuk mengerahkan tenaga, dana, daya dan peralatan yang dimiliki guna mencapai tujuan yang ditetapkan. Arti pemberdayaan masyarakat itu sendiri adalah suatu proses yang mengembangkan dan memperkuat kemampuan masyarakat untuk terus terlibat dalam proses pembangunan yang berlangsung secara dinamis sehingga masyarakat dapat menyelesaikan masalah yang dihadapi serta dapat mengambil keputusan secara bebas (*independent*) dan mandiri. Terdapat tiga strategi utama pemberdayaan masyarakat yang dijelaskan oleh (Hikmat dan Harry, 2006), yaitu :

- a. Strategi tradisional. Strategi ini menyarankan agar masyarakat mengetahui dan memilih kepentingan terbaik secara bebas dalam berbagai keadaan. Dengan kata lain semua pihak bebas menentukan kepentingan bagi kehidupan mereka sendiri dan tidak ada pihak lain yang mengganggu kebebasan setiap pihak.
- b. Strategi *direct-action*. Strategi ini membutuhkan dominasi kepentingan yang dihormati oleh semua pihak yang terlibat, dipandang dari sudut perubahan yang mungkin terjadi. Pada strategi ini, ada pihak yang sangat berpengaruh dalam membuat keputusan.

- c. Strategi Transformatif. Strategi ini menunjukkan bahwa pendidikan massa dalam jangka panjang dibutuhkan sebelum pengidentifikasian kepentingan diri sendiri.

2.2.2.5 Tahapan Pemberdayaan Masyarakat

Pemberdayaan masyarakat tidak bersifat selamanya dengan kata lain pemberdayaan masyarakat berlangsung melalui suatu proses belajarang dilakukan secara bertahap hingga masyarakat mencapai kemandirian. Menurut Ambar Teguh (Muslim, 2012), menyatakan bahwa tahap – tahap yang harus dilalui tersebut adalah :

- a. Tahap penyadaran dan pembentukan perilaku menuju perilaku sadar dan peduli sehingga merasa membutuhkan peningkatan kapasitas diri. Tahap pertama adalah tahap penyadaran dan pembentukan perilaku merupakan tahap persiapan dalam proses pemberdayaan masyarakat. Pada tahap ini pihak pemberdayaan atau aktor pelaku pemberdayaan berusaha menciptakan prakondisi, supaya dapat memfasilitasi berlangsungnya proses pemberdayaan masyarakat yang efektif.
- b. Tahap transformasi kemampuan berupa wawasan pengetahuan. Kecakapan keterampilan agar terbuka wawasan dan memberikan keterampilan dasar sehingga dapat mengambil

peran di dalam pembangunan. Tahap kedua atau tahap tranformasi kemampuan yaitu proses mentransformasikan pengetahuan dan kecakapan keterampilan. Proses tersebut dapat berlangsung baik, penuh semangat dan berjalan efektif jika tahap pertama telah terkondisi. Pada tahap ini masyarakat hanya dapat memberikan peran partisipasi pada tingkat yang rendah, yaitu sekedar menjadi pengikut atau objek pembangunan saja, belum pada taraf objek.

- c. Tahap peningkatan kemampuan intelektual, kecakapan, keterampilan sehingga terbentuklah inisiatif dan kemampuan inovatif untuk mengantarkan pada kemandirian. Tahap ketiga atau tahap peningkatan intelektual dan kecakapan – keterampilan merupakan tahap yang diperlukan agar masyarakat dapat membentuk kemampuan masyarakat di dalam membentuk inisiatif, melahirkan kreasi – kreasi, dan melakukan inovasi – inovasi di dalam lingkungannya. Apabila masyarakat dapat secara mandiri melakukan pembangunan, masyarakat pada kondisi ini ditempatkan sebagai subjek pembangunan atau pemeran utama, pemerintah hanya dapat menjadi fasilitator saja.

Menurut Tim Delivery (2004) dalam (Rully Fajar, 2019) tahap dalam pemberdayaan masyarakat yaitu :

a. Tahap Seleski lokasi atau wilayah

Pemilihan wilayah didasarkan dengan standar yang disepakati bersama lembaga, masyarakat, dan pihak terkait serta menentukan pemilihan tempat atau lokasi dengan maksimal sehingga tujuan tersebut dapat memenuhi sesuai keinginan.

b. Tahap Sosialisasi pemberdayaan masyarakat

Sosialisasi, berperan mengkomunikasikan kegiatan dalam mencapai pemahaman dengan masyarakat. Dengan sosialisasi akan sangat membantu meningkatkan pemahaman masyarakat dan pihak terkait terhadap program dan atau kegiatan pemberdayaan masyarakat yang telah direncanakan. Proses sosialisasi sangat penting karena akan menentukan partisipasi masyarakat dalam pertukaran minat dan terhadap program pemberdayaan.

c. Tahap Proses pemberdayaan masyarakat

Hakekat pemberdayaan masyarakat adalah untuk meningkatkan taraf hidupnya. Dalam proses tersebut bersama-sama melakukan identifikasi dan mengkaji potensi. Hal ini dimaksud agar masyarakat mampu dan percaya diri dalam mengidentifikasi serta menganalisa keadaanya, baik potensi maupun permasalahannya. Menyusun rencana kegiatan kelompok yang meliputi : (1) Mengutamakan dan menganalisa masalah-masalah, (2) Identifikasi alternatif pemecahan

masalah yang terbaik, (3) Identifikasi sumberdaya yang tersedia untuk pemecahan masalah, (4) Pengembangan rencana kegiatan serta pengorganissian pelaksanaannya. Menerapkan rencana kegiatan kelompok. Rencana yang telah disusun bersama dengan dukungan fasilitasi dari pendamping selanjutnya diimplemntasikan dalam kegiatan yang kongkrit dengan tetap memperhatikan realisasi rencana awal. Memantau proses hasil kegiatan secara menerus secara partisipasi.

d. Tahap Pemandirian masyarakat

Berpegang pada prinsip berupa pendampingan untuk menyiapkan masyarakat agar benar-benar mampu mengelola kegiatannya, yang bertujuan untuk memandirikan masyarakat dan meningkatkan taraf hidupnya, supaya masyarakat bisa mandiri.

2.2.2.6 Upaya Memberdayakan Mayarakat

Menurut Kartasasmita (1996) upaya memberdayakan masyarakat harus dilakukan dengan 3 (tiga) cara, yaitu :

- a. Menciptakan suasana atau iklim yang memungkinkan potensi masyarakat berkembang (enabling). Artinya, bahwa setiap manusia, setiap masyarakat, memiliki potensi yang dapat

dikembangkan. Artinya, tidak masyarakat yang sama sekali tanpa daya karena, kalau demikian akan sudah punah. Pemberdayaan merupakan upaya untuk membangun daya itu dengan mendorong, memotivasi dan membangkitkan kesadaran akan potensial yang dimilikinya serta berupaya untuk mengembangkannya.

- b. Memperkuat potensi atau daya yang dimiliki oleh masyarakat (empowering). Dalam hal ini perlu dilakukan langkah lebih positif selain dari hanya menciptakan iklim dan suasana. Perkuatan ini menyangkut langkah nyata dan menyangkut penyediaan berbagai masukan, serta pembukaan akses kepada berbagai peluang yang akan membuat masyarakat menjadi makin berdaya. Dalam rangka pemberdayaan ini, upaya yang amat pokok adalah peningkatan tarap pendidikan, dan derajat kesehatan, serta akses kepada sumber-sumber kemajuan ekonomi seperti modal, teknologi, informasi, lapangan kerja, dan pasar. Pemberdayaan ini menyangkut pembangunan prasarana dan sarana dasar baik fisik, seperti irigasi, jalan, listrik, maupun sosial seperti sekolah, dan fasilitas pelayanan seperti kesehatan, yang dapat diakses oleh masyarakat pada lapisan paling bawah, serta ketersediaan lembaga-lembaga pendanaan, pelatihan, dan pemasaran diperdesaan tempat terkontrasinya penduduk yang keberadaannya amat kurang.

Untuk itu, perlu ada program khusus bagi masyarakat yang kurang berdaya, karena program-programnya yang umum yang berlaku untuk semua tidak selalu dapat menyentuh lapisan masyarakat ini.

- c. Memberdayakan mengandung pula arti melindungi (*protecting*). Dalam proses pemberdayaan, harus dicegah yang lemah menjadi bertambah lemah, karena kurang berdaya dalam menghadapi yang kuat oleh karena itu, dalam konsep pemberdayaan masyarakat, perlindungan dan pemihakan kepada yang lemah sangat diperlukan. Melindungi berarti tidak mengisolasi atau menutupi dari interaksi karena hal itu justru akan mengredilkan yang kecil dan melunglaikan yang lemah. Melindungi harus dilihat sebagai upaya untuk mencegah terjadinya persaingan yang tidak seimbang, serta eksploitasi yang kuat atas yang lemah. Pemberdayaan masyarakat bukan membuat masyarakat menjadi makin tergantung pada berbagai program pemberian karena pada dasarnya setiap apa yang dinikmati harus dihasilkan atas usaha sendiri, dan hasilnya dapat dipertukarkan dengan pihak lain.

2.2.2.7 Dimensi Pemberdayaan Masyarakat

Dimensi pemberdayaan masyarakat menurut Effendy (2020) mengandung makna tiga pengertian yaitu *enabling*, *empowering*, dan *maintaining* sebagai berikut :

- a. *Enabling*, diartikan sebagai terciptanya iklim yang mampu mendorong berkembangnya potensi masyarakat. Tujuannya agar masyarakat yang bersangkutan mampu mandiri dan berwawasan yang berkesinambungan.
- b. *Empowering*, mengandung pengertian bahwa potensi yang dimiliki oleh masyarakat lebih diperkuat lagi. Pendekatan yang ditempuh adalah dengan cara meningkatkan skill dan kemampuan manajerial.
- c. *Maintaining*, merupakan kegiatan pemberdayaan yang bersifat protektif, potensi masyarakat yang lemah dalam segala hal perlu adanya perlindungan secara seimbang agar persaingan yang terbentuk berjalan secara sehat.

2.2.3 Applied Theory – Teori Community Best Tourism (CBT)

2.2.3.1 Pengertian Community Best Tourism (CBT)

Community Based Tourism (CBT) merupakan pendekatan pengembangan destinasi wisata yang menitikberatkan pada pemberdayaan masyarakat lokal dengan melibatkan mereka secara

aktif dalam proses perencanaan, pengelolaan, dan pengembangan kawasan wisata. Suansari (2003) menjelaskan bahwa CBT adalah bentuk pengembangan pariwisata yang berlandaskan pada prinsip keberlanjutan lingkungan, sosial, dan budaya. Dalam konsep ini, pengelolaan wisata dilakukan oleh masyarakat, berasal dari masyarakat, dan ditujukan untuk kepentingan masyarakat itu sendiri. Wisatawan yang berkunjung diharapkan tidak hanya menikmati objek wisata, tetapi juga memperoleh pemahaman mengenai kehidupan dan budaya masyarakat setempat secara langsung. CBT mengedepankan peran komunitas sebagai aktor utama dalam pengelolaan dan promosi daya tarik wisata berbasis budaya lokal. Pendekatan ini memberi peluang bagi masyarakat untuk menjadi pelaku usaha pariwisata, sehingga dapat membuka lapangan kerja, meningkatkan pendapatan, dan mengurangi kemiskinan melalui berbagai layanan wisata seperti jasa pemandu, akomodasi homestay, serta penjualan produk kerajinan dan lainnya (Anggriani *et al.*, 2023).

Suansri (2003) mengemukakan bahwa munculnya paradigma baru dalam pengembangan pariwisata bertujuan untuk menjaga keberlanjutan sektor pariwisata itu sendiri. Dalam kerangka tersebut, terdapat sejumlah prinsip dasar dalam penerapan CBT yang harus diperhatikan, antara lain: (1) memberikan pengakuan serta mendorong keterlibatan komunitas dalam kepemilikan industri pariwisata; (2)

memastikan partisipasi aktif anggota masyarakat dalam setiap tahap perencanaan dan pelaksanaan kegiatan; (3) membangun rasa bangga terhadap komunitas; (4) meningkatkan kualitas hidup masyarakat lokal; (5) menjaga kelestarian lingkungan alam; (6) melestarikan identitas dan warisan budaya lokal; (7) memfasilitasi proses pembelajaran melalui pertukaran budaya antar pihak; (8) menghormati keberagaman budaya dan martabat setiap individu; (9) menjamin distribusi manfaat ekonomi secara merata kepada seluruh anggota komunitas; dan (10) memberi peran kepada komunitas dalam menentukan mekanisme pembagian pendapatan dari proyek-proyek wisata yang dilaksanakan. Menurut Hausler, CBT merupakan pendekatan dalam pembangunan pariwisata yang berfokus pada keterlibatan aktif masyarakat lokal, baik yang terlibat langsung maupun tidak dalam industri pariwisata. Pendekatan ini memberikan akses yang luas bagi masyarakat untuk turut serta dalam proses manajemen dan pengembangan sektor pariwisata. Tujuan utamanya adalah menciptakan pemberdayaan politik melalui kehidupan sosial yang lebih demokratis, termasuk dalam hal distribusi manfaat ekonomi secara lebih adil kepada masyarakat setempat. Hausler mengemukakan pandangan ini sebagai bentuk kritik terhadap model pembangunan pariwisata konvensional yang kerap mengabaikan hak-hak komunitas lokal di wilayah destinasi wisata (Nurhidayati, 2012).

CBT merupakan suatu pendekatan dalam pengembangan pariwisata yang menitikberatkan pada partisipasi aktif masyarakat lokal dalam seluruh tahapan kegiatan pariwisata, mulai dari proses perencanaan, pelaksanaan, hingga pengelolaan destinasi. Pendekatan ini bertujuan untuk memastikan bahwa masyarakat setempat tidak hanya menjadi objek, tetapi juga subjek utama dalam pembangunan pariwisata di wilayahnya. (Ghasemi *et al.*, 2023). CBT bertujuan untuk menjamin agar manfaat yang dihasilkan dari aktivitas pariwisata baik dalam aspek ekonomi, sosial, maupun lingkungan dapat secara langsung dinikmati oleh masyarakat lokal. Konsep ini didasarkan pada prinsip pembangunan berkelanjutan, penguatan kapasitas masyarakat, serta perlindungan terhadap nilai-nilai budaya dan kelestarian lingkungan. (Krittayaruangroj *et al.*, 2023). Dalam implementasinya, CBT mengintegrasikan partisipasi aktif masyarakat dalam proses pengambilan keputusan, peningkatan kapasitas melalui pelatihan keterampilan, serta penciptaan peluang kerja. Dengan demikian, masyarakat memegang peranan penting dalam pengelolaan dan pengembangan destinasi pariwisata (Ngo dan Creutz, 2022). CBT berperan sebagai instrumen strategis dalam upaya pengentasan kemiskinan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat lokal. Melalui keterlibatan langsung masyarakat dalam aktivitas kepariwisataan, konsep ini mampu membuka peluang kerja serta mendorong pertumbuhan usaha mikro, kecil, dan menengah yang mendukung

sektor pariwisata. Di samping itu, CBT turut memfasilitasi pelestarian budaya dan tradisi lokal dengan menjadikan unsur-unsur tersebut sebagai atraksi wisata, yang pada gilirannya memperkuat penghargaan terhadap identitas budaya lokal serta memperluas pemahaman dan toleransi lintas budaya (Abreu *et al.*, 2024). CBT menuntut pendekatan yang partisipatif dan inklusif, di mana masyarakat lokal diposisikan sebagai aktor utama yang memiliki kapasitas dan kewenangan dalam pengelolaan sumber daya pariwisata secara mandiri. Keberhasilan pengembangan CBT sangat ditentukan oleh tingkat partisipasi dan komitmen komunitas, dukungan dari pemerintah maupun lembaga non-pemerintah, serta pendekatan terpadu dalam pembangunan pariwisata yang berkelanjutan. Oleh karena itu, pelaksanaan strategi CBT umumnya melibatkan kolaborasi multisektor dan lintas pemangku kepentingan guna menciptakan sistem pariwisata yang memberikan manfaat secara merata bagi seluruh pihak terkait (Park dan Kohler, 2018).

CBT merupakan suatu pendekatan dalam pengelolaan kepariwisataan yang menempatkan partisipasi aktif masyarakat sebagai elemen utama, dengan tujuan utama meningkatkan kesejahteraan masyarakat lokal tanpa mengesampingkan pelestarian lingkungan serta perlindungan terhadap nilai-nilai sosial dan budaya setempat. Konsep ini sejalan dengan prinsip-prinsip pariwisata berkelanjutan (*sustainable tourism*)

yang menekankan pentingnya keterlibatan masyarakat dalam seluruh tahapan pengembangan pariwisata. CBT menggunakan pendekatan bottom-up, di mana inisiatif berasal dari komunitas lokal, sementara pariwisata berkelanjutan cenderung menerapkan pendekatan top-down yang lebih banyak digerakkan oleh kebijakan dan regulasi dari otoritas yang lebih tinggi (Habibi *et al.*, 2024). Pendekatan bottom-up merujuk pada proses pengembangan pariwisata yang dimulai dari inisiatif masyarakat lokal, sedangkan pendekatan top-down menunjuk pada inisiatif yang didorong oleh pemerintah atau otoritas yang lebih tinggi. Implementasi pariwisata berbasis masyarakat dinilai mampu memberikan berbagai manfaat signifikan bagi komunitas lokal, antara lain peningkatan taraf kesejahteraan, pelestarian lingkungan, serta perlindungan terhadap struktur sosial dan nilai-nilai budaya yang dimiliki masyarakat.

Peluang keterlibatan masyarakat dalam pengelolaan sektor pariwisata tercantum secara eksplisit dalam Pasal 19 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataan, yang menyatakan bahwa individu dan/atau masyarakat yang berada di dalam atau sekitar kawasan destinasi pariwisata memiliki hak prioritas dalam hal: (a) keterlibatan sebagai pekerja atau buruh, (b) konsinyasi, dan/atau (c) pengelolaan destinasi wisata. Ketentuan ini menegaskan bahwa masyarakat lokal harus diberi peran utama dalam kegiatan pengelolaan kepariwisataan.

Kesempatan ini sebaiknya dimanfaatkan secara optimal oleh masyarakat untuk mendorong peningkatan kesejahteraan. Hal ini sejalan dengan prinsip CBT, yang menempatkan masyarakat bukan hanya sebagai objek, melainkan juga sebagai subjek dalam pembangunan pariwisata. Selain itu, pendekatan CBT juga membuka peluang terbentuknya jejaring antar sektor terkait, menciptakan pasar bagi produk-produk wisata lokal, mendukung pemerataan pembangunan, memperluas diversifikasi ekonomi, mengurangi ketergantungan terhadap sektor tunggal, serta memperluas akses terhadap lapangan pekerjaan dan sumber penghasilan masyarakat. (Suasapha, 2016).

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa CBT merupakan sebuah pendekatan pengembangan pariwisata yang menitikberatkan pada keterlibatan aktif masyarakat dalam seluruh aktivitas kepariwisataan, mulai dari proses pengambilan keputusan hingga pembagian manfaat ekonomi yang dihasilkan, khususnya pendapatan langsung dari kunjungan wisatawan. Melalui mekanisme ini, CBT berpotensi menciptakan lapangan kerja, menanggulangi kemiskinan, serta memberikan kontribusi positif terhadap pelestarian lingkungan dan budaya lokal. Dampak tersebut diharapkan dapat mendorong tumbuhnya identitas serta kebanggaan masyarakat terhadap wilayahnya. Dengan kata lain, CBT adalah bentuk nyata dari

penerapan konsep ekonomi kerakyatan dalam sektor pariwisata, di mana masyarakat menjadi pelaku utama sekaligus penerima langsung manfaat dari kegiatan tersebut.

Pemilihan teori CBT dalam penelitian ini didasarkan pada karakteristik sosial dan potensi lokal yang dimiliki oleh Desa Tanjung Anom, khususnya kawasan embung yang sedang dikembangkan menjadi destinasi wisata. Teori CBT memandang pariwisata sebagai instrumen pembangunan yang menempatkan masyarakat lokal sebagai pelaku utama dalam perencanaan, pengelolaan, dan pemanfaatan manfaat ekonomi serta sosial dari sektor pariwisata. Konsep ini menjadi relevan mengingat kondisi Embung Tanjung Anom yang terletak di wilayah perdesaan dengan struktur sosial yang masih kuat, serta tingginya ketergantungan masyarakat terhadap sumber daya lokal sebagai bagian dari aktivitas keseharian. Lebih lanjut, kawasan ini belum tersentuh secara masif oleh investasi eksternal, sehingga memberikan peluang besar untuk membangun model pengembangan pariwisata yang bersifat partisipatif dan berbasis kearifan lokal. Dalam konteks tersebut, teori CBT memberikan kerangka analisis yang tepat untuk memahami bagaimana masyarakat dapat diberdayakan melalui kegiatan pariwisata yang berkelanjutan, tanpa kehilangan kendali atas sumber daya yang mereka miliki. Selain itu, CBT menekankan pentingnya keberlanjutan lingkungan dan pelestarian budaya lokal

sebagai bagian integral dari strategi pengembangan wisata, yang sangat relevan dalam menjaga fungsi utama embung sebagai infrastruktur pengairan sekaligus kawasan edukatif. Dengan demikian, penggunaan teori CBT dalam penelitian ini tidak hanya sejalan dengan tujuan pemberdayaan masyarakat dan pembangunan berkelanjutan, tetapi juga mendukung upaya pemerintah daerah dalam mendorong pengembangan desa wisata berbasis potensi endogen. Kerangka ini memungkinkan penelitian untuk merumuskan strategi yang aplikatif dan kontekstual dalam pengembangan Embung Tanjung Anom sebagai destinasi wisata berbasis komunitas.

2.2.3.2 Prinsip *Community Best Tourism (CBT)*

Menurut Russel (2018) CBT merupakan suatu konsep yang memperhatikan adanya keberlanjutan ekonomi, memperhatikan masyarakat disekitarnya dan terus tetap menjaga keutuhan budaya agar tidak dapat berubah maupun bercampur dengan budaya lainnya. Oleh karena itu CBT harus memenuhi kriteria:

- 1) Memberikan keuntungan ekonomi kepada masyarakat setempat;
- 2) Mendapatkan dorongan dan pelibatan masyarakat setempat;
- 3) Tetap terus menjaga kemurnian budaya dan keutuhan lingkungan.

Kemudian menurut Suansari (2003) dalam gagasannya prinsip CBT meliputi:

- 1) Mengikutsertakan anggota komunitas dalam memulai setiap aspek;
- 2) Memperhatikan keberlanjutan lingkungan;
- 3) Mendistribusikan pendapatan kepada masyarakat.

Tiga prinsip *Community Based Tourism* (CBT) menurut Sunaryo, 2013:

1. Mengikutsertakan masyarakat dalam pengambilan keputusan.
2. Adanya kepastian masyarakat lokal menerima manfaat dari kegiatan pariwisata.
3. Pendidikan kepariwisataan bagi masyarakat lokal.

Kemudian prinsip CBT menurut *United Environment* (UNEP) dan *World Trade Organization* (WTO) adalah sebagai berikut:

- 1) Mengikutsertakan anggota komunitas dalam memulai setiap aspek;
- 2) Memperhatikan keberlanjutan lingkungan;
- 3) Mempertahankan keunikan karakter dan budaya di area lokal;
- 4) Berperan dalam menentukan prosentase pendapatan (pendistribusian pendapatan) kepada masyarakat.

Selanjutnya, terdapat juga prinsip yang dikemukakan oleh *Nederland Development Organization* (SNV) mengemukakan 4 prinsip CBT yaitu:

- 1) Ekonomi berkelanjutan. Mampu memberikan keuntungan ekonomi yang dapat dirasakan oleh masyarakat setempat.
- 2) Keberlanjutan lingkungan. Prinsip keberlanjutan lingkungan ini berkaitan dengan bagaimana agar tetap terjaga keutuhan lingkungan destinasi wisata.
- 3) Masyarakat dapat ikut serta dalam pengambilan keputusan.
- 4) Selain tetap terus menjaga keberlanjutan lingkungan, harus tetap mempertahankan budaya agar tidak tercampur dengan budaya lain.

2.2.3.3 Unsur-unsur dalam pengembangan CBT

Indikator Pengembangan CBT Rest (1997) mengelompokkan poin-poin yang merupakan aspek utama pengembangan yang meliputi 5 dimensi (Anggriani *et al.*, 2023).



Gambar 1. Aspek Utama Pengembangan CBT

Berdasarkan gambar aspek-aspek utama CBT diatas, maka dapat dijelaskan secara lebih rinci indikator capaian dari dimensi/aspek utama CBT sebagai berikut:

Tabel 2. indikator capaian CBT

No	Dimensi	Indikator
1	Ekonomi	• Adanya pengembangan komunitas • Terciptanya lapangan pekerjaan • Adanya pendapatan masyarakat dari sector pariwisata
2	Sosial	• Meningkatkan kualitas hidup • Menanamkan rasa bangga terhadap desanya • Pembagian tugas antara laki-laki dan perempuan • Generasi muda dan tua • Membangun kekuatan oraganisasi komunitas
3	Politik	• Meningkatkan partisipasi penduduk lokal • Menjamin hak-hak pengelola SDA • Peningkatan kekuasaan komunitas yang lebih luas
4	Budaya	• Mendorong masyarakat menghormati budaya • Membantu berkembangnya pertukaran budaya • Budaya pembangunan melekat erat dengan budaya lokal
5	Lingkungan	• Mengelola pembuangan sampah • Meningkatkan kepedulian akan pentingnya konservasi

Sumber: Rest (1997)

Menurut Suasari (2003) aspek utama pengembangan CBT berupa 5 dimensi, yaitu:

- 1) Dimensi ekonomi, dengan indikator berupa adanya dana untuk pengembangan komunitas, terciptanya lapangan pekerjaan di sektor pariwisata, timbulnya pendapatan masyarakat lokal dari sektor pariwisata;
 - 2) Dimensi sosial dengan indikator meningkatnya kualitas hidup, peningkatan kebanggaan komunitas, pembagian peran yang adil antara laki-laki perempuan, generasi muda dan tua, mem-bangun penguatan organisasi komunitas;
 - 3) Dimensi budaya dengan indikator berupa mendorong masyarakat untuk menghormati budaya yang berbeda, membantu berkembangnya pertukaran budaya, budaya pembangunan melekat erat dalam udaya lokal;
 - 4) Dimensi lingkungan, dengan indikator mempelajari *carrying capacity area*, mengatur pembuangan sampah, meningkatkan kepedulian akan perlunya konservasi;
 - 5) Dimesi politik, dengan indikator: meningkatkan partisipasi dari penduduk lokal, peningkatan kekuasaan komunitas yang lebih luas, menjamin hak-hak dalam pengelolaan SDA
- (Nurhidayati, 2012)

Penelitian lain mengungkapkan bahwa unsur-unsur pengembangan pariwisata berbasis CBT adalah sebagai berikut (Irawati dan Prakoso, 2016):

1. Aman

Tujuan : Menciptakan lingkungan yang aman bagi wisatawan dan berlangsungnya kegiatan kepariwisataan, sehingga wisatawan tidak merasa cemas dan dapat menikmati kunjungannya ke suatu destinasi wisata.

Bentuk Aksi : Tidak mengganggu kenyamanan wisatawan dalam kunjungannya; Menolong dan melindungi wisatawan; Bersahabat terhadap wisatawan; Memelihara keamanan lingkungan; Membantu memberi informasi kepada wisatawan; Menjaga lingkungan yang bebas dari bahaya penyakit menular; Meminimalkan resiko kecelakaan dalam penggunaan fasilitas publik.

2. Tertib

Tujuan : Menciptakan lingkungan yang tertib bagi berlangsungnya kegiatan kepariwisataan yang mampu memberikan layanan teratur dan efektif bagi wisatawan.

Bentuk Aksi : Mewujudkan budaya antri; Memelihara lingkungan dengan mentaati peraturan yang berlaku; Disiplin waktu/tepat waktu; Serba teratur, rapi dan lancer; Semua sisi

kehidupan berbangsa dan bermasyarakat menunjukkan keteraturan yang tinggi.

3. Bersih

Tujuan : Menciptakan lingkungan yang bersih bagi berlangsungnya kegiatan kepariwisataan yang mampu memberikan layanan higienis bagi wisatawan.

Bentuk Aksi : Tidak membuang sampah/ imbah sembarangan ; Turut menjaga kebersihan sarana dan lingkungan objek dan daya tarik wisata; Menyiapkan sajian makanan dan minuman yang higienis; Menyiapkan perlengkapan penyajian makanan dan minuman yang bersih; Pakaian dan penampilan petugas bersih dan rapi.

4. Sejuk

Tujuan : Menciptakan lingkungan yang nyaman bagi berlangsungnya kegiatan kepariwisataan yang mampu menawarkan suasana yang nyaman dan rasa “betah” bagi wisatawan, sehingga mendorong lama tinggal dan kunjungan yang lebih panjang.

Bentuk Aksi : Melaksanakan penghijauan dengan menanam pohon; Memelihara penghijauan di objek dan daya tarik wisata serta jalur wisata; Menjaga kesejukan ruangan umum, hotel, penginapan, restoran dan alat transportasi dan tempat lainnya.

5. Indah

Tujuan : Menciptakan lingkungan yang indah bagi berlangsungnya kegiatan kepariwisataan yang mampu menawarkan suasana yang menarik dan menumbuhkan kesan yang mendalam bagi wisatawan, sehingga mendorong promosi ke kalangan/ pasar yang lebih luas dan potensi kunjungan ulang.

Bentuk Aksi : Menjaga keindahan objek dan daya tarik wisata dalam tatanan yang alami dan harmoni; Menata tempat tinggal dan lingkungan secara teratur, tertib dan serasi serta menjaga karakter kelokalan ; Menjaga keindahan vegetasi, tanaman hias dan peneduh sebagai elemen estetika lingkungan yang bersifat natural.

6. Ramah

Tujuan : Menciptakan lingkungan yang ramah bagi berlangsungnya kegiatan kepariwisataan yang mampu menawarkan suasana yang akrab, bersahabat serta seperti di "rumah sendiri" bagi wisatawan, sehingga mendorong minat kunjungan ulang dan promosi yang positif bagi prospek pasar yang lebih luas.

Bentuk Aksi : Bersikap sebagai tuan rumah yang baik dan rela membantu wisatawan ; Memberi informasi tentang adat istiadat secara sopan; Menampilkan sikap dan perilaku yang

terpuji; Menampilkan senyum dan keramah-tamahan yang tulus.

7. Kenangan

Tujuan : Menciptakan memori yang berkesan bagi wisatawan, sehingga pengalaman perjalanan / kunjungan wisata yang dilakukan dapat terus membekas dalam benak wisatawan, dan menumbuhkan motivasi untuk kunjungan ulang.

Bentuk Aksi : Menggali dan mengangkat keunikan budaya lokal; Menyajikan makanan dan minuman khas lokal yang bersih, sehat dan menarik; Menyediakan cinderamata yang menarik, unik/ khas serta mudah (Irawati dan Prakoso, 2016).

2.2.3.4 Cakupan *Community Based Tourism CBT*

1. Pengembangan Berbasis Sumber Daya Lokal

Menurut Mardikanto (2013), pengembangan yang berorientasi pada masyarakat harus mencakup pemanfaatan sumber daya lokal. Sumber daya lokal merujuk pada berbagai potensi yang tersedia dan berasal dari lingkungan masyarakat itu sendiri, yang dapat dimanfaatkan dalam berbagai aktivitas seperti produksi, peningkatan nilai tambah, serta program pemberdayaan guna meningkatkan kualitas hidup masyarakat secara lahir batin maupun spiritual.

Pemanfaatan sumber daya lokal penting dilakukan untuk dua tujuan utama:

- a. Mencegah ketergantungan terhadap pihak eksternal, yang dapat menciptakan pola pikir pasif atau mental ketergantungan, dan
- b. Menjamin keberlanjutan kegiatan pemberdayaan dalam jangka panjang.

Wibowo (2013) menambahkan bahwa pengembangan berbasis sumber daya lokal adalah bentuk pemberdayaan yang tumbuh dari inisiatif masyarakat itu sendiri dan dikelola secara mandiri oleh komunitas. Ciri-cirinya mencakup:

- a. Masyarakat memiliki inisiatif dan mengambil keputusan sendiri secara bertahap untuk memenuhi kebutuhannya,
- b. Fokus pada peningkatan kapasitas komunitas dalam mengelola dan menggerakkan sumber daya lokal,
- c. Toleransi terhadap keberagaman lokal,
- d. Mendorong proses belajar bersama antara masyarakat dan birokrasi dalam setiap tahapan kegiatan, serta
- e. Membangun jaringan antara komunitas, lembaga.

2. Pengembangan Berbasis Modal Sosial

Pengembangan masyarakat melalui pendekatan modal sosial menekankan pentingnya jaringan sosial dan hubungan antarindividu maupun antar kelompok. Modal sosial dianggap sebagai sarana untuk mengakses potensi lain dalam masyarakat melalui nilai-nilai kebersamaan, kepercayaan, dan partisipasi. Beberapa elemen utama dalam modal sosial meliputi:

- a. Adanya jaringan sosial dan hubungan pribadi yang dibentuk secara sukarela,
- b. Partisipasi aktif dalam kegiatan sosial atau kemasyarakatan,
- c. Identitas kolektif, rasa saling memiliki, solidaritas, dan kesetaraan dalam komunitas,
- d. Semangat saling membantu, kerjasama, dan kepercayaan diri dalam memberikan dukungan, dan
- e. Tingginya tingkat kepercayaan dalam lingkungan masyarakat.

3. Pengembangan Berbasis Budaya Lokal

Legawa (1999) menjelaskan bahwa budaya mencerminkan nilai, norma, kepercayaan, dan tujuan yang dipegang oleh suatu kelompok dan membentuk perilaku sosialnya. Budaya lokal berfungsi sebagai panduan bagi anggota masyarakat

dalam bertindak serta berinteraksi dengan lingkungannya.

Unsur-unsur budaya lokal yang relevan dalam pengembangan masyarakat meliputi:

- a. Bahasa,
- b. Pengetahuan lokal,
- c. Struktur sosial,
- d. Alat dan teknologi tradisional,
- e. Sistem ekonomi lokal,
- f. Kepercayaan atau agama, dan
- g. Seni dan ekspresi budaya lainnya.

4. Pengembangan Berbasis Kearifan Lokal

Menurut Mardikanto dalam Rangga (2015), kearifan lokal merupakan kekuatan utama dalam pembangunan yang bersumber dari nilai-nilai sosial yang hidup dan dihormati dalam struktur masyarakat. Kearifan ini memiliki peran sebagai pedoman, pengontrol, dan rambu-rambu perilaku masyarakat. Ciri-ciri kearifan lokal antara lain:

- a. Menumbuhkan semangat kemandirian dan swadaya,
- b. Meningkatkan partisipasi masyarakat dalam proses pemberdayaan,
- c. Menjamin kelangsungan hidup dan keberlanjutan program, dan

- d. Mendukung penerapan teknologi tepat guna yang efisien serta memungkinkan masyarakat memahami dan menyusun program sesuai kebutuhannya.

5. Pengembangan Berbasis Modal Spiritual

Modal spiritual mencerminkan kekuatan, nilai, serta keyakinan spiritual yang mampu memberikan pengaruh positif bagi individu, kelompok, maupun masyarakat secara keseluruhan. Modal ini muncul dari kegiatan spiritual, praktik keagamaan, maupun sistem kepercayaan yang mendukung transformasi dan pengembangan diri. Mengacu pada Zohar (2010) dalam Rangga (2015), prinsip-prinsip utama modal spiritual mencakup:

- a. Self-organizing – sistem yang membentuk struktur sendiri secara dinamis,
- b. Bounded instability – sistem mampu beradaptasi dalam kondisi tidak stabil,
- c. Emergent – sistem berkembang sebagai hasil penyesuaian terhadap lingkungannya,
- d. Holistic – sistem bersifat menyeluruh dan tidak terpisah-pisah,
- e. Adaptive – sistem terus belajar dan berkembang dari waktu ke waktu,

- f. Evolutionary – perubahan menjadi bagian dari proses kreatif yang berkelanjutan,
- g. Destroyed by outside control – sistem akan kehilangan keseimbangannya bila dipaksa dari luar,
- h. Exploration – sistem memiliki kemampuan menjelajah dan membentuk masa depannya,
- i. Recontextualizing – sistem mampu menyesuaikan makna dan batas-batasnya melalui proses belajar, dan
- j. Order out of chaos – sistem menciptakan keteraturan dari kondisi yang tidak menentu.

2.2.3.5 Karakteristik Desa Wisata Berdasarkan Indikator *Community Based Tourism* (CBT)

Menurut Winata dan Idajati (2019), desa wisata memiliki sejumlah karakteristik yang didasarkan pada indikator *Community Based Tourism* (CBT) atau pariwisata berbasis masyarakat. Ciri-ciri tersebut mencakup beberapa aspek utama berikut:

1. Daya Tarik Wisata

Daya tarik wisata mencerminkan keunikan, keindahan, dan kekhasan yang melekat pada suatu daerah, baik yang bersumber dari alam, budaya, maupun hasil ciptaan manusia.

Elemen-elemen ini menjadi magnet bagi wisatawan untuk datang berkunjung. Suwanto (1997) menegaskan bahwa suatu objek wisata harus memenuhi standar minimum sebagai berikut:

- a. Memiliki berbagai jenis daya tarik seperti wisata alam (gunung, sungai, pantai, hutan), budaya (seni, upacara adat, kerajinan), dan buatan.
- b. Menawarkan suasana yang menyenangkan, bersih, nyaman, dan estetis.
- c. Mudah diakses oleh wisatawan.
- d. Memiliki identitas atau ciri khas tersendiri.
- e. Didukung oleh infrastruktur dan fasilitas yang memadai.
- f. Adanya alokasi anggaran untuk pengembangan potensi wisata tersebut.

2. Akomodasi di Desa Wisata

Akomodasi merupakan sarana penting yang disediakan di desa wisata untuk memenuhi kebutuhan tempat tinggal sementara bagi wisatawan. Menurut Panduan Pengembangan Akomodasi Wisata Ramah Lingkungan (2016), akomodasi diklasifikasikan menjadi tiga kategori:

- a. Akomodasi komersial: Dibangun dengan orientasi utama untuk mendapatkan keuntungan (misalnya hotel, motel, apartemen).

- b. Akomodasi semi-komersial: Didirikan tidak semata-mata untuk profit, tetapi juga mengedepankan aspek sosial (misalnya homestay, wisma, asrama).
- c. Akomodasi non-komersial: Dibangun khusus untuk kelompok tertentu dan bersifat sosial (misalnya panti asuhan, mess, vila komunitas).

Standar minimum akomodasi berdasarkan standar ASEAN meliputi:

- a. Adanya layanan penginapan yang layak.
- b. Pelibatan aktif masyarakat lokal dalam pengelolaan.
- c. Penyediaan lingkungan yang bersih dan aman.
- d. Prosedur keamanan dan keselamatan yang jelas bagi wisatawan.
- e. Pemeliharaan rutin fasilitas secara konsisten.

3. Peran Komunitas Lokal

Komunitas lokal merupakan penduduk setempat yang terlibat aktif dalam pengembangan desa wisata melalui pembentukan kelompok atau organisasi. Berdasarkan Standar Pariwisata Berbasis Masyarakat ASEAN (2016), beberapa kriteria minimal untuk komunitas pengelola desa wisata adalah:

- a. Tersedianya aturan tata kelola yang transparan dan efektif.
- b. Pembentukan komunitas secara legal dan sah.

- c. Manajemen yang baik, akuntabel, dan profesional.
- d. Adanya kemitraan strategis dengan berbagai pihak.
- e. Masyarakat berperan sebagai motor penggerak dalam pembangunan desa wisata.
- f. Keterlibatan masyarakat dalam pelestarian budaya lokal.

4. Manfaat Bagi Masyarakat

Pengembangan desa wisata memberikan beragam keuntungan bagi warga desa. Berdasarkan Panduan Desa Wisata (2021), terdapat empat manfaat utama yang dapat dirasakan masyarakat:

- a. Pelestarian budaya dan tradisi lokal berjalan seiring dengan meningkatnya taraf hidup masyarakat.
- b. Memberikan dampak ekonomi langsung yang menguntungkan bagi warga setempat.
- c. Mendorong pemanfaatan produk lokal sebagai bahan baku, yang berdampak pada tumbuhnya industri kecil dan menengah.
- d. Memanfaatkan kekayaan alam untuk memperkenalkan produk lokal kepada wisatawan.

5. Dukungan Pemerintah

Pengembangan desa wisata tidak dapat terlepas dari dukungan pemerintah daerah sebagai inisiator program. Keberhasilan pembangunan desa wisata sangat tergantung

pada sinergi antara pemerintah dan masyarakat setempat. Menurut Arida dan Pujian (2017), yang telah memodifikasi standar dukungan pemerintah, beberapa hal yang harus dipenuhi antara lain:

- a. Adanya perangkat desa yang bekerja dengan baik dan efektif.
- b. Kinerja organisasi perangkat daerah atau badan pengelola yang profesional.
- c. Kelembagaan desa yang mendukung proses pengembangan pariwisata secara berkelanjutan.

6. Peran Kelembagaan dalam Pengembangan

Kelembagaan yang terlibat dalam pengembangan desa wisata memiliki peran strategis dalam merancang kegiatan-kegiatan yang mampu memperkuat daya tarik desa wisata. Berdasarkan standar ASEAN, kegiatan tersebut setidaknya harus memenuhi ketentuan berikut:

- a. Bersifat ramah lingkungan dan memberikan dampak positif.
- b. Mengajak keterlibatan wisatawan dalam berbagai kegiatan seperti membuat kerajinan tangan, mengikuti acara budaya, dan festival lokal.

- c. Menjaga kesesuaian program pariwisata dengan nilai, karakter, serta warisan budaya lokal yang ada di desa wisata tersebut.

2.2.3.6 Faktor Penunjang *Community Best Tourism* (CBT)

1) Keterlibatan Aktif Masyarakat Lokal

Partisipasi aktif masyarakat lokal dalam pengelolaan dan pengambilan keputusan terkait pariwisata sangat penting. Keterlibatan ini menciptakan rasa kepemilikan dan tanggung jawab yang lebih besar terhadap keberhasilan CBT. Masyarakat lebih berkomitmen untuk menjaga lingkungan, melestarikan budaya, dan menyediakan layanan berkualitas bagi wisatawan.

2) Ketersediaan Sumber Daya Alam dan Budaya

Potensi sumber daya alam (seperti hutan, pantai, danau, atau gunung) dan kekayaan budaya (seperti tradisi, seni, kuliner, kerajinan) menjadi daya tarik utama CBT.

3) Pendidikan dan Pemberdayaan Masyarakat

Pelatihan dan peningkatan kapasitas bagi masyarakat dalam hal manajemen pariwisata, bahasa, pelayanan wisata, dan konservasi lingkungan sangat penting. Tujuannya untuk meningkatkan profesionalisme masyarakat dalam mengelola

pariwisata dan meningkatkan kualitas layanan kepada wisatawan.

4) Dukungan Pemerintah dan Kebijakan yang Mendukung

Dukungan regulasi, kebijakan pemerintah, serta bantuan dana atau infrastruktur dari pemerintah sangat membantu dalam pengembangan CBT. Peran pemerintah adalah menyediakan infrastruktur dasar seperti jalan, air bersih, dan listrik yang memudahkan wisatawan serta meningkatkan aksesibilitas.

5) Kerja Sama dengan Pihak Eksternal (Swasta/LSM)

Kolaborasi dengan sektor swasta, lembaga swadaya masyarakat (LSM), atau universitas dalam hal pelatihan, pemasaran, dan pengembangan produk wisata dapat mendukung CBT. Tujuannya untuk meningkatkan jaringan pemasaran dan promosi, serta membantu masyarakat dalam meningkatkan keterampilan dan profesionalisme mereka.

6) Kesadaran Terhadap Wisata Berkelanjutan

Kesadaran akan pentingnya menjaga kelestarian alam dan budaya di kalangan masyarakat dan wisatawan. Tujuannya untuk mendorong praktik-praktik pariwisata yang berkelanjutan dan ramah lingkungan, menjaga ekosistem dan warisan budaya setempat.

2.2.3.7 Faktor Penghambat *Community Best Tourism (CBT)*

1) Kurangnya Kapasitas dan Pendidikan Masyarakat

Kurangnya pengetahuan dan keterampilan masyarakat lokal dalam mengelola pariwisata, termasuk manajemen, pemasaran, bahasa asing, atau pelayanan wisata. Kualitas pelayanan yang rendah dan kesulitan dalam menarik wisatawan atau bersaing dengan destinasi lain.

2) Keterbatasan Infrastruktur

Aksesibilitas yang buruk (jalan rusak, kurangnya transportasi), kurangnya fasilitas umum (seperti penginapan, air bersih, listrik, dan layanan kesehatan) dapat menghambat perkembangan pariwisata. Dampak Negatifnya Membuat wisatawan enggan datang atau merasa tidak nyaman saat berkunjung ke destinasi CBT.

3) Kurangnya Dukungan Pemerintah

Jika pemerintah tidak memberikan dukungan yang cukup dalam hal regulasi, kebijakan, atau bantuan dana, pengembangan CBT akan terhambat. Dampak Negatifnya adalah Pengembangan yang lambat dan potensi tidak dimaksimalkan, karena masyarakat lokal tidak mendapatkan bantuan atau panduan yang diperlukan.

4) Konflik Kepentingan Antar Pemangku Kepentingan

Konflik internal di antara masyarakat atau antara masyarakat dengan pihak eksternal (seperti pengusaha atau pemerintah) dapat menghambat kerja sama. Dampak Negatifnya Pelaksanaan CBT menjadi tidak efektif atau terhambat oleh perpecahan di antara pemangku kepentingan.

5) Komersialisasi yang Berlebihan

Jika pariwisata berbasis komunitas terlalu fokus pada keuntungan ekonomi tanpa memperhatikan aspek sosial dan budaya, hal ini dapat mengurangi authenticity dan nilai lokal yang menjadi daya tarik utama CBT. Dampak Negatifnya Wisatawan kehilangan minat pada destinasi karena keaslian budaya dan tradisi lokal mulai tergerus oleh komersialisasi.

6) Ketergantungan pada Pihak Eksternal

Ketergantungan yang berlebihan pada investor luar atau lembaga swasta bisa membuat masyarakat lokal kehilangan kendali atas pengelolaan pariwisata. Dampak Negatifnya Masyarakat lokal tidak mendapatkan manfaat ekonomi yang optimal dari pariwisata, dan kehilangan kendali atas sumber daya alam dan budaya mereka.

7) Tantangan dalam Pemasaran dan Promosi

Keterbatasan dalam hal pemasaran dan promosi, terutama bagi destinasi yang terpencil atau belum dikenal, menjadi tantangan dalam menarik wisatawan. Dampak Negatifnya Destinasi CBT tidak dikenal luas oleh wisatawan, yang berdampak pada minimnya kunjungan.

8) Degradasi Lingkungan

Tanpa manajemen yang baik, meningkatnya jumlah wisatawan dapat menyebabkan kerusakan lingkungan, termasuk pencemaran, kerusakan ekosistem, atau *overtourism*. Dampak Negatifnya Penurunan kualitas destinasi wisata yang awalnya menjadi daya tarik utama, serta kerugian jangka panjang bagi masyarakat lokal.

2.2.4 Teori Strategi Pengembangan Pariwisata

2.2.4.1 Pengertian Strategi

Kata “strategi” berasal dari bahasa Yunani, yaitu *strategos*, gabungan dari *stratos* yang berarti militer dan *ago* yang berarti memimpin. Secara harfiah, istilah ini merujuk pada kepemimpinan militer atau kemampuan mengatur siasat dalam peperangan untuk mencapai kemenangan. Konsep ini juga dikemukakan oleh Clausewitz, yang mendefinisikan strategi sebagai seni menyusun dan mengatur langkah

langkah dalam pertempuran demi memenangkan konflik. Oleh karena itu, pemakaian istilah strategi awalnya erat kaitannya dengan ranah militer, karena secara historis berkembang dari praktik penyusunan taktik perang (Fikry dan Ghozali, 2022).

Secara teoritis, strategi dapat dipahami sebagai pedoman umum dalam bertindak untuk meraih tujuan tertentu. Strategi juga bisa dimaknai sebagai serangkaian metode dan pendekatan yang disesuaikan dengan kondisi tertentu, yang bertujuan untuk mencapai hasil terbaik. Dalam pendekatan lain, strategi mencakup proses penyusunan ide, perencanaan, dan pelaksanaan suatu kegiatan dalam kurun waktu tertentu (Agus Supriatna, 2020). Menurut Hidayat, strategi adalah proses perencanaan yang meliputi penetapan langkah-langkah yang diperlukan agar suatu organisasi bisa mencapai target yang telah ditentukan. Dengan kata lain, strategi mencakup dua aspek penting, yakni proses perumusan tujuan (*goal making process*) dan penyusunan strategi itu sendiri (*strategy making process*) (Hidayat et al., 2020). Pendapat lain menyebutkan bahwa strategi pada dasarnya merupakan bagian dari proses perencanaan dan pengelolaan (manajemen) yang berorientasi pada pencapaian tujuan. Sementara itu, Sonatasia mendefinisikan strategi sebagai rencana terpadu dan menyeluruh dari sebuah organisasi yang menghubungkan keunggulan kompetitif dengan tantangan eksternal, dan dirancang untuk menjamin

tercapainya sasaran utama organisasi (Sonatasia et al., 2020). Lebih lanjut, Permana menekankan bahwa strategi adalah pendekatan atau metode yang digunakan untuk melaksanakan rencana secara tepat demi meraih target tertentu. Ia juga menyoroti bahwa strategi mencerminkan respons berkelanjutan suatu organisasi terhadap tantangan yang dihadapi, dengan mengoptimalkan sumber daya yang dimiliki secara fleksibel dan menyesuaikan diri terhadap perubahan kondisi internal dan eksternal (Permana, 2022).

Secara umum, strategi dapat diartikan sebagai pendekatan yang mencakup tahapan perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, hingga evaluasi. Strategi yang efektif harus memiliki koordinasi antar tim, mampu mengenali faktor pendukung, mengikuti prinsip-prinsip pencapaian tujuan secara rasional, efisien dari segi biaya, serta menggunakan taktik yang sesuai untuk mencapai hasil secara optimal. Intinya, strategi adalah metode utama yang menjadi kunci pencapaian suatu tujuan.

2.2.4.2 Strategi Pengembangan Potensi Pariwisata

Pengembangan pariwisata merujuk pada serangkaian langkah sistematis yang bertujuan menciptakan sinergi dalam pemanfaatan berbagai potensi sumber daya pariwisata, serta mengintegrasikan unsur-unsur non-pariwisata yang memiliki keterkaitan langsung

maupun tidak langsung terhadap keberlanjutan sektor ini. Proses pengembangannya memerlukan perencanaan dan pengelolaan yang holistik, dengan melibatkan partisipasi berbagai pemangku kepentingan secara berkesinambungan dan strategis. Hal ini dikarenakan karakteristik pariwisata yang secara inheren dapat menimbulkan dampak ganda baik positif maupun negatif terhadap masyarakat, perekonomian, dan lingkungan (Postma dan Schmuecker, 2017). Pariwisata berkelanjutan merupakan bentuk pengelolaan dan pengembangan sektor pariwisata yang bertujuan untuk menjaga keberlanjutan ekosistem alam, keseimbangan ekonomi, serta keharmonisan sosial, sekaligus memastikan pelestarian sumber daya alam dan warisan budaya. Konsep ini tidak hanya berfokus pada perlindungan lingkungan, tetapi juga mencakup keberlangsungan ekonomi jangka panjang dan terciptanya keadilan sosial. Untuk mewujudkan pariwisata yang berkelanjutan, diperlukan upaya pengembangan yang konsisten dan terencana, serta didukung oleh sinergi dan kolaborasi antarpemangku kepentingan di daerah yang bersangkutan (Kisi, 2019).

Pengembangan pariwisata mencakup optimalisasi potensi destinasi wisata, yang dimaknai sebagai suatu proses peningkatan kapasitas sumber daya melalui pembangunan berbagai komponen pendukung keberhasilan sektor pariwisata. Komponen-komponen tersebut

mencakup aspek aksesibilitas seperti transportasi dan jaringan pemasaran, ketersediaan infrastruktur pariwisata, intensitas interaksi sosial, keterhubungan dengan sektor-sektor lain, kemampuan adaptasi terhadap dampak pariwisata, serta tingkat penerimaan masyarakat lokal terhadap perubahan. Secara umum, tujuan dari pengembangan potensi pariwisata adalah menciptakan hubungan timbal balik jangka panjang yang menguntungkan antara peningkatan kesejahteraan masyarakat, pelestarian lingkungan, kepuasan wisatawan, serta penguatan integrasi pembangunan masyarakat di wilayah sekitar destinasi wisata (Ariyani *et al.*, 2020).

Pembangunan sektor pariwisata merupakan bagian integral dari strategi pembangunan ekonomi jangka panjang, dengan menekankan pada peningkatan daya saing perekonomian nasional di tingkat global. Strategi ini didasarkan pada peningkatan produktivitas dan inovasi yang dikelola secara berkelanjutan, melalui upaya berkelanjutan dalam pengembangan kualitas sumber daya manusia, penguasaan dan penerapan teknologi, serta dukungan terhadap stabilitas ekonomi dan penyediaan infrastruktur fisik maupun ekonomi. Keseluruhan kebijakan tersebut diarahkan untuk membangun keunggulan kompetitif yang bersumber dari keunggulan komparatif, dengan mempertimbangkan karakteristik Indonesia sebagai negara maritim

dan agraris, serta disesuaikan dengan potensi dan keunggulan spesifik masing-masing daerah (Asmarah *et al.*, 2021).

Menurut UU nomor 10 tahun 2009 tentang kepariwisataan, daerah tujuan wisata yang selanjutnya disebut destinasi pariwisata adalah kawasan geografis yang spesifik berada dalam satu atau lebih wilayah administratif yang didalamnya terdapat kegiatan kepariwisataan dan dilengkapi dengan ketersediaan daya tarik wisata, fasilitas umum, fasilitas pariwisata, aksesibilitas, serta masyarakat yang saling terkait. Kerangka pengembangan destinasi pariwisata terdiri dari komponen-komponen utama sebagai berikut:

1. Obyek daya tarik wisata (*Attraction*) yang mencakup keunikan dan daya tarik berbasis alam, budaya, maupun buatan.
2. Aksesibilitas (*Accessibility*) yang mencakup kemudahan sarana dan sistem transportasi.
3. Amenitas (*Amenities*) yang mencakup fasilitas penunjang dan pendukung wisata.
4. Fasilitas umum (*Ancillary Service*) yang mendukung kegiatan pariwisata.
5. Kelembagaan (*Institutions*) yang memiliki kewenangan, tanggung jawab dan peran dalam mendukung terlaksananya kegiatan pariwisata (Wilopo dan Hakim, 2017).

Pengembangan sektor pariwisata di Indonesia mengacu pada Rencana Induk Pembangunan Kepariwisataan Nasional (RIPPARNAS), yang dituangkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2011. Rencana ini mencakup empat pilar utama pembangunan kepariwisataan, yakni destinasi pariwisata, pemasaran pariwisata, industri pariwisata, serta kelembagaan pariwisata. Dokumen tersebut memuat visi, misi, tujuan, sasaran, serta arah kebijakan pembangunan kepariwisataan nasional untuk periode tahun 2010 hingga 2025. Visi pembangunan kepariwisataan nasional adalah menjadikan Indonesia sebagai destinasi pariwisata kelas dunia yang kompetitif, berkelanjutan, serta mampu mendukung pembangunan daerah dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Nafi (2017) menjelaskan bahwa visi tersebut dicapai melalui empat misi utama, yaitu pengembangan destinasi, pemasaran, industri, dan kelembagaan kepariwisataan secara terpadu dan berkelanjutan.

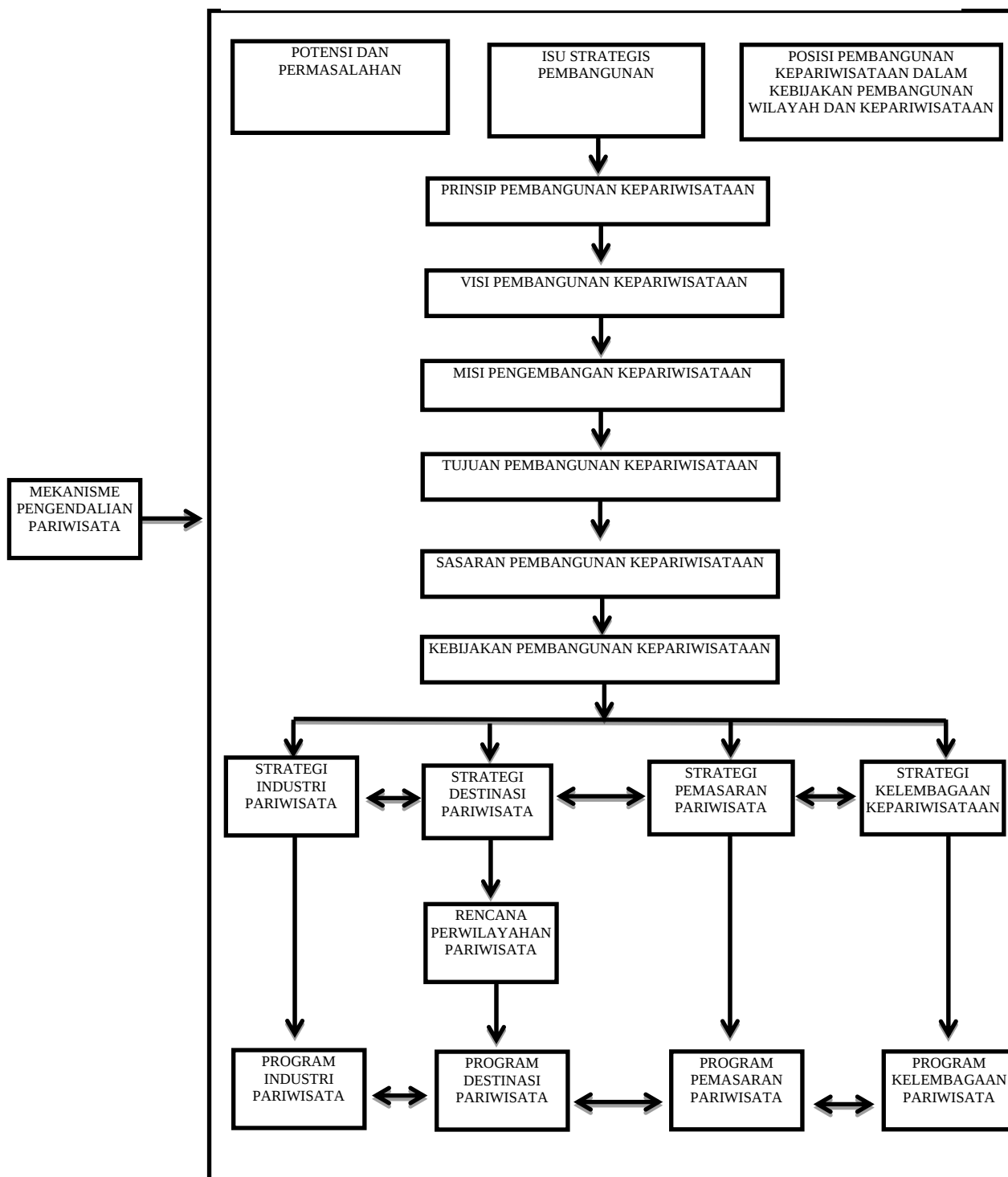
1. Destinasi Pariwisata yang aman, nyaman, menarik, mudah dicapai, berwawasan lingkungan, meningkatkan pendapatan nasional, daerah dan masyarakat.
2. Pemasaran Pariwisata yang sinergis, unggul, dan bertanggung jawab untuk meningkatkan kunjungan wisatawan nusantara dan mancanegara.
3. Industri Pariwisata yang berdaya saing, kredibel, menggerakkan kemitraan usaha, dan bertanggung jawab terhadap lingkungan alam dan sosial budaya.

4. Organisasi Pemerintah, Pemerintah Daerah, swasta dan masyarakat, sumber daya manusia, regulasi, dan mekanisme operasional yang efektif dan efisien dalam rangka mendorong terwujudnya Pembangunan Kepariwisata yang berkelanjutan (Nafi *et al.*, 2017).

Peraturan Menteri Pariwisata Nomor 10 Tahun 2016 mengatur mengenai Pedoman Penyusunan Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Provinsi dan Kabupaten/Kota. Regulasi ini disusun sebagai pedoman untuk merancang langkah-langkah strategis dan tahapan penyusunan Rencana Induk secara sistematis dan terstruktur, baik di tingkat provinsi maupun kabupaten/kota. Pedoman ini tidak hanya memberikan arahan mengenai substansi yang harus dimuat dalam dokumen rencana, tetapi juga mencakup metodologi dan tahapan pelaksanaannya. Meskipun demikian, kondisi khusus di masing-masing daerah dapat dijadikan sebagai pertimbangan dalam menyempurnakan isi maupun proses penyusunan Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Daerah (RIPPARDA), agar lebih sesuai dengan kebutuhan dan karakteristik lokal.

DI Provinsi Lampung sendiri, Rencana Induk Pembangunan Pariwisata Daerah (RIPPDA) tertuang dalam Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 6 Tahun 2012. RIPPDA adalah dokumen induk pengembangan kepariwisataan daerah Provinsi Lampung untuk periode 20 tahun

terhitung sejak tahun 2012 sampai dengan tahun 2031. RIPPDA dimaksudkan sebagai arah pengembangan pembangunan kepariwisataan di daerah Lampung dengan mengedepankan kemakmuran dan kesejahteraan masyarakat yang belandaskan pada pelestarian lingkungan alam dan budaya, peningkatan rasa cinta tanah air, pengembangan ekonomi kerakyatan, peningkatan kinerja pembangunan pariwisata dan peningkatan Pendapatan Asli Daerah. Untuk memenuhi apa yang menjadi target daerah dan wisatawan, perencanaan pengembangan kepariwisataan akan mengikuti alur RIPARPROV/RIPPARKAB/Kota yang ada di Gambar 2 dibawah ini:



Gambar 2. Kerangka Muatan RIPPARPROV dan RIPPARKAB/Kota

Sumber: Peraturan Menteri Pariwisata Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2016

Keberhasilan pengembangan pariwisata di suatu tempat wisata destinasi tergantung pada peran/partisipasi pariwisata pemangku kepentingan di daerah (Suniastha Amerta, 2017) Pengembangan pariwisata dapat dilakukan oleh negara sendiri, tetapi juga dapat melalui kolaborasi kerjasama dengan wilayah atau negara lain dalam rangka untuk mendapatkan manfaat dan dukungan lebih mengingat adanya kerjasama dalam mencapai tujuan yang sama (Yusnita, 2019). Pernyataan ini didukung oleh Minardi (2020) yang menyatakan bahwa kerjasama di bidang pariwisata merupakan instrumen yang digunakan untuk hubungan antara satu wilayah dengan wilayah lainnya sebagai bagian dari kerjasama yang baik (Minardi *et al.*, 2020).

2.2.4.3 Peran Komunitas Dalam Pengembangan Pariwisata Lokal

Peran masyarakat secara langsung dalam proses pengembangan wisata menjadi hal yang sangat penting. Adapun alasan untuk hal tersebut yakni:

1. Keterlibatan masyarakat secara langsung dapat mengakomodasi keinginan dan tuntutan masyarakat. Pada dasarnya pengembangan wisata harus didasarkan atas adanya keinginan masyarakat untuk mengembangkan potensi yang ada di wilayahnya sebagai sarana untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, sehingga keterlibatan masyarakat ditujukan untuk memastikan bahwa

pengembangan wisata sudah sesuai dengan keinginan dan tuntutan masyarakat.

2. Keterlibatan masyarakat ditujukan untuk menggugah rasa kepemilikan masyarakat terhadap potensi wisata yang dikembangkan. Rasa memiliki tidak serta merta timbul tanpa adanya partisipasi aktif dari masyarakat lokal.
3. Sarana bagi masyarakat untuk menumbuhkan dan memperkuat kelembagaan masyarakat yang ada, hal ini dikarenakan keterlibatan masyarakat secara bersama-sama dalam mengembangkan desa wisata akan meningkatkan pemahaman dan kemampuan masyarakat dalam pengembangan potensi yang dimilikinya, sehingga akan menciptakan kelembagaan masyarakat yang kuat (Kualaria *et al.*, 2022).

2.2.4.4 Partisipasi Masyarakat Dalam Perencanaan Priwisata

Dalam pengembangan wisata, partisipasi masyarakat lokal menjadi kunci utama pengembangannya (Normayasai, 2024). Menurut Keith Davis dan Newstrom (1989), partisipasi adalah keterlibatan mental dan emosi seseorang dalam situasi kelompok yang mendorong mereka untuk berkontribusi pada tujuan kelompok dan bersama-sama bertanggung jawab terhadap tujuan tersebut. Ide utamanya adalah keterlibatan, kontribusi dan tanggung jawab (Wahyuni, 2019). Perencanaan (*planning*) yaitu proses yang menyangkut

upaya yang dilakukan untuk mengantisipasi kecenderungan di masa yang akan datang dan penentuan strategi yang tepat untuk mewujudkan target dan tujuan organisasi. Kegiatan dalam perencanaan antara lain: (1) menetapkan pasar sasaran, merumuskan strategi untuk mencapai pasar sasaran tersebut, menentukan sumber-sumber daya yang diperlukan, dan menetapkan standar/indikator keberhasilan dalam pencapaian tujuan dan pasar sasaran, dan (2) keterlibatan masyarakat lokal terutama berkaitan dengan identifikasi masalah atau persoalan, identifikasi potensi pengembangan, analisis, dan peramalan terhadap kondisi lingkungan di masa mendatang, pengembangan alternatif rencana dan fasilitas, dan sebagainya (Palimbunga, 2017).

Partisipasi Masyarakat dalam Tahap Perencanaan pariwisata adalah keterlibatan dalam identifikasi masalah, perumusan tujuan, dan pengambilan keputusan terkait pengembangan desa wisata. (Sidiq dan Resnawaty, 2017). Bentuk partisipasi masyarakat dalam proses perencanaan pembangunan pariwisata adalah sebagai berikut:

1. Masyarakat lokal harus didukung secara finansial untuk berinvestasi dalam pengembangan pariwisata.
2. Masyarakat lokal berperan penting sebagai enterpreuneur .
3. Masyarakat lokal harus dilibatkan saat pembuatan kebijakan tentang pariwisata .

4. Masyarakat lokal dilibatkan dalam pengambilan keputusan akhir yang dilaksanakan oleh pejabat yang berwenang.
5. Masyarakat harus punya suara saat proses pengambilan keputusan. (M. satrio. lutfi arviana belia Wibowo, 2023).

Menurut Ulum (2021) terdapat 2 (dua) bentuk partisipasi yaitu partisipasi yang diberikan dalam bentuk nyata atau memiliki wujud dan juga partisipasi yang diberikan dalam bentuk tidak nyata abstrak yaitu :

1. Bentuk partisipasi yang nyata diantaranya adalah partisipasi dalam bentuk tenaga, uang, dan harta benda.
2. Bentuk partisipasi yang tidak nyata adalah ide/gagasan, kritik dan saran. Partisipasi masyarakat dalam bentuk ide/gagasan merupakan suatu bentuk partisipasi yang muncul dari buah pikir masyarakat yang ikut serta dalam memberikan pendapatnya untuk pengembangan (Ulum S, 2021)

2.2.4.5 Kolaborasi Pemerintah, Swasta, dan Masyarakat dalam Pengembangan Pariwisata

Perencanaan strategis destinasi pariwisata merupakan proses yang rumit karena melibatkan banyak pihak dengan kepentingan berbeda serta terbatasnya pengendalian terpusat terhadap sumber daya wisata (Jamal & Getz, 1995). Untuk itu, agar pembangunan kepariwisataan berkelanjutan dapat diwujudkan di tingkat daerah, diperlukan kolaborasi dan sinergi yang kuat antar pelaku, termasuk sektor bisnis, pemerintah, masyarakat, akademisi, dan media massa. Hal ini selaras dengan ketentuan dalam Peraturan Menteri Pariwisata Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pedoman Destinasi Pariwisata Berkelanjutan (Maturbongs, 2020). Pendekatan kolaboratif ini dikenal sebagai model Pentahelix, yang terdiri dari lima unsur penting:

1. Pemerintah

Pemerintah berperan sebagai pemangku kepentingan utama, khususnya dalam pelaksanaan kebijakan publik. Dalam konteks implementasi, birokrasi memiliki otoritas yang kuat untuk mengelola wilayah operasionalnya, berdasarkan mandat dari lembaga legislatif (Elmore, 1980; Yuningsih et al., 2019). Di Kabupaten Merauke, pemerintah daerah—melalui dinas teknis

seperti dinas pariwisata, kebudayaan, perencanaan pembangunan, perindustrian, pertanian, dan lembaga terkait pengelolaan wilayah perbatasan—berperan dalam perencanaan strategis (Renstra), pembangunan infrastruktur pendukung pariwisata, pengaturan investasi dan perdagangan, serta penegakan aturan di kawasan wisata. Selain eksekutif, lembaga legislatif juga berperan dalam fungsi regulasi, penganggaran, dan pengawasan dalam implementasi kebijakan.

2. Akademisi

Lembaga pendidikan tinggi dan lembaga riset memiliki posisi strategis dalam pembangunan pariwisata karena menyediakan tenaga ahli, menghasilkan penelitian, serta menciptakan solusi inovatif. Peran akademisi tidak hanya dalam membentuk masyarakat berbasis pengetahuan, tetapi juga mendidik individu agar mampu berpikir kritis, inovatif, dan berjiwa wirausaha (Halibas, Sibayan & Maata, 2017). Kolaborasi antara perguruan tinggi, pemerintah, pelaku usaha, komunitas, dan media menjadi landasan penting untuk mendukung penyebaran teknologi dan praktik kewirausahaan dalam sektor pariwisata, termasuk di wilayah Merauke.

3. Pelaku Bisnis

Potensi wisata yang melimpah menciptakan peluang ekonomi bagi masyarakat untuk terlibat dalam berbagai bentuk usaha di

bidang pariwisata. Maraknya promosi wisata melalui media sosial turut mempercepat pertumbuhan bisnis wisata seperti biro perjalanan, transportasi lokal, penginapan, pemandu wisata, kuliner, hingga produk oleh-oleh khas daerah. Dengan demikian, 207 sektor bisnis menjadi motor penggerak ekonomi lokal yang juga mendukung pelestarian dan daya tarik destinasi.

4. Komunitas

Masyarakat lokal, termasuk komunitas adat, kelompok seni, LSM, serta organisasi berbasis hobi atau minat, merupakan elemen penting dalam pengembangan pariwisata. Peran masyarakat tidak terbatas sebagai objek, melainkan sebagai subjek aktif mulai dari tahap perencanaan hingga implementasi pembangunan pariwisata. Pendekatan Community-Based Tourism (CBT) menempatkan masyarakat sebagai pusat pemberdayaan, sehingga manfaat dari pariwisata benar-benar dirasakan oleh komunitas lokal. Di Papua, keterikatan antara masyarakat adat dan alam tidak hanya memiliki nilai ekonomi tetapi juga spiritual dan budaya, menjadikan kearifan lokal sebagai fondasi dalam merancang pariwisata yang berkelanjutan dan berdaya saing.

5. Media Massa Media, baik konvensional maupun digital, memainkan peran penting sebagai saluran komunikasi dan promosi pariwisata. Perkembangan teknologi telah mendorong

transformasi dari media cetak dan elektronik ke new media seperti media sosial (Facebook, Instagram, YouTube, Twitter). Media ini memungkinkan interaksi digital yang cepat dan luas, sehingga menjadi alat promosi efektif yang tidak dibatasi oleh ruang dan waktu. Pemerintah, komunitas, dan individu kini aktif memanfaatkan platform digital untuk menampilkan potensi wisata daerah mereka, menggantikan metode promosi tradisional jangkauannya (Maturbongs, 2020).

2.3 Tinjauan Normatif

2.3.1 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 Tentang Kepariwisata

Pelaksanaan kepariwisataan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Kepariwisata dirancang dengan pendekatan yang mengedepankan 133 64 pertumbuhan dan pemerataan ekonomi demi tercapainya kesejahteraan masyarakat dan pembangunan yang mendukung pengembangan wilayah. Pendekatan ini berbasis pada peran aktif masyarakat dan berfokus pada pemberdayaan komunitas lokal, yang mencakup berbagai dimensi seperti pengembangan sumber daya manusia, pemasaran pariwisata, pengembangan destinasi, pemanfaatan ilmu pengetahuan dan teknologi, keterpaduan antar sektor, kerja sama internasional, dukungan terhadap usaha kecil, serta pengelolaan yang bertanggung jawab terhadap sumber daya alam dan budaya. Dengan demikian, pembangunan sektor pariwisata

diharapkan dapat menjadi sarana untuk menumbuhkan kesadaran terhadap identitas dan jati diri bangsa.

Namun demikian, hingga saat ini kerangka regulasi dan aturan pelaksanaan Undang-Undang Kepariwisata belum sepenuhnya komprehensif, sehingga implementasi penyelenggaraan pariwisata belum berjalan optimal baik di tingkat pusat maupun daerah. Walaupun secara umum UU Kepariwisata telah menyediakan landasan bagi sistem kepariwisataan nasional, terdapat berbagai aspek krusial yang masih memerlukan kajian dan evaluasi lebih lanjut guna menyempurnakan substansi undang-undang tersebut.

Seiring dengan pertumbuhan pesat industri pariwisata di Indonesia, muncul berbagai dampak positif, seperti peningkatan ekonomi dan keterlibatan masyarakat. Namun, di sisi lain, juga muncul tantangan dan persoalan yang semakin kompleks. Untuk mengakomodasi dinamika tersebut serta menciptakan lingkungan pembangunan pariwisata yang kondusif dan terpadu, pemerintah menetapkan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisata sebagai pengganti UU No. 9 Tahun 1990. Undang-undang ini kini menjadi instrumen hukum utama dalam pengelolaan dan penyelenggaraan sektor pariwisata nasional.

Selama sembilan tahun sejak diberlakukannya Undang-Undang Kepariwisata (2009–2018), telah muncul sejumlah peraturan

perundang-undangan yang secara substansial memiliki keterkaitan erat dengan regulasi di bidang kepariwisataan. Beberapa peraturan perundang-undangan yang memiliki keterkaitan substansial dengan pengaturan sektor pariwisata selama sembilan tahun berlakunya Undang-Undang Kepariwisata (2009–2018), antara lain sebagai berikut:

- 1) Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang;
- 2) Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil;
- 3) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2009 tentang Penerbangan;
- 4) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan;
- 5) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2009 tentang Kawasan Ekonomi Khusus;
- 6) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya;
- 7) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian;
- 8) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
- 9) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
- 10) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas; dan
- 11) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pemajuan Kebudayaan;

Selain itu, regulasi kepariwisataan di Indonesia tidak hanya tertuang dalam Undang-Undang Kepariwisata dan peraturan yang secara eksplisit membahas sektor ini, tetapi juga tersebar di berbagai peraturan lain yang memuat substansi yang mendukung kebijakan kepariwisataan nasional, antara lain:

- 1) Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2011 tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Tahun 2010– 2025;
- 2) Peraturan Pemerintah Nomor 52 Tahun 2012 tentang Sertifikasi Kompetensi dan Sertifikasi Usaha di Bidang Pariwisata;
- 3) Peraturan Pemerintah Nomor 62 Tahun 2010 tentang Pemanfaatan Pulau Pulau Kecil Terluar;
- 4) Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang;
- 5) Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2010 tentang Pengusahaan Pariwisata Alam di Suaka Margasatwa, Taman Nasional, Taman Hutan Raya, dan Taman Wisata Alam;
- 6) Peraturan Presiden Nomor 63 Tahun 2014 tentang Pengawasan dan Pengendalian Kepariwisata;
- 7) Peraturan Presiden Nomor 64 Tahun 2014 tentang Koordinasi Strategis Lintas Sektor Penyelenggaraan Kepariwisata sebagaimana telah diubah dengan Perpres Nomor 40 Tahun 2017;

- 8) Peraturan Presiden Nomor 50 Tahun 2016 Pemberian Penghargaan Kepariwisata;
- 9) Peraturan Presiden Nomor 21 Tahun 2016 tentang Bebas Visa Kunjungan;
- 10) Peraturan Menteri Pariwisata Nomor 1 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Sertifikasi Usaha Pariwisata;
- 11) Peraturan Menteri Pariwisata Nomor 18 Tahun 2016 Tentang Pendaftaran Usaha Pariwisata; dan
- 12) Peraturan Menteri Pariwisata Nomor 3 Tahun 2017 Tentang Pelaksanaan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Bidang Pariwisata Di Badan Koordinasi Penanaman Modal.

Dengan demikian, regulasi-regulasi tersebut senantiasa perlu disesuaikan mengikuti perkembangan kebutuhan masyarakat dan pemangku kepentingan (stakeholder) dalam rangka mendukung pengelolaan pariwisata yang adaptif, inklusif, dan berkelanjutan.

1) Pasal 4 huruf f UU Kepariwisata

“Kepariwisata diselenggarakan dengan prinsip:

- a. *menjunjung tinggi norma agama dan nilai budaya sebagai pengejawantahan dari konsep hidup dalam keseimbangan hubungan antara manusia dan Tuhan Yang Maha Esa, hubungan antara manusia dan sesama manusia, dan hubungan antara manusia dengan lingkungan;*
- b. *menjunjung tinggi hak asasi manusia, keragaman budaya, dan kearifan lokal”.*

Pasal 4 huruf f UU Kepariwisata belum mengakomodir kebutuhan masyarakat perihal diperlukannya sebuah norma yang memberikan

perlindungan terhadap implementasi nilai-nilai budaya di sekitar daerah pariwisata yang menyebabkan terjadinya beberapa permasalahan pariwisata berupa tergerusnya nilai-nilai budaya dalam kegiatan pariwisata, sedangkan salah satu tujuan dibentuknya UU Kepariwisataan adalah pemajuan dan perlindungan terhadap kebudayaan.

2) Pasal 7 UU Kepariwisataan

“Pembangunan kepariwisataan meliputi:

- a. destinasi pariwisata;*
- b. pemasaran; dan*
- c. kelembagaan kepariwisataan”.*

Pasal 7 UU Kepariwisataan belum mencerminkan asas kemanusiaan yang diatur dalam Pasal 6 ayat (1) huruf b UU Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, karena dalam rumusan pasal tersebut, pembangunan kepariwisataan hanya berorientasi pada aspek ekonomi/bisnis tanpa memberikan cerminan aspek-aspek lainnya, salah satunya aspek perlindungan dan perghormatan hak-hak warga negara dalam urusan kepariwisataan sehingga dapat menunjang keberhasilan pembangunan kepariwisataan.

3) Pasal 8 UU Kepariwisataan

- “1) Pembangunan kepariwisataan dilakukan berdasarkan rencana induk pembangunan kepariwisataan yang terdiri atas rencana induk pembangunan kepariwisataan nasional, rencana induk pembangunan kepariwisataan provinsi, dan rencana induk pembangunan kepariwisataan kabupaten/kota.*
- 2) Pembangunan kepariwisataan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan bagian integral dari rencana pembangunan jangka panjang nasional”.*

Pasal 8 UU Kepariwisata belum mencerminkan asas *bhinneka tunggal ika* yang diatur dalam Pasal (1) huruf f UU Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, karena seharusnya dalam rumusan pasal tersebut, pembangunan kepariwisataan juga harus didasarkan pada aspek kearifan lokal yaitu memperhatikan keragaman penduduk, agama, suku, dan golongan, kondisi khusus daerah serta budaya dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.

4) Pasal 30 huruf d UU Kepariwisata

“Pemerintah kabupaten/kota berwenang melaksanakan pendaftaran, pencatatan, dan pendataan pendaftaran usaha pariwisata”.

Pasal 30 huruf d UU Kepariwisata menurunkan Peraturan Menteri Nomor 18 Tahun 2016 tentang Tanda Daftar Usaha Pariwisata sebagai bentuk komitmen Pemerintah untuk mempermudah warga negara Indonesia untuk melaksanakan usaha kepariwisataan, namun ternyata tidak selamanya membawa dampak positif bagi industri pariwisata dan cenderung membawa kesulitan-kesulitan tertentu, terutama dalam konteks pengawasan dan pengendalian. Variabel perkembangan teknologi informasi yang begitu pesat juga berperan serta dalam menambah kesulitan dalam pengawasan dan pengendalian dari usaha pariwisata yang ada. Jika Pemerintah tidak tanggap dalam menangani fenomena ini tentunya akan tercipta ketidakadilan dan ketidakpastian hukum di kalangan pengusaha penyedia akomodasi karena tentunya para penyedia

akomodasi yang tidak terdata oleh pemerintah tidak akan dikenai kewajiban-kewajiban tertentu yang biasa dibebankan. Kondisi seperti ini tentunya akan mengakibatkan terjadinya persaingan usaha yang tidak sehat, dimana korbannya adalah para pelaku usaha yang memiliki Tanda Daftar Usaha Pariwisata (TDUP) dan yang telah memenuhi kewajibannya kepada pemerintah.

5) Pasal 50 ayat (4) UU Kepariwisataan

“Gabungan Industri Pariwisata Indonesia bersifat mandiri dan dalam melakukan kegiatannya bersifat nirlaba”.

Frasa “kegiatannya bersifat nirlaba” sebagaimana ketentuan Pasal 50 ayat (4) membatasi ruang gerak pengurus untuk mempertahankan sifat mandiri dari organisasi tersebut. Kemandirian organisasi tentunya hanya dapat dihasilkan melalui kondisi keuangan yang stabil salah satunya dengan mengadakan kegiatan yang mendatangkan laba. Apabila GIPI dilarang melaksanakan kegiatan yang mendatangkan laba dan juga tidak diberi hak untuk mendapatkan bantuan dana dari pemerintah tentunya tujuan dari adanya organisasi ini yaitu dalam hal mendukung pengembangan dunia usaha pariwisata tidak dapat tercapai.

6) Pasal 53 UU Kepariwisataan

1. *“Tenaga kerja di bidang kepariwisataan memiliki standar kompetensi.*
2. *Standar kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui sertifikasi kompetensi.*
3. *Sertifikasi kompetensi dilakukan oleh lembaga sertifikasi profesi yang telah mendapat lisensi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan”*

Pasal 53 UU Kepariwisata dinilai belum cukup mampu untuk mengarusutamakan tenaga kerja lokal sebagai tenaga kerja di industri kepariwisataan lokal, terutama dalam usaha jasa pramuwisata. Kekhawatiran tersebut dikemukakan oleh GIPI Provinsi Bali sebagai bentuk respon atas Peraturan Pemerintah Nomor 52 Tahun 2012 tentang Sertifikasi Kompetensi dan Sertifikasi Usaha di Bidang Pariwisata. Pasalnya, apabila penentuan apakah seseorang dapat bekerja dalam jasa pramuwisata hanya didasarkan pada standar kompetensi saja, dikhawatirkan tenaga kerja asing akan membanjiri lapangan pekerjaan di usaha jasa pramuwisata tersebut dan warga lokal dapat tersingkir dari kompetisi. Padahal, jika berbicara mengenai penguasaan informasi dan juga lapangan tentunya warga lokal lebih memahaminya karena daerah tersebut merupakan habitat mereka. Tanpa keberadaan kebijakan yang berupaya untuk mengarusutamakan warga lokal sebagai tenaga kerja di dalam usaha pariwisata, ikhtiar untuk menjadikan pariwisata sebagai katalisator kemajuan ekonomi masyarakat di daerah menjadi jauh panggang dari api. Mengingat tak jarang tenaga kerja asing yang mempunyai kemampuan berbahasa asing yang cukup beragam dan tentunya hal ini menjadi nilai tambah yang bisa saja mengancam warga lokal apabila tidak terdapat proteksi.

2.3.2 Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 6 Tahun 2012 Tentang Rencana Pembangunan Pariwisata Daerah (RIPPDA)

Rencana Induk Pembangunan Pariwisata Daerah Provinsi Lampung yang selanjutnya disingkat RIPPDA adalah dokumen perencanaan induk pengembangan kepariwisataan daerah Provinsi Lampung untuk periode 20 (duapuluh) tahun terhitung sejak tahun 2012 sampai dengan tahun 2031. Kawasan Strategis Pariwisata adalah kawasan yang memiliki fungsi utama pariwisata atau memiliki potensi untuk pengembangan pariwisata yang mempunyai pengaruh penting dalam satu atau lebih aspek, seperti pertumbuhan ekonomi, sosial dan budaya, pemberdayaan sumber daya alam, daya dukung lingkungan hidup, serta pertahanan dan keamanan. Kepariwisata merupakan serangkaian aktivitas yang berkaitan dengan sektor pariwisata, yang memiliki karakter multidimensi dan lintas disiplin ilmu. Aktivitas ini muncul sebagai respons terhadap kebutuhan individu maupun negara, serta mencerminkan interaksi antara wisatawan dengan masyarakat lokal, antar wisatawan itu sendiri, maupun dengan pemerintah daerah dan pelaku usaha di sektor pariwisata.

Pada pasal 8 Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 6 Tahun 2012 Tentang Rencana Pembangunan Pariwisata Daerah berbunyi:

“Pengembangan kepariwisataan Provinsi Lampung mengacu pada konsep sebagai berikut:

- a. konsep pembangunan pariwisata yang berkelanjutan;
- b. konsep pengurangan ketimpangan pembangunan wilayah;
- c. konsep keterkaitan antar sektor dalam pengembangan pariwisata;
- d. konsep keterkaitan pariwisata, perdagangan, dan investasi;
- e. konsep hierarki dan penjenjangan pariwisata;
- f. konsep pengembangan kawasan wisata unggulan;
- g. konsep jaringan wisata;
- h. konsep keterpaduan koridor jalur wisata; dan
- i. konsep ekowisata dan *Community Based Ecotourism*.

Pasal 8 menyatakan bahwa pengembangan pariwisata di Provinsi Lampung sebenarnya telah diarahkan pada konsep-konsep pariwisata yang berkelanjutan, modern dan mengedepankan keterlibatan antar *stakeholders*. Salah satu konsep pengembangan pariwisata Provinsi Lampung adalah konsep ekowisata dan *Community Based Ecotourism*.

Pasal 23 berbunyi:

“Ekowisata merupakan jenis pariwisata alternatif yang dapat dikembangkan dengan substansi konsepnya berupa program Community Based Ecotourism yaitu mensejahterakan secara sosial, menguntungkan secara ekonomis, dan melestarikan lingkungan hidup.

Ekowisata adalah perjalanan dan kunjungan yang bertanggungjawab terhadap lingkungan yang relatif tidak mengganggu kawasan alam dalam hal menikmati alam, studi, dan apresiasi alam termasuk aspek budayanya untuk menunjang konservasi yang semua aktivitas pengunjung berdampak negatif rendah dan mendukung kesejahteraan masyarakat sekitar. Ekowisata dengan menggunakan CBT sangat tepat untuk mengetahui kondisi wilayah dan sangat efektif dalam penggunaannya karena mencakup dimensi-dimensi yang lengkap. CBT tidak hanya mengkaji aspek ekonomi. CBT juga mencakup aspek sosial,

budaya dan lingkungan. Penerapan CBT bermanfaat bagi berbagai pihak seperti pemerintah dalam menyusun strategi pemberdayaan ekonomi masyarakat.

2.4 Kerangka Pikir Penelitian

Konsep pengembangan pariwisata berbasis komunitas atau CBT merupakan salah satu bentuk pariwisata yang dibangun melalui negosiasi dan keterlibatan pemangku kepentingan utama dalam destinasi. Beberapa ahli mendefinisikan CBT sebagai pariwisata yang dimiliki dan dioperasikan oleh masyarakat. CBT adalah bentuk pariwisata di mana penduduk setempat memiliki pengaruh yang signifikan dan aktif dalam pertumbuhan dan pengelolaannya, dan sebagian besar keuntungannya disimpan oleh kota. Ini adalah bentuk pariwisata pedesaan yang semakin diterima di sebagian besar negara berkembang sebagai strategi pengentasan kemiskinan (Yulianah, 2021). Menurut Setyawati dan Karin (2019) untuk mewujudkan strategi pembangunan potensi daerah wisata melalui konsep CBT dibutuhkan peran para *stakeholders* pariwisata (pemerintah, dunia usaha pariwisata, dan masyarakat) yang semua memiliki visi yang sama terhadap pentingnya pembangunan kepariwisataan yang berkelanjutan dan mengedepankan penggunaan energi yang efisien dan terbarukan sehingga dapat menciptakan lapangan kerja, mengentaskan kemiskinan dan pelestarian lingkungan. Hal tersebut karena kebijakan pembangunan

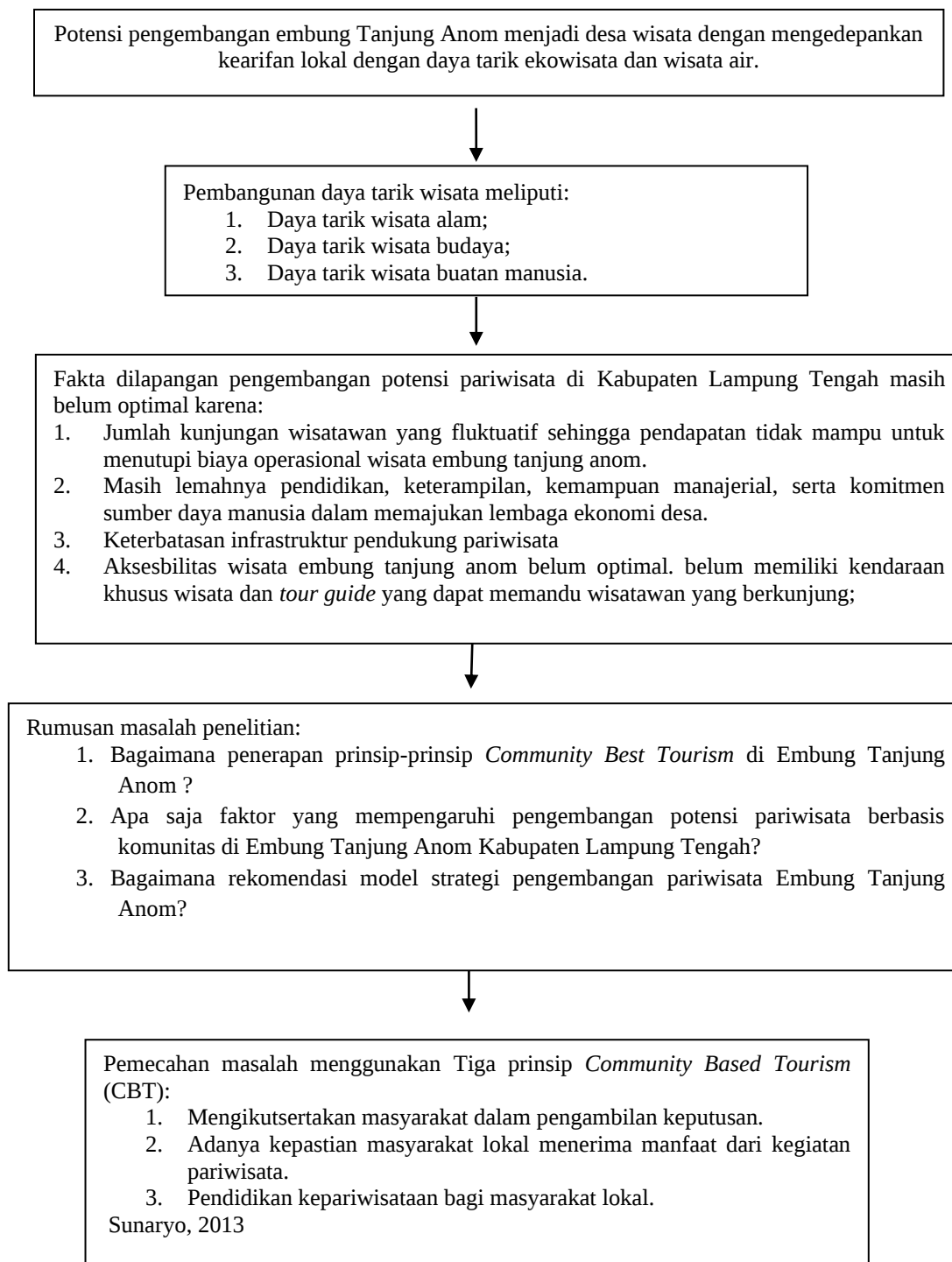
pariwisata berkelanjutan terarah pada penggunaan sumberdaya alam dan penggunaan sumber daya manusia untuk jangka waktu yang lama (Budiani, 2018). Keberhasilan pariwisata berbasis masyarakat (CBT) tidak lepas dari peran masyarakat itu sendiri, keberhasilan ini akan mampu menciptakan kesempatan kerja, mengurangi angka kemiskinan, dan dapat meningkatkan perekonomian.

Masalah yang sering kali timbul dalam upaya pengembangan pembangunan pariwisata menurut (Jumadi, 2020) adalah produk pariwisata mempunyai karakteristik lingkaran hidup pendek, risiko tinggi, perbedaan tinggi, keberagaman tinggi, tingkat daya saing ketat, dan gampang di contoh sehingga industri ini membutuhkan kecerdikan dan inovasi untuk menopang atau memperpanjang siklus hidup produknya. Pengembangan destinasi wisata Embung Kampung Tanjung Anom seiring dengan berjalannya waktu memunculkan permasalahan. Diantaranya adalah jumlah kunjungan wisatawan yang fluktuatif sehingga pendapatan tidak mampu untuk menutupi biaya operasional wisata Embung Tanjung Anom. Selain itu, faktor sumber daya manusia menjadi persoalan paling krusial dalam operasional unit usaha pariwisata BUMK, terkait masih lemahnya pendidikan, keterampilan, kemampuan manajerial, serta komitmennya dalam memajukan lembaga ekonomi desa. Keterbatasan infrastruktur pendukung pariwisata juga menjadi kendala pengembangan usaha pariwisata di daerah (Saifuddin, 2019). Untuk itu kegiatan dalam

pariwisata perlu dirancang dalam rangka untuk lebih mensejahterakan masyarakat di daerah wisata tersebut maupun bagi pengunjung (wisatawan). Sehingga salah satu konsep pengelolaan dalam upaya memberikan nilai tambah ganda tersebut adalah melalui konsep pengembangan Pariwisata berbasis komunitas atau masyarakat terutama di (TRUNAJAYA, 2016). Oleh karena itu, (Sunaryo, 2013) mengungkapkan pada dasarnya terdapat tiga prinsip pokok dalam strategis perencanaan pembangunan kepariwisataan yang berbasis masyarakat atau *Community Based Tourism* (CBT), yaitu: Mengikutsertakan masyarakat dalam pengambilan keputusan; Adanya kepastian masyarakat lokal menerima manfaat dari kegiatan pariwisata, dan Pendidikan kepariwisataan bagi masyarakat lokal. Sehingga untuk menemukan solusi atas permasalahan pembangunan industri pariwisata di Kabupaten Lampung Tengah, maka dibutuhkan strategi yang baik yang juga mengedepankan aspek-aspek pengembangan CBT, yakni: prinsip ekonomi, prinsip sosial, prinsip budaya, prinsip lingkungan dan prinsip politik.

Menurut Suasari (2003) aspek utama pengembangan CBT berupa 5 dimensi, yaitu: (1) Dimensi ekonomi, dengan indikator berupa adanya dana untuk pengembangan komunitas, terciptanya lapangan pekerjaan di sektor pariwisata, timbulnya pendapatan masyarakat lokal dari sektor pariwisata; (2) Dimensi sosial dengan indikator meningkatnya kualitas hidup, peningkatan kebanggaan komunitas, pembagian peran yang adil antara laki

-laki perempuan, generasi muda dan tua, membangun penguatan organisasi komunitas; (3) Dimensi budaya dengan indikator berupa mendorong masyarakat untuk menghormati budaya yang berbeda; (4) Dimensi lingkungan, dengan indikator mempelajari *carrying capacity* area, mengatur pembuangan sampah, me-ningkatkan kepedulian akan perlunya konservasi; (5) Dimesi politik, dengan indikator: meningkatkan partisipasi dari penduduk lokal, peningkatan kekuasaan komunitas yang lebih luas, menjamin hak-hak dalam pengelolaan SDA (Nurhidayati, 2012). Secara lebih singkat kerangka pikir penelitian ini dapat dilihat dalam gambar bagan 3 dibawah ini:



Gambar 3 Bagan Kerangka Pikir

Keterangan: Diolah oleh peneliti, 2023

III. METODE PENELITIAN

3.1 Jenis dan Pendekatan Penelitian

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif kualitatif. Menurut Creswell (2013) metode kualitatif disebut metode penelitian yang natural yang tidak memiliki desain yang baku karena ketika penelitian dilakukan di lapangan, peneliti harus siap dengan realita yang berubah dan tidak sesuai dengan keinginan peneliti. Pendekatan deskriptif kualitatif meliputi sosial budaya, situasi, teori dan data yang saling berkaitan, dan keterlibatan peneliti (Silalahi, 2017). Pendekatan penelitian yang digunakan dalam penelitian tentang pengembangan destinasi wisata Embung Tanjung Anom ini adalah studi kasus. Studi kasus dalam bahasa inggris "*A Case Study*" atau "*Case Studies*". Kata "Kasus" diambil dari kata "Case" artinya kasus, kajian, peristiwa. Sedangkan arti dari "*case*" sangatlah kompleks dan luas. Studi kasus adalah sebuah eksplorasi dari "suatu sistem yang terikat" atau "suatu kasus/beragam kasus" yang dari waktu ke waktu melalui pengumpulan data yang mendalam serta melibatkan berbagai sumber informasi yang "kaya" dalam suatu konteks. Sistem terikat ini diikat oleh waktu dan tempat sedangkan kasus dapat dikaji dari suatu program, peristiwa, aktivitas atau suatu individu (Assyakurrohim *et al.*, 2022). Atas dasar itu penelitian kualitatif mencoba untuk mengerti, mendalami dan menerobos masuk di dalamnya terhadap suatu gejala-gejala yang sangat dalam kemudian

menginterpretasikan dan menyimpulkan gejala-gejala tersebut sesuai dengan konteksnya. Sehingga dicapai suatu simpulan yang obyektif dan alamiah sesuai dengan gejalagejala pada konteks tersebut yang sifatnya subjektivitas.

Penelitian kualitatif berlandaskan kepada filsafat *post-positivisme*, sebab berguna untuk meneliti pada obyek yang alamiah, (sebagai lawannya eksperimen) peneliti berkontribusi sebagai instrumen kunci, pengambilan sampel, sumber data dilakukan dengan *purposive* dan *snowball*, teknik pengumpulan dengan triangulasi (gabungan), analisis data bersifat induktif/kualitatif, dan hasil penelitian kualitatif lebih menekankan makna dari pada generalisasi Karena tujuan utama dalam penelitian kualitatif untuk membuat fakta/fenomena agar mudah dipahami (*understandable*) dan memungkinkan sesuai modelnya dapat menghasilkan hipotesis baru (Hennink, 2019). Dengan demikian, penelitian kualitatif bertujuan untuk mendapatkan pemahaman yang mendalam mengenai masalah-masalah manusia dan sosial, bukan mendeskripsikan bagian permukaan dari sebuah realitas sebagaimana dilakukan penelitian kuantitatif dengan positivismenya. Karena peneliti menginterpretasikan bagaimana subjek memperoleh makna dari lingkungan sekeliling, dan bagaimana makna tersebut mempengaruhi perilaku mereka. Penelitian dilakukan dalam latar (*setting*) yang alamiah (*naturalistic*) bukan hasil perlakuan (*treatmen*) atau manipulasi variabel yang dilibatkan.

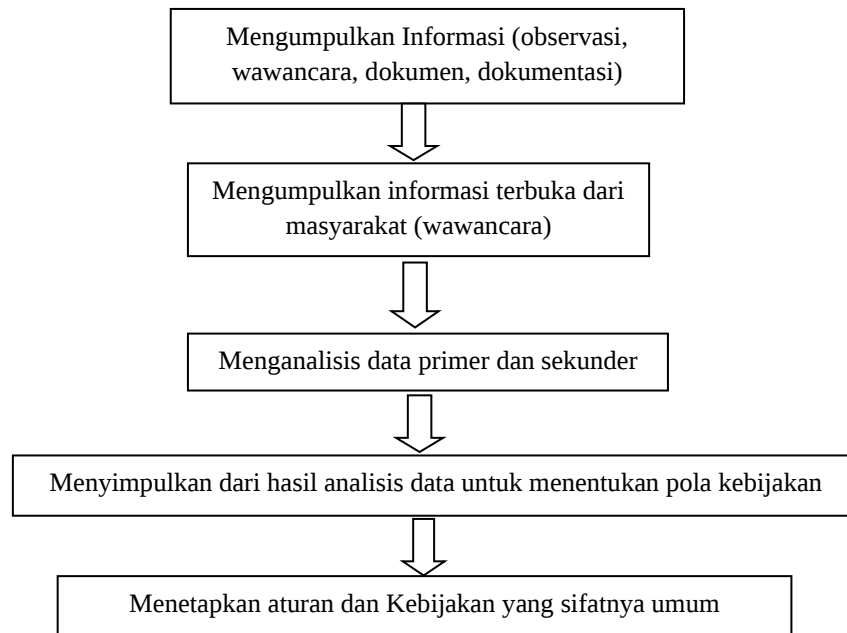
Setiap kegiatan penelitian pastinya harus selalu mengikuti suatu proses secara bertahap. Creswel (20013) telah menyajikan tahapan khusus penelitian kualitatif diantaranya yaitu (1) Identifikasi masalah; peneliti harus memulai apa yang menjadi sasaran penelitian, artinya menyangkut spesifikasi isu/fenomena yang hendak dipelajari/diteliti. (2) *Literature riview* (penelusuran pustaka); bagian ini peneliti harus mencari bahan atau sumber bacaan yang terkait fenomena yang akan diteliti, sehingga peneliti harus dapat menemukan kebaruan (*novelty*) atau kelebihan dari penelitiannya dengan penelitian sebelumnya. (3) Menentukan tujuan penelitian; peneliti harus mengidentifikasi maksud/tujuan utama dari penelitiannya. (4) Pengumpulan data; peneliti harus memperhatikan dalam memilih dan menentukan objek/partisipan yang potensial, guna menjangkau kemampuan partisipan untuk terlibat secara aktif dalam penelitian. (5) Analisis dan interpretasi data (*interpretation*); data yang telah diperoleh oleh peneliti kemudian dianalisis atau ditafsirkan sehingga menghasilkan gagasan atau teori baru. (6) Pelaporan; peneliti membuat laporan hasil penelitiannya dengan corak deskripsi, karena menggunakan metode kualitatif sehingga membutuhkan penggambaran secara luas dalam laporannya dan harus memposisikan pembaca seolah-olah sebagai orang yang terlibat dalam penelitian (Fadli, 2021).

Berdasarkan tujuan dan hasil yang akan dicapai serta teknik analisisnya. Penelitian kualitatif dapat digolongkan menjadi dua yakni deskriptif *analitic (tick description)* dan deskriptif-eksplanatif. Deskriptif rinci (*tick description*) merupakan penelitian kualitatif yang bertujuan memahami dan memaknai subyek

serta “memberikan” semua gejala yang tampak dan memaknai apa yang ada dibalik gejala. Dengan kata lain, menggambarkan secara rinci apa, siapa, dimana, kapan, bagaimana, mengapa, dan sejenisnya tentang subjek yang diteliti. Deskriptifeksplanatif merupakan penelitian kualitatif tidak saja bertujuan memahami dan memaknai apa yang ada dibalik gejala, tetapi juga membangun teori baru. (*grounded theory*) yang berupaya menemukan temuan baru dengan teknik *coding* dan komparatif atau katagorisasi yang dikembangkan dengan penelusuran pertanyaan hipotik dengan kata lain, disamping menggambarkan secara rinci apa, siapa, dimana, kapan, bagaimana, mengapa, dan sejenisnya terhadap subjek yang diteliti. Selanjutnya, berupaya menggambarkan hal hal baru yang ditemukan dilapangan penelitian (Harahap, 2020). Penelitian mengenai strategi pengembangan potensi pariwisata di Kabupaten Lampung Tengah menggunakan pendekatan penelitian kualitatif dengan jenis penelitian deskriptif eksplanatif dimana *output* pada penelitian ini adalah untuk membangun teori baru (*grounded theory*).

Penelitian kualitatif menggunakan logika berpikir induktif. Berpola pikir induktif (empiris-rasional atau *bottom up*). Maksudnya metode ini dipakai untuk memperoleh *grounded theory*, yaitu teori yang berasal dari data dan bukan berasal dari hipotesis. Dengan demikian penelitiannya bersifat *generating theory*. Induksi sering pula diartikan dengan istilah logika mayor, karena membahas penyesuaian pemikiran dengan dunia empiris, ia menguji hasil usaha logika formal (deduktif), dengan membandingkannya dengan kenyataan empiris (Mustofa, 2016).

Logika induktif dapat dilihat pada gambar dibawah ini:



Gambar 4. Logika Induktif Dalam Penelitian Kualitatif

Sumber: Creswell (2013)

Bagan di atas menjelaskan gambaran logika berfikir dengan menggunakan logika induktif. Prosesnya dimulai dengan Mengumpulkan Informasi melalui kegiatan observasi, wawancara, dokumen, dan dokumentasi. Wawancara dilakukan dengan tujuan untuk mengumpulkan informasi terbuka dari narasumber dan masyarakat yang menjadi objek penelitian. Tahapan selanjutnya adalah menganalisis data primer dan sekunder. Analisis data diperlukan untuk menyimpulkan dan menentukan pola kebijakan. Kemudian menetapkan aturan dan Kebijakan yang sifatnya umum.

Studi kasus pada penelitian ini menekankan pemahaman kontekstual yang mendalam. Penelitian ini menggali konteks sosial, ekonomi, budaya dan lingkungan Embung Tanjung Anom, termasuk:

1. Karakteristik masyarakat lokal dan bagaimana mereka terlibat dalam pengelolaan wisata tanjung anom;
2. Potensi alam dan budaya yang menjadi daya Tarik wisata;
3. Tantangan destinasi wisata tanjung anom seperti infrastruktur, partisipasi masyarakat dan distribusi ekonomi.

3.2 Fokus Penelitian

Penetapan fokus dalam penelitian ini bertujuan untuk mempersempit cakupan studi kualitatif dengan hanya mengkaji data-data yang relevan dengan topik yang diteliti. Mengingat adanya keterbatasan dari segi waktu, tenaga, dan biaya, serta untuk menjaga agar penelitian tetap terarah, maka penelitian ini difokuskan pada strategi pengembangan potensi pariwisata berbasis komunitas di Kabupaten Lampung Tengah. Pendekatan pengembangan potensi pariwisata mengacu pada strategi yang dikemukakan oleh Sunaryo (2013), yang mencakup:

1. Pelibatan aktif masyarakat dalam proses pengambilan keputusan;
2. Jaminan bahwa masyarakat lokal memperoleh manfaat dari kegiatan pariwisata;
3. Pemberian pendidikan dan pemahaman tentang kepariwisataan kepada masyarakat setempat.

3.3 Lokasi penelitian

Lokasi penelitian adalah tempat dimana peneliti memperoleh informasi mengenai data yang diperlukan. Pemilihan lokasi harus didasarkan pada pertimbangan-pertimbangan kemenarikan, keunikan, dan kesesuaian dengan topik yang dipilih. Dengan pemilihan lokasi ini, peneliti diharapkan menemukan hal-hal yang bermakna dan baru. Menurut Nasution mengatakan bahwa lokasi penelitian menunjuk pada pengertian lokasi sosial yang dicirikan oleh adanya tiga unsur yaitu pelaku, tempat dan kegiatan yang dapat diobservasi (Siagian *et al.*, 2022). Embung Tanjung Anom dipilih sebagai lokasi penelitian karena mewakili pengembangan pariwisata yang berbasis komunitas di daerah pedesaan. Penelitian ini mempelajari bagaimana prinsip-prinsip CBT diterapkan, tantangan yang dihadapi dan faktor pendukung dan penghambat pelaksanaan CBT di Embung Tanjung Anom. Penelitian ini tidak berusaha untuk membuat generalisasi langsung ke semua destinasi wisata berbasis komunitas tetapi lebih fokus pada pemahaman mendalam tentang bagaimana prinsip CBT diterapkan dalam konteks spesifik.

3.4 Informan Penelitian

Informan (narasumber) penelitian adalah seseorang yang memiliki informasi mengenai objek penelitian tersebut. Informan dalam penelitian ini yaitu berasal dari wawancara langsung yang disebut sebagai narasumber. Dalam

penelitian ini menentukan informan dengan menggunakan teknik purposive, yaitu dipilih dengan pertimbangan dan tujuan tertentu, yang benar-benar menguasai suatu objek yang peneliti teliti. *Purposive sampling* adalah teknik pengambilan sampel sumber data dengan pertimbangan tertentu. Pertimbangan tertentu ini, misalnya orang tersebut yang dianggap paling tahu tentang apa yang kita harapkan, atau mungkin dia sebagai penguasa sehingga memudahkan peneliti menjelajahi objek/situasi sosial yang diteliti. (Sugiyono, 2018). Peneliti beralasan menggunakan *purposive sampling* yaitu untuk mengumpulkan suatu data yang benar-benar real atau nyata dengan mewawancarai seorang informan yang dianggap mengetahui atau menguasai suatu keahlian atau pekerjaan tertentu dibidangnya. Sehingga dari *purposive sampling* tersebut yang peneliti gunakan untuk penelitian itu guna mempermudah pengolahan data untuk keperluan penelitian itu sendiri.

Tabel 3. Informan Penelitian

No	Nama informan	Jabatan
1	RS	Kepala Dinas Pemuda Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Lampung Tengah
2	DE	Kepala Bidang Pengembangan Destinasi Dan Kelembagaan Pariwisata Kabupaten Lampung Tengah
3	WTH	Kepala Kampung Tanjung Anom
4	ASW	Pengelola BUMK
5	DA	Pengelola Homestay/masyarakat
6	DY	Pemilik Warung/masyarakat
7	TH	Pengrajin/Pembuat keripik pisang sebagai oleh – oleh wisatawan
8	IS	Wisatawan
9	WPS	Wisatawan
10	BS	Manajer PT. Gunung Madu Plantations

Keterangan: Diolah oleh peneliti, 2023

Informan dalam penelitian ini adalah orang-orang yang terlibat secara langsung dalam pengembangan Embung Tanjung Anom. Keterlibatan informan-informan ini memberikan dampak bagi Embung Tanjung Anom. Informan memberikan informasi dan pengetahuan serta pengalaman yang telah dilakukan selama membangun Embung Tanjung Anom. Penggalan informasi kepada informan ini dilakukan dengan melakukan wawancara secara mendalam yang dilakukan dalam beberapa waktu yang berbeda. Keajegan informasi yang didapatkan dari informan menjadi tolok ukur kevalidan data wawancara.

3.5 Jenis dan Sumber Data

3.1.1 Data Primer

Data primer adalah data yang diperoleh langsung dari objeknya yang dikumpulkan dan diolah sendiri oleh peneliti. Dalam data primer ada hak sepenuhnya peneliti untuk menentukan data yang diinginkan sesuai dengan indikator-indikator dari variabel-variabel penelitian dengan tidak bertentangan dengan teori yang telah ada (Nasution, 2016). Data primer juga didefinisikan sebagai data yang berasal dari sumber asli atau pertama. Data ini tidak tersedia dalam bentuk terkompilasi ataupun dalam bentuk file-file. Data ini harus dicari melalui narasumber atau dalam istilah teknisnya responden, yaitu orang yang kita jadikan objek penelitian atau orang yang kita jadikan sebagai sarana mendapatkan informasi ataupun data. Data primer dalam penelitian ini adalah hasil wawancara yang telah dilakukan dengan informan penelitian.

3.1.2 Data Sekunder

Data sekunder merupakan data yang berasal dari berbagai informasi yang telah ada sebelumnya dan dikumpulkan oleh si peneliti untuk digunakan sebagai pelengkap kebutuhan data penelitian. Data sekunder pada umumnya bisa didapatkan melalui buku, artikel, publikasi pemerintah, maupun dari laporan-laporan sebelumnya yang berkaitan dengan informasi yang sedang dicari (Kogaya *et al.*, 2023). Data sekunder dikaji dalam bentuk dokumen dan juga arsip yang terdapat relevansinya dengan pelaksanaan strategi pengembangan pariwisata di Kabupaten Lampung Tengah. Beberapa jenis data sekunder yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

Tabel 4. Jenis-jenis Data Sekunder

No	Jenis Data	Sumber Data
1.	Peraturan Perundang-undangan	Pemerintah Kabupaten Lampung Tengah
2.	Artikel ilmiah dari jurnal internasional terakreditasi maupun nasional terakreditasi	Google scholar
3.	Artikel ilmiah dari jurnal internasional tidak terakreditasi maupun nasional tidak terakreditasi	Google scholar

Keterangan: Diolah oleh peneliti, 2023

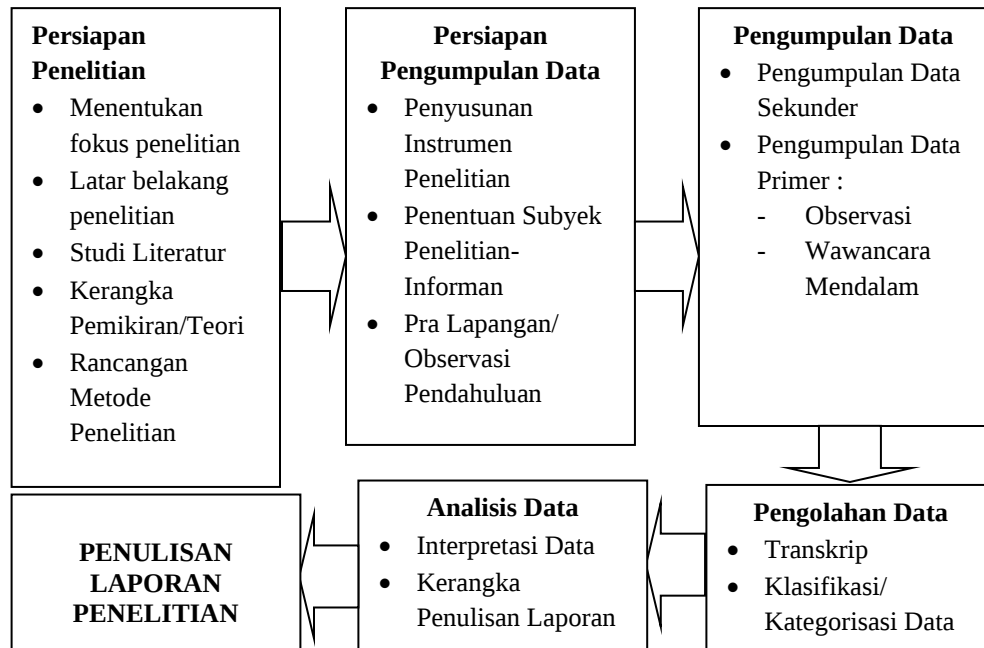
Data sekunder pada penelitian yang digunakan dalam penelitian ini yang bersumber dari peraturan perundang-undangan adalah sebagai berikut:

1. Undang-undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang kepariwisataan;
2. Undang-undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang penataan ruang;
3. Undang-undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil;

4. Undang-undang Nomor 39 Tahun 2009 tentang Kawasan ekonomi khusus;
5. Undang-undang Nomor 11 Tahun 2010 tentang cagar budaya;
6. Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang desa;
7. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang pemerintahan desa;
8. Peraturan Presiden Nomor 63 Tahun 2014 tentang pengawasan dan pengendalian pariwisata;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2011 tentang rencana induk Pembangunan kepariwisataan;
10. Peraturan Menteri Pariwisata Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Pedoman Penyusunan Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Provinsi dan Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Kabupaten/Kota;
11. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 6 Tahun 2012 tentang rencana Pembangunan pariwisata daerah;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Tengah No 7 Tahun 2020 tentang rencana induk Pembangunan kepariwisataan daerah tahun 2021-2025.
13. Data-data tentang Desa Wisata Embung Tanjung Anom.

3.6 Tahapan Penelitian

Tahapan Penelitian secara kualitatif dapat dilihat pada gambar dibawah ini:



Gambar 5. Diagram Alir Tahapan Pelaksanaan Penelitian

(Sumber: Susanti, 2019)

Persiapan penelitian diawali dengan penentuan fokus penelitian yakni pada strategi pengembangan Embung Tanjung Anom kemudian melakukan penelusuran latar belakang pengembangan Embung Tanjung Anom. Pembangunan Embung Tanjung Anom diawali oleh bencana kekeringan yang sering terjadi di saat musim kemarau dan masyarakat menjadi bergantung dengan bantuan air bersih dari beberapa Perusahaan sekitar kampung kemudian muncullah ide pembangunan embung yang saat ini namai dengan Embung Tanjung Anom. Latar belakang permasalahan yang telah ditemukan kemudian dikaji menggunakan studi literatur yang relevan untuk

menentukan apakah penelitian layak untuk dilakukan. Setelah penelitian dinyatakan layak untuk dilakukan maka selanjutnya perlunya membuat kerangka pemikiran yang dapat menggambarkan keseluruhan permasalahan penelitian melalui bagan serta fokus penyelesaian masalah. Setelah kerangka pikir berhasil dinyatakan maka perlunya menentukan metode penelitian yang relevan untuk digunakan. Pengumpulan data-data penelitian dilakukan dengan melakukan wawancara kepada informan penelitian serta melakukan observasi dan dokumentasi penelitian. Selain itu, pengumpulan data juga dapat dilakukan dengan mengkaji literatur dari sumber bacaan sekunder seperti jurnal ilmiah, peraturan perundang-undangan, arsip dan lain sebagainya. Analisis data dilakukan dengan menguji data-data yang telah dikumpulkan dengan mengkategorikan data berdasarkan jenis data dan memverifikasi data yang telah dikumpulkan.

3.7 Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yaitu sebagai langkah paling utama dalam penelitian, karena tujuan utama dari suatu penelitian adalah untuk mendapatkan data. Menurut Sugiyono dalam penelitian kualitatif, pengumpulan data dapat dilakukan pada natural setting (kondisi alamiah), sumber data primer atau sekunder, dan berbagai cara. Serta dalam pengumpulan data dapat dilakukan dengan observasi (pengamatan), *interview* (wawancara), dan dokumentasi. Teknik pengumpulan data digunakan untuk memperoleh data yang diperlukan dalam penelitian, teknik yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

3.7.1 Observasi

Observasi partisipan adalah kemampuan seseorang untuk menggunakan pengamatannya melalui hasil kerja panca indra mata, telinga, serta dibantu dengan panca indra lainnya. Dalam observasi ini, peneliti terlibat langsung dengan kegiatan sehari-hari subjek yang sedang diamati, merekam, dan mencatat semua kegiatan yang dilakukan oleh sumber data. Dengan menggunakan observasi partisipan maka data yang didapatkan akan lebih lengkap, tajam, dan sampai mengetahui pada tingkat makna dari setiap perilaku yang tampak. Observasi yang digunakan pada penelitian ini yaitu menggunakan observasi partisipan tidak terstruktur, dimana observasi tidak terstruktur ini dipersiapkan atau dilakukan tidak secara sistematis terkait dengan yang diobservasi. Dengan alasan peneliti tidak mengetahui secara pasti terkait apa yang akan diamati. Ketika melakukan pengamatan peneliti tidak menggunakan instrumen yang tidak baku, namun berupa rambu-rambu pengamatan.

Observasi atau pengamatan lapangan pada penelitian ini dilakukan dengan mengamati objek-objek penelitian yang ada di Embung Tanjung Anom seperti infrastruktur jalan dan sarana prasarana yang ada di Embung Tanjung Anom. Selain itu, kesiapan sumber daya manusia dan partisipasinya serta manfaat yang dapat diterima oleh masyarakat sekitar menjadi titik fokus observasi penelitian.

3.7.2 Wawancara

Wawancara merupakan teknik pengumpulan data yang melibatkan percakapan tujuannya untuk mencari informasi, baik dari narasumber atau informan. Wawancara semi terstruktur terdiri dari serangkaian pertanyaan-pertanyaan dan diperdalam dengan menggunakan pertanyaan yang setengah terbuka. Wawancara semi terstruktur ini akan lebih leluasa bagi peneliti dan lebih banyak mendapatkan informasi lebih mendalam.

Pada penelitian ini wawancara dilakukan dengan informan penelitian yang telah ditentukan sebelumnya. Namun pada penelitian ini jumlah informan juga dapat bertambah karena menggunakan metode *purposive sampling* yang mana orang-orang yang dijadikan informan adalah orang-orang yang memiliki keterkaitan erat dengan strategi pengembangan Embung Tanjung Anom.

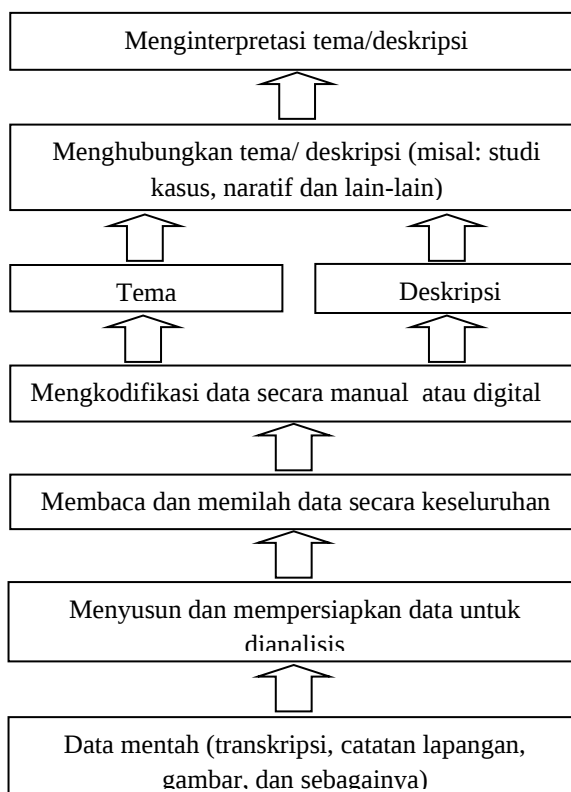
3.7.3 Dokumentasi

Dokumen adalah catatan peristiwa masa lampau. Dokumen dapat berbentuk gambar, tulisan atau karya-karya monumental dari seseorang. Dokumen juga dapat berbentuk rekaman kejadian masa lalu yang dicetak atau ditulis, dapat berupa catatan anekdot, buku harian, surat dan dokumendokumen. Pada penelitian ini dokumentasi dilakukan dengan mengumpulkan dokumen gambar dan tulisan yang berkaitan dengan pengembangan Embung Tanjung Anom. Diantaranya adalah gambar kampung tanjung anom sebelum Pembangunan embung dan progress

Pembangunan Embung Tanjung Anom. Kemudian dokumen pendukung yang berupa tulisan terdiri dari peraturan perundang-undangan dan dokumen tertulis pendirian Embung Tanjung Anom.

3.8 Teknik Analisis Data

Penelitian ini menggunakan data kualitatif. Data kualitatif disajikan dalam bentuk deskriptif yang didukung oleh foto. Data tersebut berasal dari naskah wawancara, catatan lapangan, foto, dokumen pribadi, catatan dan dokumen lainnya (Moleong, 2016). Data yang diperoleh dari wawancara, kuisioner, gambar dianalisis secara sistematis dalam Creswell (2013). Langkah-langkah analisis data:.



Gambar 6. Langkah-langkah Analisis Data Penelitian

Sumber: Creswell, 2013

Teknik pengolahan dan analisis data dimulai dengan menelaah seluruh data yang didapat dari hasil penelitian di berbagai sumber dan informasi yang diperoleh peneliti. Dari semua data yang diperoleh kemudian dipelajari dan ditelaah sehingga mendapatkan inti yang dibuat sebagai rangkuman penelitian. Menurut Tesch dalam Cresswell (2013) uraian pengolahan dan analisis data meliputi upaya peneliti dalam hal:

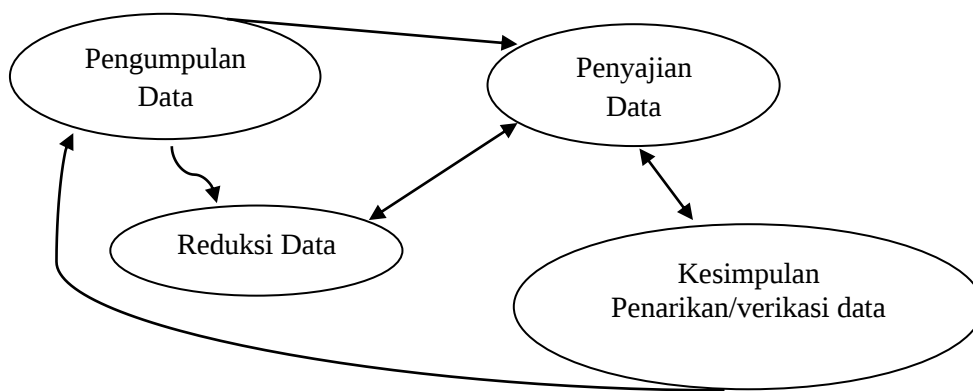
1. Pengumpulan data. Proses ini dimulai dengan mengumpulkan data dari lapangan, mengkaji seluruh data yang diperoleh dari berbagai sumber dan instrumen penelitian, mengelompokkan informasi dari lapangan dan dirangkum serta digambarkan secara naratif.
2. Reduksi data bertujuan untuk memberikan gambaran yang lebih jelas dan mempermudah peneliti untuk melakukan pengumpulan data selanjutnya, sehingga tidak mempersulit proses analisa data selanjutnya (Dikson, 2017).
3. Penyajian data yaitu setelah hasil reduksi data yang telah tersusun *data display* dalam penelitian kualitatif dapat dilakukan dalam bentuk tabel, grafik, *pie chart*, *pictogram* dan sejenisnya. Dengan penyajian data tersebut, maka data terorganisasikan ,tersusun pada pola hubungan, sehingga mudah di pahami (Dikson, 2017).
4. Penarikan kesimpulan atau verifikasi. Kesimpulan yang didapat masih bersifat sementara, dan tidak menutup kemungkinan akan mengalami perubahan apabila tidak ditemukan bukti-bukti yang kuat, serta yang mendukung pada tahap pengumpulan data berikutnya (Dikson, 2017). Dalam penelitian kualitatif, kesimpulan dapat menjawab rumusan masalah yang akan

dirumuskan peneliti sejak awal, tetap imungkin juga tidak bisa dapat menjawab rumusan masalah, karena seperti telah dikemukakan bahwa masalah dan rumusan masalah dalam penelitian kualitatif masih bersifat sementara dan akan berkembang setelah peneliti berada di lapangan.

Pada teknik analisis data, peneliti menggunakan teknik analisis data Matthew B. Miles dan A. Michael Huberman. Analisis data terdiri dari tiga alur kegiatan yang terjadi secara bersamaan, yang meliputi kegiatan Reduksi Data, Penyajian Data dan Penarikan Kesimpulan atau Verifikasi (Miles and Huberman. 1992). Pada Reduksi Data, peneliti merangkum, memilah dan memilih hal-hal pokok (penting dan dibutuhkan), kemudian peneliti membuat polanya. Dengan demikian, reduksi data dilakukan untuk menyeleksi dan memperoleh data yang lebih akurat dan relevan sesuai dengan kebutuhan penelitian. Oleh karena itu, peneliti mereduksi berbagai data primer maupun sekunder. Pada Penyajian data, data yang diperoleh saat reduksi data selanjutnya disajikan berdasarkan pikiran, intuisi, pendapat atau kriteria tertentu untuk selanjutnya ditempatkan pada kategori masing-masing. Namun dalam konteks penelitian kualitatif, data yang disajikan pada umumnya bersifat naratif. Dengan demikian, hasil dari data yang diperoleh dari proses reduksi dikaitkan dengan kerangka teori penelitian.

Dalam Penarikan Kesimpulan atau Verifikasi, makna yang dirumuskan peneliti dan data diuji kebenaran, kecocokan, dan kekokohnya. Kesimpulan yang dihasilkan dalam penelitian kualitatif bersifat sementara, sehingga terdapat kemungkinan rumusan masalah penelitian dapat terjawab atau tidak. Oleh karena

itu, dalam penelitian ini akan dilakukan penarikan kesimpulan dari kumpulan data yang telah direduksi dan disajikan dalam bentuk deskriptif.



Gambar 7. Model Analisis Interaktif

Sumber: Miles dan Huberman, 1992.

3.9 Keabsahan Data

Sugiyono (2015: 92) menyatakan bahwa teknik pemeriksaan keabsahan data adalah derajat kepercayaan atas data penelitian yang diperoleh dan bisa dipertanggung jawabkan kebenarannya. Sugiyono (2015) menjelaskan bahwa untuk pemeriksaan keabsahan data dalam penelitian kualitatif meliputi uji kredibilitas (*credibility*), uji transferabilitas (*transferability*), uji dependabilitas (*dependability*) dan terakhir uji obyektivitas (*confirmability*).

1. Uji Kredibilitas (*credibility*) merupakan uji kepercayaan terhadap data hasil penelitian kualitatif. Moleong (2016: 324) menyatakan bahwa uji kredibilitas ini memiliki dua fungsi, yaitu fungsi pertama untuk melaksanakan pemeriksaan sedemikian rupa tingkat kepercayaan penemuan kita dapat dicapai, dan fungsi yang kedua untuk mempertunjukkan derajat kepercayaan

hasil-hasil penemuan kita dengan jalan pembuktian terhadap kenyataan ganda yang sedang diteliti.

Penelitian mengenai strategi pengembangan potensi pariwisata berbasis komunitas di Kabupaten Lampung Tengah membutuhkan validitas data. Validitas data diperlukan untuk menentukan keabsahan data, sehingga diperlukan teknik pemeriksaan. Pengujian keabsahan data didasarkan atas kriteria: derajat kepercayaan (kredibilitas), keteralihan, ketergantungan, dan kepastian. Validitas dalam penelitian ini menggunakan triangulasi data dimana peneliti menemukan kesepahaman dengan subjek penelitian. Menurut Moleong (2016) teknik ini menggabungkan data dan informasi yang diperoleh dari satu sumber dengan sumber lainnya untuk memperoleh pemahaman interpretasi tentang masalah yang sedang diteliti, tujuan teknik triangulasi data ini adalah untuk mencocokkan kebenaran data. Triangulasi sebagai teknik untuk mengecek keabsahan data. Dimana dalam pengertiannya triangulasi adalah teknik pemeriksaan keabsahan data yang memanfaatkan sesuatu yang lain dalam membandingkan hasil wawancara terhadap objek penelitian (Ulfah, 2019). Triangulasi terdiri atas (a) triangulasi teknik; (b) triangulasi sumber data; (c) triangulasi waktu. Berkaitan dengan triangulasi teknik pengumpulan data, peneliti sebaiknya menggabungkan tiga teknik pengumpulan data yang telah diyakini mampu menghasilkan data yang mendalam dan mendetail, yakni wawancara, FGDs, dan observasi (Dyah Budiastuti, 2018).

Pertama, Triangulasi teknik digunakan untuk menguji sebuah data yang dilakukan dengan cara mencari tahu dan mencari kebenaran data terhadap sumber yang sama melalui teknik yang berbeda. Maksudnya peneliti menggunakan teknik pengumpulan data yang berbeda-beda untuk mendapatkan data dari sumber yang sama. *Kedua*, Triangulasi sumber berarti menguji data dari berbagai sumber informan yang akan diambil datanya. Triangulasi sumber dapat mempertajam daya dapat dipercaya data jika dilakukan dengan cara mengecek data yang diperoleh selama perisetan melalui beberapa sumber atau informan. *Ketiga*, Triangulasi Waktu ini berkaitan dengan waktu pengambilan data sehingga berpengaruh pada daya dapat dipercaya atau tidak. Misalnya, data yang dikumpulkan di pagi hari dengan teknik wawancara dimana saat itu narasumber masih segar dan belum banyak masalah, akan memberikan data yang lebih valid sehingga lebih kredibel (Alfansyur dan Mariyani, 2020).

2. Uji Transferabilitas (*Transferability*)

Sugiyono (2015) menjelaskan bahwa uji transferabilitas (*transferability*) adalah teknik untuk menguji validitas eksternal didalam penelitian kualitatif. Uji ini dapat menunjukkan derajat ketepatan atau dapat diterapkannya hasil penelitian ke populasi dimana sampel itu diambil. Kemudian Moleong (2016) menjelaskan bahwa tranferabilitas merupakan persoalan empiris yang bergantung pada kesamaan konteks pengirim dan penerima. Untuk menerapkan uji transferabilitas didalam penelitian ini peneliti memberikan uraian yang rinci, jelas, dan juga secara sistematis terhadap hasil penelitian. Diuraikannya hasil penelitian secara

rinci, jelas dan sistematis bertujuan supaya penelitian ini dapat mudah dipahami oleh orang lain dan hasil penelitiannya dapat diterapkan ke dalam populasi dimana sampel pada penelitian ini diambil.

3. Uji Dependabilitas (*Dependability*)

Prastowo (2012) uji Dependabilitas (*Dependability*) ini sering disebut sebagai reliabilitas didalam penelitian kuantitatif, uji dependabilitas didalam penelitian kualitatif dilakukan dengan cara melakukan audit terhadap keseluruhan proses didalam penelitian. Dijelaskan juga oleh Sugiyono (2015) bahwa uji dependabilitas dilakukan dengan cara mengaudit segala keseluruhan proses penelitian. Pada penelitian ini peneliti akan melakukant dengan cara peneliti akan berkonsultasi kembali kepada pembimbing, kemudian pembimbing akan mengaudit keseluruhan proses penelitian. peneliti berkonsultasi terhadap pembimbing untuk mengurangi kekeliruan-kekeliruan dalam penyajian hasil penelitian dan proses selama dilakukannya penelitian.

4. Uji Konfirmabilitas/Objektivitas (*Confirmability*)

Sugiyono (2015:) menjelaskan bahwa uji konfirmabilitas merupakan uji objektivitas di dalam penelitian kuantitatif, penelitian bisa dikatakan objektif apabila penelitian ini telah disepakati oleh orang banyak. Prastowo (2012: mengatakan bahwa menguji konfirmabilitas berarti menguji hasil penelitian yang dihubungkan dengan proses penelitian dilakukan. Di dalam uji ini nantinya peneliti akan menguji kembali data yang didapat tentang strategi pengembangan

embung Tanjung Anom. Prastowo menjelaskan bahwa ada empat teknik untuk melaksanakan uji konfirmabilitas, yaitu: 1) meningkatkan ketekunan, 2) triangulasi, triangulasi sumber, 3) diskusi teman sejawat, 4) menggunakan bahan referensi.

V. KESIMPULAN DAN SARAN

5.1 Kesimpulan

1. Penerapan prinsip CBT di Embung Tanjung Anom telah berjalan dengan melibatkan partisipasi aktif masyarakat, khususnya melalui kelompok sadar wisata (Pokdarwis) dan Badan Usaha Milik Kampung (BUMK). Namun, implementasinya masih belum maksimal karena partisipasi masyarakat belum merata, manfaat ekonomi belum didistribusikan secara adil, dan kapasitas masyarakat dalam pengelolaan pariwisata masih rendah. Inisiatif pembangunan masih bergantung pada figur kepala desa dan keterlibatan pemuda, dengan keterbatasan dalam aspek pendidikan kepariwisataan serta kurangnya strategi pengelolaan yang sistematis.
2. Faktor pendukung meliputi potensi alam Embung Tanjung Anom, semangat gotong royong masyarakat, dukungan dari perusahaan sekitar, serta inisiatif lokal dalam membentuk Pokdarwis dan BUMK. Namun, faktor penghambat yang signifikan mencakup: Rendahnya kapasitas SDM dan manajemen kelembagaan; Minimnya infrastruktur pendukung, terutama akses jalan; Lemahnya promosi dan digitalisasi pemasaran; Ketimpangan distribusi manfaat ekonomi yang menimbulkan kecemburuan sosial; Dampak pandemi COVID-19 yang menurunkan kunjungan wisatawan secara drastis.

3. Strategi pengembangan diarahkan pada penguatan sinergi antara pemerintah daerah, masyarakat lokal, dan sektor swasta. Model strategi yang dirumuskan meliputi: Peningkatan kapasitas SDM melalui edukasi dan pelatihan kepariwisataan; Penguatan kelembagaan Pokdarwis dan BUMK sebagai aktor utama pengelola destinasi; Perbaikan infrastruktur dan aksesibilitas menuju lokasi wisata; Promosi digital berbasis media sosial dan kolaborasi dengan influencer; Penciptaan produk wisata berbasis edukasi, budaya, dan ekowisata; Pendekatan pembangunan berkelanjutan dengan tetap menjaga kearifan lokal dan kelestarian lingkungan.

5.2 Saran

1. Pemerintah Kabupaten Lampung Tengah disarankan untuk menetapkan Embung Tanjung Anom sebagai Destinasi Wisata Unggulan Daerah melalui peraturan bupati atau SK Bupati. Dengan status tersebut, pemerintah dapat mengalokasikan anggaran daerah secara khusus untuk perbaikan jalan menuju embung, pembangunan fasilitas publik seperti toilet standar wisata, serta papan informasi dan rambu-rambu akses. Selain itu, pemerintah perlu membentuk tim lintas OPD (Dinas Pariwisata, PUPR, dan Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa) untuk mengawal pengembangan kawasan wisata berbasis komunitas secara terpadu.
2. Pengelola BUMK dan Pokdarwis Pokdarwis Tanjung Anom perlu segera menyusun Rencana Bisnis Wisata (Business Plan) tahunan yang mencakup jadwal event, paket wisata edukatif, pengelolaan homestay, dan strategi

pendapatan. Pengelola juga disarankan membuat akun media sosial resmi embung (Instagram, TikTok, YouTube) dan merekrut duta digital dari kalangan pemuda untuk mengelola konten secara konsisten. Dalam jangka pendek, dapat dimulai dengan mengadakan pelatihan digital marketing bekerja sama dengan universitas atau dinas komunikasi. Selain itu, pembentukan tim kreatif lokal yang bertugas merancang acara komunitas seperti lomba memancing, festival budaya, atau pasar UMKM mingguan akan sangat efektif menarik wisatawan lokal. BUMK dan Pokdarwis disarankan untuk menciptakan paket wisata edukasi yang menggabungkan wisata air, konservasi lingkungan, dan budaya lokal. Misalnya, wisatawan diajak menanam pohon di sekitar embung, mengikuti kelas membatik atau kerajinan rajut lokal, serta menyaksikan pertunjukan kuda lumping dan musik tradisional Lampung. Aktivitas ini bisa dijadwalkan secara mingguan dan dipromosikan lewat brosur dan media sosial.

3. Masyarakat lokal disarankan untuk membentuk kelompok kerja (pokja) warga di tiap dusun yang terlibat langsung dalam kegiatan operasional embung, seperti kebersihan, keamanan, kuliner, dan pemandu wisata. Pokja ini dapat bergiliran setiap minggu untuk memastikan semua warga mendapat manfaat ekonomi secara merata dan transparan. Warga juga disarankan mulai mengembangkan produk lokal khas (seperti makanan ringan, kerajinan tangan, atau tanaman herbal) yang bisa dijual di area embung. Pemberdayaan perempuan dan ibu rumah tangga dapat diarahkan untuk mengelola kios kuliner dan souvenir.

4. Digitalisasi Promosi dan Kerja Sama dengan Influencer Lokal
Strategi promosi perlu ditingkatkan dengan membuat konten visual menarik di media sosial seperti Instagram, TikTok, dan YouTube. Pengelola wisata disarankan untuk menunjuk satu tim khusus digital marketing dari kalangan pemuda yang bertanggung jawab atas konten harian, promosi event, dan interaksi dengan pengunjung daring. Selain itu, undang influencer lokal minimal satu bulan sekali untuk membuat ulasan dan konten viral agar jangkauan promosi lebih luas.

DAFTAR PUSTAKA

- Abreu, L. A. de, Walkowski, M. da C., Perinotto, A. R. C., dan Fonseca, J. F. da. (2024). Community-Based Tourism and Best Practices with the Sustainable Development Goals. *Administrative Sciences*, 14(2). <https://doi.org/10.3390/admsci14020036>
- Agus Supriatna. (2020). Strategi Pemberdayaan Masyarakat Melalui Pengembangan Desa Wisata Di Desa Rawabogo Kecamatan Ciwidey Kabupaten Bandung Provinsi Jawa Barat. *VISIONER : Jurnal Pemerintahan Daerah Di Indonesia*, 12(3), 561–578. <https://doi.org/10.54783/jv.v12i3.300>
- Aisah, I. U., dan Herdiansyah, H. (2020). Strategi Pemberdayaan Masyarakat dalam Pelaksanaan Program Desa Mandiri Energi. *Share : Social Work Journal*, 9(2), 130. <https://doi.org/10.24198/share.v9i2.21015>
- Alfansyur, A., dan Mariyani. (2020). Seni Mengelola Data : Penerapan Triangulasi Teknik , Sumber Dan Waktu pada Penelitian Pendidikan Sosial. *HISTORIS: Jurnal Kajian, Penelitian dan Pengembangan Pendidikan Sejarah*, 5(2), 146–150.
- Anggriani, R., Febriana, W., Prasetyo, R., dan Komala, R. (2023). Ekowisata Melalui Konsep Community Based Tourism. *JCOMENT (Journal of Community Empowerment)*, 4(3), 137–151. <https://doi.org/10.55314/jcoment.v4i3.430>
- Ariyani, N., Fauzi, A., dan Umar, F. (2020). Model hubungan aktor pemangku kepentingan dalam pengembangan potensi pariwisata Kedung Ombo. *Jurnal Ekonomi Dan Bisnis*, 23(2), 357–378. <https://doi.org/10.24914/jeb.v23i2.3420>
- Asmarah, A., Ismail, I., dan Aminah, S. (2021). Analisis Potensi Pembangunan Kepariwisata Di Kabupaten Wajo. *Jurnal Ada Na Gau: Public Administratoin*, 2(2), 637–645.
- Asmoro, A. Y., Yusrizal, F., dan Saputra, I. (2021). Pariwisata Berbasis Masyarakat di Desa Sekapuk: Sebuah Participatory Action Research. *JPPM (Jurnal Pendidikan Dan Pemberdayaan Masyarakat)*, 8(1), 30–47. <https://doi.org/10.21831/jppm.v8i1.34144>
- Assyakurrohim, D., Ikhrum, D., Sirodj, R. A., dan Afgani, M. W. (2022). Case Study Method in Qualitative Research. *Jurnal Pendidikan Sains Dan Komputer*, 3(01), 1–9.
- Asy'ari, R., Tahir, R., Rakhman, C. U., dan Putra, R. R. (2021). Pengembangan

Pariwisata Berbasis Masyarakat di Provinsi Jawa Barat. *Jurnal Socius: Journal of Sociology Research and Education*, 8(1), 47.
<https://doi.org/10.24036/scs.v8i1.292>

Azizah, L. H., dan Ilyas. (2023). Partisipasi Masyarakat Dalam Pengembangan Desa Wisata Berbasis Digital Di Desa Tingkir Lor. *AKSARA: Jurnal Ilmu Pendidikan Nonformal*, 9(93), 1681–1696.

Bagus Sanjaya, R. (2018). Strategi Pengembangan Pariwisata Berbasis Masyarakat Di Desa Kemetul, Kabupaten Semarang. *Jurnal Master Pariwisata (JUMPA)*, 05, 91. <https://doi.org/10.24843/jumpa.2018.v05.i01.p05>

Bahiyah, C., dan Hidayat, W. R. (2018). Strategi Pengembangan Potensi Pariwisata Di Pantai Duta Kabupaten Probolinggo. *Jurnal Ilmu Ekonomi*, 2, 95–103.

Budiani, R. sri dkk. (2018). Analisis Potensi dan Strategi Pengembangann Pariwisata Berkelanjutan Berbasis Komunitas Landsat Multitemporal di Desa Sembungan, Wonosobo, Jawa Tengah. *Majalah Geografi Indonesia*, 32(2), 115.
<https://doi.org/10.22146/mgi.33755>

Chaerunissa, S. F., dan Yuniningsih, T. (2020). Analisis Komponen Pengembangan Pariwisata Desa Wisata Wonopolo Kota Semarang. *Journal Of Public Policy And Management Review*, 9(4), 159–175.

Citra, I. P. A. (2017). Strategi Pemberdayaan Masyarakat Untuk Pengembangan Ekowisata Wilayah Pesisir Di Kabupaten Buleleng. *Jurnal Ilmu Sosial Dan Humaniora*, 6(1), 31. <https://doi.org/10.23887/jish-undiksha.v6i1.8484>

Damayanti, Hermanto2, dan I Ketut Bagiastra. (2022). Keterlibatan Masyarakat Dalam Pengelolaan Potensi Wisata Budaya Desa Karang Bajo Kecamatan Bayan Kabupaten Lombok Utara. *Open Journal System*, 17(3), 491–502.

Dikson, A. (2017). Peran Kader Posyandu Terhadap Pembangunan Kesehatan Masyarakat. *JISIP: Jurnal Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik*, 6(1), 60–62.
<http://dx.doi.org/10.1016/j.cirp.2016.06.001>
<http://dx.doi.org/10.1016/j.powtec.2016.12.055>
<https://doi.org/10.1016/j.ijfatigue.2019.02.006>
<https://doi.org/10.1016/j.matlet.2019.04.024>
<https://doi.org/10.1016/j.matlet.2019.127252>
<http://dx.doi.org/10.1016/j.matlet.2019.127252>

Doni, S., dan Prasetyo, A. (2021). Pengembangan Kawasan Ekowisata Dalam Roadmap Sistem Inovasi Daerah (Sida) Kabupaten Labuhanbatu Melalui Pariwisata Berbasis Masyarakat. *Jurnal Ilmu Pemerintahan Widya Praja*, 47(2), 159–174. <https://doi.org/10.33701/jipwp.v47i2.1711>

- Dyah Budiastuti, A. B. (2018). Validitas Dan Reliabilitas Penelitian. In *Mitra Wacana Media*.
- Fadli, M. R. (2021). Memahami desain metode penelitian kualitatif. *Humanika*, 21(1), 33–54. <https://doi.org/10.21831/hum.v21i1.38075>
- Fatmasari, B. R., Harahap, A., Navratilova, A., Andjanie, I., dan Annisa, L. (2023). Analisis Perkembangan Infrastruktur Pariwisata Di Kawasan Strategis Pariwisata Nasional (KSPN) Rupert, Kabupaten Bengkalis, Provinsi Riau. *Syntax Literate ; Jurnal Ilmiah Indonesia*, 8(2), 914. <https://doi.org/10.36418/syntax-literate.v8i2.11348>
- Fikry, M. S., dan Ghozali, M. L. (2022). Tinjauan Ekonomi Syariah Terhadap Strategi Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat di MWC NU Dukun dan Panceng Gresik. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, 8(03), 2456–2472.
- Ginting, N., dan Veronica, S. (2016). Pariwisata Berbasis Masyarakat Pasar Buah Berastagi. *Temu Ilmiah IPLBI*, 1, C 035-042. <https://temuilmiah.iplbi.or.id/wp-content/uploads/2016/12/IPLBI2016-C-035-042-Pariwisata-Berbasis-Masyarakat-Mampukah-Pasar-Buah-Berastagi.pdf>
- Gumi, K. A., dan Putu, L. W. (2021). Pengembangan Wisata Kampung Jalak Bali Di Desa Bongan Dengan Pemanfaatan Media Sosial. *Jurnal Dinamika Pengabdian*, 7(1), 95–104.
- Habibi, A. M., Kumalasari, A., dan Rupiarsieh. (2024). Pengelolaan Wisata Growgoland Waterfun dalam Perspektif Community Based Tourism di Desa Ngunut Kecamatan Dander Kabupaten Bojonegoro. *Jurnal Ilmu Administrasi Negara*, 8(1), 146–154.
- Halibas, A. S., Sibayan, R. O., dan Maata, R. L. R. (2017). The penta helix model of innovation in Oman: An hei perspective. *Interdisciplinary Journal of Information, Knowledge, and Management*, 12, 159–172.
- Harahap, N. (2020). *Penelitian Kualitatif* (H. Sazali (Ed.)). Wal Ashri Publishing.
- Harrison. (2015). *Definitions and examples of the theory of Development : A review of dominant theories within the context of tourism development* . 1–13.
- Hendra, H., Nur, M., Haeril, H., Junaidin, J., dan Wahyuli, S. (2023). Strategi Pemberdayaan Sosial Ekonomi Masyarakat Miskin Pesisir. *Jurnal Intelektualita: Keislaman, Sosial Dan Sains*, 12(1), 72–80. <https://doi.org/10.19109/intelektualita.v12i1.16880>

- HENNINK, M. H. • I. H. • A. B. (2019). Qualitatif Research Methods. *British Library Cataloguing in Publication Dat*.
- Herbasuki, nur chasanah. (2019). No ANALYSIS OF COMMUNITY PARTICIPATION IN TOURISM VILLAGE DEVELOPMENT (STUDY OF THE TINGKIR LOR SALATIGA VILLAGE). *DINAMIKA GOVERNANCE: JURNAL ILMU ADMINISTRASI NEGARA*, 9(2), 91–100.
<http://dx.doi.org/10.1016/j.jbusres.2013.07.020>
<http://dx.doi.org/10.1016/j.aannals.2010.10.008>
<http://scholar.google.com/scholar?hl=endanbtnG=Searchdanq=intitle:As+cidades+e+territ?rios+do+conhecimento+na+?ptica+desenvolvimento+e+do+marketing+territorial#>
- Herdiana, D. (2019). Peran Masyarakat dalam Pengembangan Desa Wisata Berbasis Masyarakat. *Jurnal Master Pariwisata (JUMPA)*, September, 63.
<https://doi.org/10.24843/jumpa.2019.v06.i01.p04>
- Hidayah, G. A. (2023). Peningkatan Peran Pokdarwis Melalui Program Ekonomi Kreatif Dalam Upaya Optimalisasi Pengelolaan Kampung Wisata Di Pipitan. *Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat Nusantara (JPkMN)*, 3(2), 1501–1508.
<https://ejournal.sisfokomtek.org/index.php/jpkm/article/view/615/472>
- Hidayat, R., Andarini, S., dan Studi. (2020). STRATEGI PEMBERDAYAAN UMKM DI PEDESAAN BERBASIS KEARIFAN LOKAL DI ERA INDUSTRI 4 . 0. *Jurnal Bisnis Indonesia*, 93–109.
- Huda, M. M., Trinugraha, Y. H., dan Astutik, D. (2023). Pariwisata Berbasis Masyarakat: Studi Kasus Pantai Menganti, Kebumen. *Jurnal Sosiologi Agama Indonesia (JSAI)*, 4(3), 384–404. <https://doi.org/10.22373/jsai.v4i3.3543>
- Irawati, N., dan Prakoso, A. A. (2016). Terapan Brand “Jogja Istimewa” Terhadap Pengembangan Pariwisata Berbasis Community Based Tourism (Cbt) Di Yogyakarta. *Kepariwisataan: Jurnal Ilmiah*, 10(03), 65–80.
<https://doi.org/10.47256/kepariwisataan.v10i03.121>
- Jumadi. (2020). Membangun Loyalitas Wisatawan Melalui Kebijakan Pariwisata Hijau dan Strategi Pemasaran Pariwisata Hijau. *Jurnal ALTASIA*, 2(2), 290–298.
- Karami, M., dan Iswan, I. (2023). Bantuan Teknis Perencanaan dan Pembangunan Jalan di Desa Ngesti Rahayu Kecamatan Punggur Kabupaten Lampung Tengah. *Nemui Nyimah*, 3(2). <https://doi.org/10.23960/nm.v3i1.51>
- Khoirin, Purnawan, H., dan Anggraini, D. (2020). Analisis Kebijakan Program Pembinaan Anak Jalanan Oleh tersebut Pemerintah Daerah Kabupaten Ogan Ilir melalui Kepala Daerah menunjuk Satuan Kerja Perangkat Daerah melalui Dinas

Sosial Kabupaten Ogan Ilir mempunyai Program Pembinaan Anak Jalanan sebagai up. *Publisitas*, 7(2), 140–148.

Kisi, N. (2019). A Strategic Approach to Sustainable Tourism Development Using the A'WOT Hybrid Method: A Case Study of Zonguldak, Turkey. *Sustainability (Switzerland)*, 11(4). <https://doi.org/10.3390/su11040964>

Kogaya, I., Suradinata, E., dan Thahir, B. (2023). Analisis Data Sekunder Implementasi Kebijakan Sistem Computer Assisted Test (CAT) Pada Penerimaan Pegawai Negeri Sipil (PNS) Di Provinsi Papua. *Jurnal Kajian Pemerintah: Journal of Government, Social and Politics*, 9(1), 1–13. [https://doi.org/10.25299/jkp.2023.vol9\(1\).11963](https://doi.org/10.25299/jkp.2023.vol9(1).11963)

Kualaria, S., Wijayantini, B., dan Hanafi, I. (2022). Peran Masyarakat Lokal Dalam Pengembangan Potensi Desa Wisata. *National Multidisciplinary Sciences*, 1(1), 20–26. <https://doi.org/10.32528/nms.v1i1.5>

Lailatul Fitria, N. J. (2023). Analisis Kesiapan Kota Probolinggo Menuju Kota Kreatif (Studi Pembangunan Berkelanjutan Dengan Konsep Kota Kreatif Pmk3I). *Jurnal Inovasi Daerah*, 2(1), 30–48. <https://doi.org/10.56655/jid.v2i1.67>

Lestari, G.-. (2016). PARTISIPASI PEMUDA DALAM MENGEMBANGKAN PARIWISATA BERBASIS MASYARAKAT UNTUK MENINGKATKAN KETAHANAN SOSIAL BUDAYA WILAYAH (Studi di Desa Wisata Pentingsari, Umbulharjo, Cangkringan, Sleman, D.I. Yogyakarta). *Jurnal Ketahanan Nasional*, 22(2), 137. <https://doi.org/10.22146/jkn.17302>

Mahanani, Y. P., dan Hananik, L. W. (2021). Pengembangan Pariwisata BERBASIS Masyarakat Guna Mengembangkan Perekonomian Masyarakat Lokal. *Ekonomi*, 1(2013), 181–188.

Mahendra, M. I. W. P. G. K. (2021). Analisis Dampak Covid-19 Terhadap Sektor Pariwisata Di Objek Wisata Goa Pindul Kabupaten Gunungkidul. *JSPG: Journal Of Sosial Politics and Governance*, 3(2), 73–85.

Manaf, yayuk tri wahyuni. asnawi. (2016). Partisipasi Masyarakat dan Keberlanjutan Program Gerak Bersemi di Griya Prima Lestari Munthe Kabupaten Kutai Timur. *Jurnal Pembangunan Wilayah dan Kota*, 12(4), 472–482. <https://doi.org/10.14710/pwk.v12i4.13511>

Martarida Bagaihing, Christina Mariana Mantolas, Y. E. N. (2022). STRATEGI PENGEMBANGAN PANTAI NIMTUKA SEBAGAI POTENSI WISATA BERBASIS MASYARAKAT DI DESA BONE, KABUPATEN KUPANG.

Jurnal Tourism, 05(02), 95–104.

- Maturbongs, E. E. (2020). Kolaborasi Model Pentahelix Dalam Pengembangan Pariwisata Berbasis Kearifan Lokal Di Kabupaten Merauke. *Transparansi : Jurnal Ilmiah Ilmu Administrasi*, 3(1), 55–63.
<https://doi.org/10.31334/transparansi.v3i1.866>
- Meilinawati. (2018). Analisis Partisipasi Masyarakat Dalam Program Padat Karya Di Kecamatan Magelang Utara. *Jurnal Mahasiswa Administrasi Negara (JMAN)*, 2(2), 84–96.
- Minardi, A., Taufik, T., Afriantari, R., dan Hasanah, N. U. (2020). Indonesian Tourism Diplomacy to India. *Indonesian Journal of Tourism and Leisure*, 1(1), 1–13. <https://doi.org/10.36256/ijtl.v1i1.83>
- Mustofa, I. (2016). Jendela Logika dalam Berfikir: Deduksi dan Induksi sebagai Dasar Penalaran Ilmiah. *Jurnal Pemikiran Dan Pendidikan Islam*, 6(4), 122–142. <https://doi.org/10.1093/jhered/esl028>
- Nafi, M., Supriyadi, B., dan Roedjinandari, N. (2017). Pengembangan ekowisata daerah. Buku Bunga Rampai. *Buku Bunga Rampai ISBN, October*, 38–45.
https://www.researchgate.net/profile/Bambang-Supriyadi-3/publication/320726310_Pengembangan_Ekowisata_Daerah/links/59f7ded8aca272607e2d9126/Pengembangan-Ekowisata-Daerah.pdf
- Nasution, H. fadlilah. (2016). Instrumen Penelitian dan Urgensinya dalam Penelitian Kuantitatif. *Jurnal Ilmu Ekonomi Dan Keislaman*, 59–75.
- Normayasai, N. (2024). Implementasi Konsep Community Based Tourism Dalam Pengelolaan Desa Wisata Liya Togo. *INNOVATIVE: Journal Of Social Science Research*, 4(3), 17619–17627.
- Novianti, E., Nugraha, H., Zahra, R. R., Komunikasi, F. I., Padjajaran, U., dan Pijar, K. (2021). Potensi Wisata Komunitas Pijar Sebagai Kelompok Unik Dalam Lingkungan Masyarakat Multikultural POTENTIAL TOURISM OF KOMUNITAS PIJAR AS A UNIQUE GROUP IN A. *Tornare - Journal of Sustainable Tourism Research*, 3(1), 30–34.
- Nurhidayati, S. E. (2012). Community Based Tourism sebagai Pendekatan Pembangunan Pariwisata Berkelanjutan. *Media Masyarakat Kebudayaan Dan Politik*, 10(3), 191–202. [http://www.journal.unair.ac.id/filerPDF/Community Based Tourism _CBT_.pdf](http://www.journal.unair.ac.id/filerPDF/Community%20Based%20Tourism_CBT_.pdf)
- Nurwanto. (2020). Evaluation of The Impact Tourism Development Using the

Concept Community Based Tourism in The Tourist Area Tebing Breksi. *Jurnal Kepariwisata Indonesia*, 14(2), 109–124.

Palimbunga, I. P. (2017). Bentuk Partisipasi Masyarakat dalam Pengembangan Pariwisata di Kampung Wisata Tablanusu Kabupaten Jayapura Provinsi Papua: Kajian Pariwisata Budaya. *MELANESIA: Jurnal Ilmiah Kajian Sastra Dan Bahasa*, 01(02), 15–32. <https://www.neliti.com/publications/236290/bentuk-partisipasi-masyarakat-dalam-pengembangan-pariwisata-di-kampung-wisata-ta>

Pambudi, A. S., Fikri Masteriarsa, M., Dwifebri, A., Wibowo, C., Amaliyah, I., Adhitya, D., dan Ardana, K. (2020). Majalah Media Perencana Perkumpulan Perencana Pembangunan Indonesia Volume. *Majalan Media Perencanaan*, 1(1), 1–21.
<https://mediaperencana.perencanapembangunan.or.id/index.php/mmp/article/view/1>

Paseru, olivia ribakah datu. (2024). the Influence of Product Differentiation, Product Innovation, Factor of Cultural, Social, Personal and Psychological on Purchasing Decisions (Empirical Study At Apresiasi Kreasi Indonesia Exhibition). *JIMEA : Jurnal Ilmiah MEA (Manajemen, Ekonomi, Dan Akuntansi)*, 8(1), 506–517.

Pathony, T. (2020). Proses Pemberdayaan Masyarakat Melalui Gerakan Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (PKK) di Kabupaten Subang. *Ijd-Demos*, 1(2), 262–289. <https://doi.org/10.31506/ijd.v1i2.23>

Peraturan Daerah No. 13 tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Daerah Tahun 2021-2025. (n.d.).

Permana, A. F. (2022). Konseptualisasi Strategi Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Desa. *J-EBI: Jurnal Ekonomi Bisnis Islam*, 1(1), 13–27.
<https://doi.org/10.57210/j-ebi.v1i1.44>

Permatasari, S. J., Wahyudiono, A., dan Imaniar, D. (2021). Safrieta Jatu Permatasari Andhika Wahyudiono Dimas Imaniar. *PROMEDIA (PUBLIC RELATION DAN MEDIA KOMUNIKASI)*, 7(1), 157–191.

Postma, A., dan Schmuecker, D. (2017). Understanding and overcoming negative impacts of tourism in city destinations: conceptual model and strategic framework. *Journal of Tourism Futures*, 3(2), 144–156.
<https://doi.org/10.1108/JTF-04-2017-0022>

Prasetyo, B. D., Febriani, N. S., dan DY, W. W. A. (2024). Community Based Tourism (CBT) sebagai Model Pengembangan Desa Wisata Adat Desa Ngadas, Kecamatan Poncokusumo Kabupaten Malang. *Jurnal Ilmu Komunikasi*, 22(1),

92. <https://doi.org/10.31315/jik.v22i1.9285>

- Prasta, M. (2021). Pariwisata Berbasis Masyarakat Sebagai Pelestari Tradisi di Desa Samiran. *Jurnal Kepariwisata: Destinasi, Hospitalitas Dan Perjalanan*, 5(1), 99–109. <https://doi.org/10.34013/jk.v5i1.379>
- Putu Henny Puspawati, D., dan Ristanto, R. (2018). Strategi Promosi Digital Untuk Pengembangan Pariwisata Kota Magelang. *Jurnal Jendela Inovasi Daerah*, 1(2), 1–20. <https://doi.org/10.56354/jendelainovasi.v1i2.14>
- Putu mahyuni, L., dan Agung tistha DY, I. gusti ayu. (2021). Corporate Social Responsibility, Kearifan Lokal Tri Hita Karana, Dan Pariwisata Berbasis Masyarakat Berkelanjutan. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Dan Bisnis*, 18(2), 137–146. <https://doi.org/10.31849/jieb.v18i2.5803>
- Putu, N., Paristha, T., Kadek, N., dan Mirayani, S. (2022). Identification of Tourism Components of Tourism Villages in Supporting Tourism Development in the New Normal Era: Kerta Village Gianyar Bali Identifikasi Komponen Pariwisata Desa Wisata Kerta, Gianyar, Bali Dalam Mendukung Pengembangan Pariwisata di Era N. *JUWITA: Jurnal Pariwisata Nusantara*, 1(2), 136–151. <https://journal.uinmataram.ac.id/index.php/juwita>
- Ramдах Radjab, Amirosa Ria Satiadji, dan Adhi Yuliyanto. (2022). Pemberdayaan Masyarakat Dalam Menggali Potensi Alam Dan Budaya Dalam Pengembangan Desa Wisata Bonjeruk, Lombok Tengah, Nusa Tenggara Barat. *J-ABDI: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*, 2(2), 4143–4156. <https://doi.org/10.53625/jabdi.v2i2.2678>
- Ransta L. Lekatompessy; Edoardus E. Maturbongs; Hubertus Oja. (2023). Strategi Kebijakan Pariwisata Berbasis Masyarakat. *Ilmu Administrasi Dan Sosial*, 12(1), 42–50.
- Rees, G. H., dan MacDonell, S. (2017). Data gathering for actor analyses: A research note on the collection and aggregation of individual respondent data for MACTOR. *Future Studies Research Journal: Trends and Strategies*, 9(1), 115–137. <https://doi.org/10.24023/futurejournal/2175-5825/2017.v9i1.256>
- Resnawaty, R. (2016). Strategi Community Practice Dalam Pengembangan Pariwisata Berbasis Masyarakat. *Share : Social Work Journal*, 6(1). <https://doi.org/10.24198/share.v6i1.13152>
- Risky, P. (2022). Strategi Pengembangan Ekowisata Mangrove Berbasis Masyarakat dalam Menarik Kunjungan Wisatawan di Kampung Baru Kabupaten Penajam Paser Utara. *Jurnal Inovasi Penelitian*, 3(2), 494–495.

- Rosnida Sari. (2016). Pemberdayaan Masyarakat Melalui Pengembangan Usaha Pariwisata. *Jurnal Al-Bayan*, 22(34), 53–64. [jurnal.ar-raniry.ac.id › index.php › bayan › article › download%0A](http://jurnal.ar-raniry.ac.id/index.php/bayan/article/download/0A)
- Rusyidi, B., dan Fedryansah, M. (2018). PENGEMBANGAN PARI WI SATA BERBASIS S MASYARAKAT. *Jurnal Pekerjaan Sosial*, 1(3), 155–165.
- Saifuddin, R. (2019). Penguatan Lembaga Ekonomi Desa dalam Mendorong Pariwisata di Daerah. *Jurnal Kajian Pariwisata*, 1(1), 63–75. <http://ejurnal.ars.ac.id/index.php/JIIP/article/view/128>
- Salam, T., Sumilat, G. D., dan Umaternate, A. R. (2021). Keterlibatan Masyarakat Dalam Pengelolaan Objek Wisata Permandian Wakumoro Di Kabupaten Muna. *GEOGRAPHIA : Jurnal Pendidikan Dan Penelitian Geografi*, 2(1), 68–79. <https://doi.org/10.53682/gjppg.v2i1.1488>
- Salihin, A. (2023). Pengembangan Desa Wisata Bilebante Berbasis Community Basd Tourisme Dalam Upaya Pemberdayaan Ekonomi. *Jurnal Ekonomi, Manajemen, Dan Bisnis*, 1(2), 1–7.
- Setiawan, I. R. (2016). Pengembangan Sumber Daya Manusia di Bidang Pariwisata: Perspektif Potensi Wisata Daerah Berkembang. *Jurnal Penelitian Manajemen Terapan*, 1(1), 24. <https://journal.stieken.ac.id/index.php/penataran/article/view/301>
- Siagian, H. F., Damanhuri, D., dan Juwandi, R. (2022). Pengembangan Kesadaran Hukum Berlalu Lintas Siswa Melalui Model Pembelajaran Jurisprudensial dalam Pendidikan Kewarganegaraan. *Jurnal Kewarganegaraan*, 6(1), 27–37.
- Sidiq, A. J., dan Resnawaty, R. (2017). Pengembangan Desa Wisata Berbasis Partisipasi Masyarakat Lokal Di Desa Wisata Linggarjati Kuningan, Jawa Barat. *Prosiding Penelitian Dan Pengabdian Kepada Masyarakat*, 4(1), 38. <https://doi.org/10.24198/jppm.v4i1.14208>
- Silalahi, U. (2017). Metode Penelitian Sosial. *Metode Penelitian Kualitatif*, 17, 43. [http://repository.unpas.ac.id/30547/5/BAB III.pdf](http://repository.unpas.ac.id/30547/5/BAB%20III.pdf)
- Sonatasia, D., Onsardi, dan Arini, E. (2020). Strategi Meningkatkan Loyalitas Konsumen Makanan Khas Kota Curup Kabupaten Rejang Lebong. *Journal of Chemical Information and Modeling*, 53(9), 1689–1699.
- Suardana, I. wayan. (2016). Analisis Kebijakan Pengembangan Pariwisata (Intervensi Melalui Kebijakan Pariwisata Berkelanjutan di Bali). *Seminar Nasional Pariwisata Berkelanjutan*, April, 1–26.

- Suasapha, A. H. (2016). Implementasi Konsep Pariwisata Berbasis Masyarakat Dalam Pengelolaan Pantai Kedonganan. *Jurnal Master Pariwisata (JUMPA)*, 2, 58–76. <https://doi.org/10.24843/jumpa.2016.v02.i02.p04>
- Suci Ramadhani, B. (2022). Peran Pemuda dalam Pengembangan Wisata Pantai Lowita di Kabupaten Pinrang, Kasus: Pemanfaatan Media Sosial. *Journal of Tourism, Hospitality and Destination*, 1(4), 169–174. <https://doi.org/10.55123/toba.v1i4.1627>
- Sudiarta, I. M., Suharsono, N., Tripalupi, L. E., dan Irwansyah, M. R. (2021). Analisis Dampak Perkembangan Pariwisata Terhadap Kondisi Sosial Ekonomi Masyarakat. *Business and Accounting Education Journal*, 2(1), 22–31. <https://doi.org/10.15294/baej.v0i1.42765>
- Suganda, A. D. (2018). Konsep Wisata Berbasis Masyarakat. *I-Economic*, 4(1), 29–41. <http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/7556065> <http://www.pubmedcentral.nih.gov/articlerender.fcgi?artid=PMC394507> <http://dx.doi.org/10.1016/j.humpath.2017.05.005> <https://doi.org/10.1007/s00401-018-1825-z> <http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/27157931>
- Sugiyono, D. (2018). Metode penelitian kuantitatif , kualitatif dan R dan D / Sugiyono. In *Bandung: Alfabeta*.
- Suniastha Amerta, I. M. (2017). The role of tourism stakeholders at Jasri tourism village development, Karangasem regency. *International Journal of Social Sciences and Humanities*, 1(2), 20–28. <https://doi.org/10.29332/ijssh.v1n2.32>
- Surahman, T., Sudiarta, I. N., dan Suwena, I. K. (2020). Dampak Pengembangan Pariwisata Terhadap Ekonomi dan Sosial Budaya Masyarakat Lokal Desa Wisata Sasak Ende Kabupaten Lombok Tengah. *Jurnal Analisis Pariwisata*, 20(1), 38–48. <https://ejournal.bsi.ac.id/ejurnal/index.php/khasanah/article/view/9817>
- Syarifah, R., dan Rochani, A. (2022). Studi Literatur: Pengembangan Desa Wisata Melalui Community Based Tourism Untuk Kesejahteraan Masyarakat. *Jurnal Kajian Ruang*, 1(1), 109. <https://doi.org/10.30659/jkr.v1i1.19983>
- Tangalele, C. S., Rindengan, Y. D. Y., dan Sambul, A. M. (2019). Rancang Bangun Aplikasi Pariwisata Di Kabupaten Parigi Moutong Berbasis Android. *Jurnal Teknik Informatika*, 14(2), 151–158.
- Thorik, S. H. (2020). *Efektivitas Pembatasan Sosial Berskala Besar Di Indonesia Dalam Penanggulangan Pandemi Covid-19 total jumlah Pasien Dalam Dalam*

Pengawasan sebanyak Langkah Strategis Pemerintah Penanggulangan Wabah Corona Vi- Covid 19 , pertumbuhannya cukup mengkhawatirka. 4, 115–120.

Tirtoni, F. (2022). *Procedia of Social Sciences and Humanities Community Empowerment Collaboration as a Basis for Community Economic Improvement through Tourism Village Icons Kolaborasi Pemberdayaan Masyarakat sebagai Dasar Peningkatan Perekonomian Masyarakat melalui Ikon De. Procedia of Social Sciences and Humanities, 0672(c), 732–740.*

Tisnawati, E., Ayu Rani Natalia, D., Ratriningsih, D., Randhiko Putro, A., Wirasmoyo, W., P. Brotoatmodjo, H., dan Asyifa', A. (2019). Strategi Pengembangan Eko-Wisata Berbasis Masyarakat Di Kampung Wisata Rejowinangun. *INERSIA: LNformasi Dan Ekspose Hasil Riset Teknik SIpil Dan Arsitektur, 15(1), 1–11.* <https://doi.org/10.21831/inersia.v15i1.24859>

TRUNAJAYA, I. G. (2016). Pengembangan Pariwisata Berbasis Masyarakat. *Penelitian Hibah Unggulan Program Studi, Fakultas Ekonomi Dan Bisnis, Universitas Udayana.* <https://doi.org/10.24198/focus.v1i3.20490>

Ulfah, A. Z. T. (2019). Peran Perangkat Desa Dalam Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa. *Jurnal Akademisi Akuntansi, 2(2), 119–144.*

Ulum S, S. D. . (2021). 14-24+Partisipasi+Masyarakat+Dalam+Pengembangan+Desa+Wisata+Gampong. *Partisipasi Masyarakat Dalam Pengembangan Desa Wisata Gampong, 3, 14–24.*

Wahyuni, D. (2019). Pengembangan Desa Wisata Pentingsari, Kabupaten Sleman dalam Perspektif Partisipasi Masyarakat. *Aspirasi: Jurnal Masalah-Masalah Sosial, 10(2), 91–106.* <https://doi.org/10.46807/aspirasi.v10i2.1386>

Wibowo, M. satrio. lutfi arviana belia. (2023). Partisipasi Masyarakat dalam Pengembangan Pariwisata Berkelanjutan. *Jurnal Manajemen Perhotelan Dan Pariwisata, 6(1), 25–32.*

Wibowo, T. A., Kaskoyo, H., dan Damai, A. A. (2019). Pengembangan Wisata Pantai Mutun Terhadap Dampak Fisik, Sosial Dan Ekonomi Masyarakat Desa Sukajaya Lempasing, Kabupaten Pesawaran, Lampung. *Jurnal Pengembangan Kota, 7(1), 83.* <https://doi.org/10.14710/jpk.7.1.83-90>

Widari, S. A. (2021). Modal Sosial Dalam Community Based Tourism (Objek Wisata Hutan Mangrove Leguk Bulan Di Kampung Tanjung). *Sosains, 1(5), 386–394.*

- Wilopo, K. K., dan Hakim, L. (2017). STRATEGI PENGEMBANGAN DESTINASI PARIWISATA BUDAYA (Studi Kasus pada Kawasan Situs Trowulan sebagai Pariwisata Budaya Unggulan di Kabupaten Mojokerto). *Jurnal Administrasi Bisnis (JAB)*, 41(1), 56–65.
- Wirawan, A., dan Raharjo, T. (2018). Pengelolaan Embung Desa Menuju Desa Wisata Melalui Bumk Tanjung Anom. *Dinamisia : Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*, 2(2), 167–174. <https://doi.org/10.31849/dinamisia.v2i2.2304>
- Yulianah. (2021). Mengembangkan Sumber Daya Manusia Untuk Pariwisata Berbasis Komunitas Di Pedesaan. *Komitmen: Jurnal Ilmiah Manajemen*, 2(1), 1–9. <https://doi.org/10.15575/jim.v2i1.12472>
- Yulianto, M. M. (2020). Transformasi kelompok wanita tani menjadi kelompok sadar wisata di Kecamatan Punggur Lampung Tengah. *Jurnal Pengabdian Pada Masyarakat*, 5(2), 319–334.
<http://ppm.ejournal.id/index.php/pengabdian/article/view/299>
- Yuningsih, T., Darmi, T., dan Sulandari, S. (2019). Model Pentahelik Dalam Pengembangan Pariwisata Di Kota Semarang. *JPSI (Journal of Public Sector Innovations)*, 3(2), 84. <https://doi.org/10.26740/jpsi.v3n2.p84-93>
- Yusnita, V. (2019). Di D Esa K Andangan , K Abupaten T Emanggung. *Jurnal Ilmiah Administrasi Publik Dan Pembangunan*, 11(1), 252–271.